

Pendidikan

KEWARGANEGARAAN

Perspektif Moral dan Karakter



Arief Wahyudi, S.H, M.H.
Dr. Deny Setiawan, M.Si.
Jamaludin, S.Pd., M.Pd.

ISBN : 978-623-6942-27-7



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perspektif Moral Dan Karakter

Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Civic Education* atau *Citizenship Education*, pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan warga negara untuk dapat memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban secara cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Karakteristik merupakan suatu ciri khas yang menunjukkan adanya perbedaan dengan lainnya, begitu pula pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki karakteristik yang membedakan dengan mata pelajaran yang lainnya yang diajarkan disekolahan pada umumnya. Adapun karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson, (1999:4) materi Pendidikan Kewarganegaraan harus mencakup tiga komponen, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skill* (kecakapan kewarganegaraan) dan *Civic Disposition* (sikap kewarganegaraan).

Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan (Perspektif Moral dan Karakter) merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mencakup beberapa kajian: Bab I. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan; Bab II. Dimensi dan Substansi Pendidikan Kewarganegaraan; Bab III. Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Moral; Bab IV. Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Warga Negara; Bab V. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Berorientasi Moral; Bab VI. Etika Kewargaan Persepektif Global; Bab VII, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Multikulturalisme Berorientasi Nilai-Moral Pancasila; Bab VIII, Pendidikan Multikultural Berbasis Kebangsaan; Bab IX, Penguatan Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Penumbuhan Budaya Politik Partisipan.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-6942-27-7



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Perspektif Moral Dan Karakter

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perspektif Moral dan Karakter

Arief Wahyudi, S.H, M.H.
Dr. Deny Setiawan, M.Si.
Jamaludin, S.Pd., M.Pd.



PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2020

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perspektif Moral Dan Karakter

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:

Arief Wahyudi, S.H, M.H.

Dr. Deny Setiawan, M.Si.

Jamaludin, S.Pd., M. Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim Kreasi CV. AA. RIZKY

Cetakan Pertama, Desember 2020

Penerbit:

CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183

Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com

E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-6942-27-7

x + 186 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2020 CV. AA. RIZKY

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan (Perspektif Moral dan Karakter) dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Keberadaan buku ajar memiliki peran yang strategis dalam proses pembelajaran. Melalui bahan ajar, mahasiswa dapat secara mandiri mampu belajar, berefleksi, berinteraksi, dan bahkan menilai sendiri proses dan hasil belajarnya. Guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif tersebut, maka buku ajar ini diadakan sebagai pegangan dan salah satu sumber belajar bagi mahasiswa, baik untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Kewarganegaraan maupun untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi, khususnya pada Jurusan atau Program Studi PPKn.

Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan (Perspektif Moral dan Karakter) merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mencakup beberapa kajian: Bab I. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan; Bab II. Dimensi dan Substansi Pendidikan Kewarganegaraan; Bab III. Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Moral; Bab IV. Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Warga Negara; Bab V. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Berorientasi Moral; Bab VI. Etika Kewargaan Persepektif Global; Bab VII, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Multikulturalisme Berorientasi Nilai-Moral Pancasila; Bab VIII, Pendidikan Multikultural Berbasis

Kebangsaan; Bab IX, Penguatan Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Penumbuhan Budaya Politik Partisipan

Segala upaya telah dilakukan oleh penulis untuk mewujudkan buku ajar ini dengan baik sebagai penuntun bagi para pembaca dan mahasiswa dalam menambah wawasan keilmuannya mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (Perspektif Moral dan Karakter). Namun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan bahan ajar ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sebagai masukan dalam melakukan perbaikan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap, semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Medan, Desember 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAB I	HAKIKAT PENDIDIKAN	
	KEWARGANEGARAAN	1
	A. Pendidikan Kewarganegaraan	1
	B. Sejarah Singkat Pendidikan Kewarganegaraan	3
	C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	6
	D. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan	8
	E. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan	9
BAB II	DIMENSI DAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	
	KEWARGANEGARAAN	13
	A. Pendahuluan	13
	B. Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan	17
	C. Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan	21
	D. Restrukturisasi Isi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Dimensi Global	29
BAB III	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	
	PERSPEKTFI MORAL	41
	A. Pendahuluan	41
	B. Kajian Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan	42

	C. Moral dalam Konteks Norma, Hukum dan Peraturan	51
BAB IV	PENTINGNYA PENDIDIKAN MORAL BAGI WARGA NEGARA	55
	A. Pendahuluan	55
	B. Pendidikan Moral bagi Generasi Penerus Bangsa	57
	C. Pendidikan Moral dalam Upaya Pengembangan Warga Negara	64
BAB V	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER BERORIENTASII MORAL	71
	A. Pendahuluan	71
	B. Pembahasan	75
	C. Penutup	103
BAB VI	ETIKA KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF GLOBAL	105
	A. Pendahuluan	105
	B. Pembahasan	107
	C. Penutup	114
BAB VII	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS MULTIKULTURALISME BERORIEN-TASI NILAI MORAL PANCASILA	119
	A. Pendahuluan	119
	B. Konsep BTI dalam Konteks Wacana Multikultralisme	121
	C. Pendidikan Multikultural Berorientasi Nilai-nilai Pancasila	124
	D. Penutup	131

BAB VIII	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS	
	KEBANGSAAN	135
	A. Pendahuluan	135
	B. Pendidikan Multikultural untuk Mutikultural	138
	C. Membangun Pendidikan Multikulturalisme	144
	D. Merumuskan Tujuan Pendidikan Multikulturalisme Berbasis Kebangsaan	150
BAB IX	PENGATAN JATI DIRI PKN MELALUI PENUMBUHAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN	155
	A. Pendahuluan	155
	B. Penumbuhan Partisipasi Warga Negara Melalui Budaya Politik Partisipan	157
	C. Membangun Pendidikan Multikulturalisme	163
	D. Penutup	174
	DAFTAR PUSTAKA	175
	TENTANG PENULIS	184

BAB I

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Civic Education* atau *Citizenship Education*, pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan warga negara untuk dapat memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban secara cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menilik hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di atas, defenisi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat diartikan sebagai program pendidikan yang mencakup ke dalam beberapa dimensi. Menurut Cholisin (2000), Pendidikan Kewarganegaraan dinyatakan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peran warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan warga negara sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Ditambahkan oleh Somantri (2001), Pendidikan Kewarganegaraan didefenisikan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya guna melatih peserta didik untuk dapat berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokrasi yang berdasar

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dua pengertian ini, menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan pada dimensi politik atau demokrasi politik. Sedangkan Sapriya (2012), lebih menempatkan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan karakter dan moral. Sebagaimana dinyatakan, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan untuk membangun karakter warga negara dengan tujuan akhir agar ia menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizens*).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan bagi warga negara, dirancang dan disiapkan khususnya bagi generasi muda agar dapat berperan secara aktif sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung-jawab. Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 4), *Citizenship Education* atau *Civics Education* didefinisikan sebagai “... *construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process*. Definisi ini, menunjukkan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warganegara. Sementara itu di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang sebagai program pendidikan dengan tujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan modern. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentuknya

didasarkan pada pembentukan semangat kebangsaan yaitu tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat itu berbeda agama, ras, etnik, atau golongannya. Ditambahkan oleh Branson (1999:4), *Civic Education* dalam konteks demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan otonom (*self goverman*). Pemerintah otonom demokratis berarti negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri untuk membangun negara kebangsaannya itu bersama seluruh warga. Oleh karena itu, pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai program pendidikan di persekolahan (Somantri, 2001:158) tidak boleh terlepas dari unsur: 1) kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional; 2) dokumen negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 dan perundangan negara serta sejarah perjuangan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan dirancang dengan memfokuskan pada pembentukan kepribadian yang meliputi aspek religius, sosio-kultural, berbahasa, berbangsa dan bernegara untuk menjadi warga negara yang cerdas (*civic knowledge*), terampil (*civic skills*), dan bertanggung jawab (*civic responsibility/dispositions*) sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Sejarah Singkat Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Soemantri (Cholisin, 2004:44-57), secara singkat sejarah perkembangan Pendidikan Kewarga-

negara sesudah kemerdekaan diawali dengan pendidikan moral di Indonesia yang berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat dan agama. Pada tahun 1957, pelajaran kewarganegaraan membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Pada tahun 1961, istilah kewarganegaraan berubah menjadi *civics* yang membahas tentang sejarah nasional, sejarah Proklamasi, UUD 1945 Pancasila, pidato-pidato kenegaraan presiden, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembelajaran *civic* dilaksanakan dengan menggunakan metode indoktrinasi. Pada tahun 1968, pemerintah menetapkan kurikulum yang baru dengan mengganti nama pelajaran Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan/PKN. Kemudian diadakan Seminar Nasional Pengajaran dan pendidikan *civic* di Tawangmangu Surakarta tahun 1972 yang menghasilkan antara lain; menetapkan istilah Ilmu Kewarganegaraan (IKN) sebagai pengganti *civic*, dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengganti istilah *civic education*.

Pada kurikulum tahun 1989, Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2, yaitu Pancasila yang mengarah pada dimensi moral, diharapkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum 1994, bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan UU No. 2 Tahun 1989, yaitu memilih mengintegrasikan antara pengajaran pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi PPKn. Kurikulum tahun 2004/kurikulum KBK juga membawa perubahan nama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarga-

negara, isinya meliputi beberapa aspek yaitu, Pancasila, persatuan dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, dan globalisasi.

Tetapi dengan adanya perubahan UU No. 2 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional nama pendidikan Pancasila tidak dieksplisitkan lagi, sehingga berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dimasukkan dalam PKn. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah pengganti PPKn dengan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan ini juga nampak diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum, dan moral (Cholisin, 2004: 57).

Perkembangan paradigma PKn di Indonesia antara paradigma lama dan paradigma baru untuk memberikan istilah PKn yang sejalan dengan tuntunan era reformasi yang sekarang dikembangkan dengan standar isi. Paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, filsafat moral/filsafat Pancasila dan memiliki visi yang kuat *nation and character building, citizen empowerment* (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan *civil society* (masyarakat kewargaan) yang memiliki arti penting dalam pembaharuan.

Pendidikan Kewarganegaraan yang sejalan dengan sistem politik demokratis. Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKn/PPKn, yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim, memiliki visi untuk memperkuat *state*

building (negara otoriter birokratis) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau obyek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Akibat dari kondisi tersebut, PKn semakin sulit untuk mengembangkan karakter warga negara yang demokratis (Cholisin, 2008:10).

Sejarah perkembangan PKn di Indonesia mengalami pergantian nama dari *Civics*, Kewargaan Negara, PMP, PMK-Kn, PPKn, PKn, dan dalam kurikulum 2013 kembali menjadi PPKn. Perubahan ini juga nampak diikuti dengan perubahan isi/konten pendidikan kewarganegaraan yang lebih memperjelas akar keilmuan (*body of knowledge*) yakni: politik, hukum dan moral. Ini berarti PKn sebagai program pendidikan dirancang berdasarkan keilmuannya yakni *Civic* yang dikembangkan dari: rumpun keilmuan politik (dengan berfokus pada demokrasi); rumpun keilmuan hukum (dengan berfokus pada *rule of law* dan penegakkannya); dan rumpun keilmuan filsafat moral (dengan berfokus pada *general values/moral/etika*).

C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara umum, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di semua negara adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Hal ini diakui oleh *National Council for the Social Studies* (1994), bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan antara lain;

1. Menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi.
2. Menjadi warga negara yang memiliki kemampuan untuk dapat menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang

selalu mengalami perubahan.

3. Mempersiapkan warga negara yang mampu menentukan pilihan yang tepat diantara berbagai macam alternatif yang terdapat dalam suatu masyarakat.
4. Mempersiapkan warga negara yang dapat berperan serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, dan dapat melaksanakan keputusan secara bertanggung jawab.

Sedangkan mengenai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia untuk tingkat persekolah antara lain telah diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

D. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Karakteristik merupakan suatu ciri khas yang menunjukkan adanya perbedaan dengan lainnya, begitu pula pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki karakteristik yang membedakan dengan mata pelajaran yang lainnya yang diajarkan disekolahan pada umumnya. Adapun karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan menurut Branson, (1999:4) materi Pendidikan Kewarganegaraan harus mencakup tiga komponen, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skill* (kecakapan kewarganegaraan) dan *Civic Disposition* (sikap kewarganegaraan).

Komponen pertama *Civic Knowledge* “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara” (Branson, 1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner.

Kedua, *Civic Skills* meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misal merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban dibidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

Ketiga, *Civic Dispositions* merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi karakter kewarganegaraan dapat

dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

Berdasarkan rumusan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan antara lain menyatakan: kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pada jenjang pendidikan menengah, terdiri atas lima kelompok mata pelajaran, yang salah satunya adalah PKn, sebagai kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitasnya dirinya sebagai manusia. Didalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimasukkan didalam kurikulum pendidikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dalam penjelasan pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

E. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk

pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila, meliputi, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideology negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideology terbuka.
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta mengevaluasi dampak globalisasi.

Berdasarkan ruang lingkup PKN di atas, dapat dipahami bahwa materi yang ada pada PKN terdiri dari materi yang bermuatan pada *basic* keilmuannya yakni Civics. Dengan muatan materi tersebut, diharapkan PKN sebagai program pendidikan dapat membekali peserta didik dengan sejumlah kompetensi (*civic competence*) yang meliputi: *civic intellectual*, *civic participation*, dan *civic responsibility*.

BAB II

DIMENSI DAN SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pendahuluan

Di era globalisasi, eksistensi pendidikan kewarganegaraan kembali mendapat perhatian penting di berbagai negara. Di Amerika Serikat, petunjuk dan standar nasional untuk pendidikan kewarganegaraan dirancang dalam rangka pembentukan warga negara yang baik (*a good citizenship*) (Center for Civic Education, 1994). Di Australia, Pemerintah Federal juga sudah melaksanakan tiga penelitian penting yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman bagi pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraannya. Begitu pun di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mendapat perhatian dari pemerintah dan dirancang sebagai bagian dalam sistem pendidikannya.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara umum baik untuk pendidikan dasar dan menengah, pada prinsipnya sama, yaitu untuk memberikan kompetensi dasar pada peserta didik dalam hal (1) berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menangani isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) pembentukan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis. Sementara di Perguruan Tinggi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan lebih diarahkan pada kompetensi utama yaitu membentuk warga negara

yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, dengan berfokus pada tiga komponen dasar pengembangan, yaitu (1) *Civic knowledge*, (2) *civic skills*, (3) *civic disposition/traits*.

Namun demikian kita menyadari bahwa masih banyak kelemahan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, paling tidak terdiri atas kelemahan pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelemahan dalam filosofis Pendidikan Kewarganegaraan;
- 2) Lebih bersifat indoktrinatif dan terlalu menonjolkan moral behavioristik
- 3) Terjadi kesenjangan antara materi pelajaran dengan *basic* keilmuan dari kewarganegaraan.
- 4) Terlalu banyak diintervensi oleh kepentingan politik yang berkuasa.
- 5) Penekanannya pada pembentukan warga negara yang "loyalitas".
- 6) Kurang mengembangkan kehidupan demokrasi yang partisipatif.

Sejalan dengan penilaian di atas, Wahab (1999) mengemukakan beberapa kelemahan yang ada pada Pendidikan Kewarganegaraan di masa yang lalu, antara lain:

- 1) Terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka. Jadi, menempatkan siswa sebagai obyek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu.
- 2) Kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya.
- 3) Pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif.

4) Berorientasi kepada kepentingan rezim yang berkuasa.

Sementara Somantri (2001), dalam kajiannya berkesimpulan bahwa:

- a. Mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, termasuk juga PKn terlalu dikuasai oleh hafalan dan pemahaman mengenai fakta-fakta;
- b. Keterkaitan antara buku pelajaran dengan masalah-masalah sosial dalam masyarakat sangat rendah;
- c. Bahan pelajaran sangat membosankan dan tidak menarik, karena proses mengajar dan belajar selalu ada dalam kedudukan "*passive learning*";
- d. Bahan pelajaran kurang membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri ke Perguruan Tinggi, sementara peserta didik yang putus sekolah/tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi (80%) hampir tidak bisa menarik manfaatnya untuk tugas pekerjaan maupun hidup sebagai warga negara yang baik.

Menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada, diusulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan baru, sebagai tujuan utamanya, hendaknya dapat mengembangkan kompetensi warga negara (*civic competence*), akhlak warga negara yang diinginkan (*desirable personal qualities* atau *civic virtue*) dan budaya warga negara (*civic culture*), serta nilai dan kepercayaan terhadap demokrasi (*democratic values and beliefs*) menuju terbentuknya kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Winataputra, 2002).

Dengan demikian, lebih lanjut upaya pengembangan pendidikan kewarganegaraan di masa yang akan datang hendaknya:

- a. Memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kurikulumnya, yang mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. Seimbang antara pengembangan nilai moral dengan pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya;
- c. Menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa dogmatis-indoktrinatif, melainkan menumbuhkembangkan budaya berfikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif;
- d. Terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budayanya. (Winataputra, 2002)

Ini berarti pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di masa depan, membutuhkan sebuah paradigma baru sebagai tuntutan globalisasi dan proses reformasi ke arah "*New Indonesian Civic Education*". Reformasi untuk membangun paradigma baru ini, dimulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran.

Restrukturisasi isi kurikulum tidak lagi dilakukan secara formalitas tambal sulam, tetapi yang terpenting bagaimana membangun "*higher levels of knowledge*" sehingga memberi kesempatan pada peserta didik agar mampu mengambil informasi dari masyarakat dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat baik dalam dimensi lokal, nasional, maupun global.

B. Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 1980 mulai diwarnai oleh pentingnya nilai-nilai demokrasi, yang kemudian masyarakat di berbagai negara di belahan dunia mulai memahami dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menuntut sebuah metoda pembelajaran yang mampu mengarahkan dan mendidik warga negara agar dapat berperan aktif dalam kehidupan demokrasi dan jalannya pemerintahan. Sejak tahun 1990, berkembang tren atau kecenderungan teori dan praktek demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

John J. Patrick (Quiqley, 2000:4-7) menuliskan kecenderungan perkembangan PKn secara global, menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keterkaitan antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat (*civic skill*) dan berkembangnya nilai-nilai kebajikan dalam masyarakat (*civic virtue*). Pengetahuan kewarganegaraan menyangkut prinsip-prinsip teori demokrasi, jalannya pemerintahan yang demokratis dan perilaku demokratis masyarakat serta perbandingan nilai demokrasi antar negara. Pemahaman ini kemudian akan mengarahkan warga negara (siswa) untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan warga negara tersebut kemudian didukung oleh nilai kebajikan dalam masyarakat seperti saling menghargai, kepribadian, disiplin diri, toleransi, patriotisme dan tanggung jawab.
- 2) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pola pembelajaran yang sistematis mengenai konsep-

konsep utama. Konsep utama pola pembelajaran PKn menyangkut pemerintahan demokratis dan hak-kewajiban warga negara. Dalam pengajaran digunakan kriteria untuk mengorganisasi dan menerjemahkan informasi tentang bentuk dan tugas lembaga politik.

- 3) Pola pembelajaran yang mengaplikasikan konsep utama PKn untuk menganalisis berbagai kasus yang berkembang dalam kehidupan bernegara.
- 4) Pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa untuk membuat keputusan. Studi kasus dan legal isu dapat dijadikan guru untuk mendorong siswa agar mampu membuat keputusan.
- 5) Analisis perbandingan internasional tentang pemerintah dan kewarganegaraan. Kebangkitan demokrasi di dunia mendorong dunia pendidikan untuk mengembangkan pola pembelajaran PKn. Siswa dapat didorong untuk mempelajari dan kemudian membandingkan demokrasi antar negara.
- 6) Pengembangan keterampilan partisipatoris dan kebajikan warga negara melalui kegiatan-kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif dalam kelompok kecil dapat mengarahkan siswa untuk memahami dan melaksanakan keterampilan memimpin, resolusi konflik, kompromi, negosiasi, kritik membangun, toleransi, civilisasi dan kepercayaan.
- 7) Penggunaan buku sumber di dalam mengajarkan kebajikan warga negara (*civic virtues*).
- 8) Mempelajari secara aktif pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara.
- 9) Menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar-mengajar pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara.

Dari kesembilan kecenderungan di atas diharapkan bahwa dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan pembelajaran di kelas, guru dapat memahami kebajikan-kebajikan warga negara, dan keterampilan-keterampilan intelektual dan partisipasi, tidak terpisahkan sebagai sosok pengetahuan warga negara (*a body of civic knowledge*). Hal ini harus diasumsikan bahwa jika siswa diharapkan dapat berpikir secara kritis dan bertindak secara efektif, serta pandai dalam menjawab berbagai isu-isu sosial kemasyarakatan (*virtuously response to a public issue*), maka mereka harus memahami permasalahan-permasalahan, sumber isu dan alternatif jawaban terhadap isu, serta kemungkinan akibat dari jawaban-jawaban terhadap permasalahan/isu tersebut. Semua ini harus didasari oleh pengetahuan siswa. Penggunaan pengetahuan tersebut adalah untuk menjelaskan, menilai dan memecahkan isu-isu sosial dan kemasyarakatan yang pada dasarnya amat bergantung pada keterampilan proses kognitif siswa.

Perkembangan di atas merupakan kecenderungan yang terjadi dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping kecenderungan global, Pendidikan Kewarganegaraan untuk demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan juga dipengaruhi perkembangan global lainnya. Menurut Wahab (1999) perkembangan tersebut diantaranya gagalnya penerapan konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang lalu, sebagai akibat dari penekanan pada kebenaran yang bersifat *monovision* dan sama sekali mengabaikan kemungkinan *multivision* atau jika itu dilakukan hanya bersifat semu. *Multivision* ini akan memungkinkan lahirnya perbedaan, pilihan alternatif dalam berbagai aspek kehidupan warga negara, tumbuhnya rasa kebebasan dan persamaan dalam

konteks hukum yang berkeadilan dan penghargaan terhadap hak-hak sipil warga negara.

Pengaruh kecenderungan global lainnya yang bersifat umum meliputi: *“The global economy”*, *“Technology and Communications”* dan *“Population and environment”*. Kecenderungan-kecenderungan global itu secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pula konsep dan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan seperti yang dikemukakan oleh Cogan (1998: 11) bahwa: *“...that current modes of educating for citizenship will not be sufficient as we enter a new century. They require that citizens be able to focus upon many diverse elements, issues and contexts simultaneously ...the central recommendation ... that future educational policy must be based upon a conception of what we describe as multidimensional citizenship appropriate to the needs and demands of the early part of the 21st century.*

Konseptualisasi warga negara multidimensional tersebut, mencakup empat dimensi, yaitu: personal, sosial, temporal dan spatial, yang secara keseluruhan akan melengkapi konsep dan paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan. Uraian ini, sekaligus menggambarkan bahwa di dalam Pendidikan Kewarganegaraan, persoalan kehidupan warga negara dalam sistem nilai demokrasi telah mengalami *globalizing* (Patrick, 1999). Hal ini berarti di dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan saat ini kajian isi/materi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, tidak hanya berorientasi dalam perspektif lokal dan nasional, namun harus menyesuaikan dengan perkembangan global yang tengah mengalir membawa nilai-nilai baru, seperti demokrasi dan *civil society*.

C. Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan

Upaya pemberdayaan warga negara adalah upaya pembangunan sumber daya manusia, sehingga cara yang strategis adalah melalui proses pendidikan. Untuk itulah, paradigma pendidikan yang seharusnya dianut pada era reformasi adalah “pendidikan untuk pemberdayaan.” Dalam sistem pendidikan nasional, tanpa mengesampingkan mata pelajaran yang lain, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja harus lebih mampu berfungsi secara efektif dalam pemberdayaan warga negara, sebab objek material mata pelajaran ini terutama adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dari sinilah perlu dirumuskan visi, misi, dan peran Pendidikan Kewarganegaraan baru. Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma lama jelas tidak dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan warga negara, bahkan sebaliknya justru dapat menjadikan warga negara semakin tidak berdaya.

Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Print et.al (1999: 25) mengemukakan, *civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*. Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh guru, siswa, dan masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu, harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih

bersifat *bottom up*. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara, yang hal ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Akan tetapi pengertian “warga negara yang baik” itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa “*revolusioner*”, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasilais, manusia pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Agar siswa memiliki kompetensi seperti itu diperlukan seperangkat pengetahuan dan keterampilan, serta watak yang mendukung pengembangan kemampuan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, Suryadi dan Somardi (2000: 5) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, yaitu (1) *civic knowledge*, (2) *civic skills*, dan (3) *civic disposition*. Inilah pengertian “warga negara yang baik” yang diharapkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan memperhatikan tiga komponen/dimensi di atas yang berorientasi pada sistem kehidupan global maka materi Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan

disposisi kepribadian warga negara, tidak saja fungsional dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam era kehidupan global.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara. Setiap orang perlu memiliki kesempatan untuk mempelajari pemerintahan dan masyarakat madani. Pembekalan materi tersebut akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang hakekat kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berpemerintahan, dan mengapa politik dan pemerintahan itu diperlukan; tujuan pemerintahan; ciri-ciri penting pemerintahan (terbatas dan tidak terbatas); hakekat dan tujuan konstitusi; dan cara-cara alternatif mengorganisasikan pemerintahan.

Pembelajaran materi ini hendaknya meningkatkan pemahaman yang lebih banyak tentang hakekat dan pentingnya masyarakat madani atau jaringan kompleks asosiasi-asosiasi politik, sosial, dan ekonomi yang dibentuk secara bebas dan sukarela. Masyarakat madani bukan hanya mencegah penyelewengan atau pemusatan kekuasaan yang berlebihan oleh pemerintah; organisasi-organisasi masyarakat madani berfungsi sebagai laboratorium publik tempat warga negara belajar demokrasi dengan cara mempraktekannya secara langsung (Suryadi dan Somardi, 2000).

Sementara keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat

dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan/mendesripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik.

Keterampilan partisipasi dalam demokrasi telah digambarkan oleh Aristoteles dalam bukunya *Politics* (Branson, dkk., 1999:4) yang menyatakan: "Jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian pendapat orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan." Dengan kata lain cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya. Pengembangan keterampilan kewarganegaraan dalam praktek pembelajaran kewarganegaraan, bisa mengacu pada rincian seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keterampilan Kewarganegaraan

Keterampilan Intelektual	Keterampilan Partisipasi
Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi keterampilan:	Berinteraksi (termasuk berkamu-nikasi tentunya) terhadap obyek yang berkaitan

<p>Membedakan; Mengelompokkan/mengklasifikasi-fikasikan; Menentukan bahwa sesuatu itu asli.</p> <p>Menggambarkan (memberikan uraian/ilustrasi), misalnya tentang: Proses; Lembaga; Fungsi; Alat; Tujuan; Kualitas.</p> <p>Menjelaskan (mengklasifikasi/menafsirkan), misalnya tentang: Sebab-sebab terjadinya sesuatu peristiwa; Makna dan pentingnya peristiwa atau ide; Alasan bertindak.</p> <p>Menganalisis, misalnya tentang kemampuan menguraikan: Unsur-unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-institusi; Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi;</p>	<p>dengan masalah-masalah publik, yang termasuk dalam keterampilan ini, antara lain: Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun; Menjelaskan artikulasi kepentingan; Membangun koalisi, negoisasi, kompromi; Mengelola konflik secara damai; Mencari konsensus.</p> <p>Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik, yang termasuk keterampilan ini, antara lain: Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik; Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan, pejabat</p>
--	--

<p>Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat, mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dan mana yang merupakan tanggung jawab publik.</p> <p>Mengevaluasi pendapat/posisi: menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan tentang: Kekuatan dan kelemahan isu/ pendapat; Menciptakan pendapat baru.</p> <p>Mengambil pendapat/posisi: Dari hasil seleksi berbagai posisi; Membuat pilihan baru.</p> <p>Mempertahankan pendapat/ posisi: Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan/diambil/dibela; Merespons posisi yang tidak disepakati.</p>	<p>pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti: pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/ BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.</p> <p>Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk keterampilan ini, antara lain: Melakukan simulasi tentang kegiatan: kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR/DPRD, pertemuan wali kota, lobby, peradilan; Memberikan suara dalam suatu pemilihan; Membuat petisi; Melakukan pembicaraan/ memberi kesaksian di hadapan lembaga publik;</p>
--	--

	<p>Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain; Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.</p>
--	--

Sumber: Diolah dari Center for Civic Education. (1994).

Sedangkan komponen yang ketiga adalah *civic dispositions*. Disposisi kepribadian warga negara yang mendukung efektivitas politik individu, keberfungsian sistem politik yang sehat, martabat dan harga diri, dan kepentingan umum, diidentifikasi oleh *National Standard for Civics and Government* (CCE, 1994), sebagai berikut:

1. Menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Disposisi ini meliputi kepatuhan secara suka rela terhadap standar perilaku yang dibebankan sendiri daripada memerlukan pembebanan dari kontrol luar, penerimaan tanggung jawab terhadap akibat-akibat dari perbuatan sendiri dan pemenuhan kewajiban moral dan hukum dari keanggotaan dalam masyarakat demokratis;
2. Memikul tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mengurus diri sendiri, menopang keluarga, merawat, mengurus, dan mendidik anak sendiri. Termasuk juga ke dalam disposisi ini adalah berwawasan tentang persoalan-persoalan publik, memberikan suara, membayar pajak, memberi pelayanan publik, dan memangku

- jabatan kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri;
3. Hormat terhadap harga diri dan martabat kemanusiaan. Menghormati orang lain berarti mendengarkan pandangan-pandangannya, berperilaku menurut cara yang santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan dengannya;
 4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kemasyarakatan menurut cara yang penuh pemikiran dan efektif. Disposisi ini menghendaki wawasan yang luas sebelum memberikan suara atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam wacana yang santun dan reflektif, dan memangku kepemimpinan jika sesuai. Disposisi ini pun menghendaki penilaian apakah dan kapankah kewajiban seseorang sebagai warga negara menghendaki bahwa keinginan dan kepentingan pribadi dikesampingkan demi kepentingan umum dan penilaian apakah dan kapankah kewajiban-kewajiban seseorang atau prinsip-prinsip konstitusi mewajibkan seseorang untuk menolak harapan-harapan kewarganegaraan tertentu;
 5. Meningkatkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat. Disposisi ini meliputi wawasan dan perhatian terhadap urusan-urusan publik, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau kepatuhan para pemimpin politik dan lembaga publik terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi tersebut dan mengambil tindakan yang tepat jika mereka tidak mematuminya. Disposisi ini pun memberi

kecenderungan warga negara untuk bekerja melalui cara-cara damai dan berdasar hukum untuk mengubah peraturan hukum yang dianggap tidak bijak atau tidak adil.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa *civic dispositions* merupakan komponen penting yang berkaitan dengan nilai-nilai (*values*) yang berkontribusi dalam pembentukan karakter warga negara. Ketiga komponen tersebut, lebih lanjut perlu dikembangkan, diklasifikasi guna menghasilkan *a body of civic knowledge*, yang dapat memenuhi harapan demokrasi dan *civil society*.

D. Restrukturisasi Isi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Dimensi Global

Restrukturisasi isi/materi merupakan bagian penting dalam suatu pembaharuan kurikulum. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, dengan paradigma baru dimensi global, maka restrukturisasi isi kurikulum harus mendasarkan pada standar kelayakan materi yang bersifat universal, yang *core*, yang intinya relevan, dalam membangun demokrasi dan *civil society*, untuk pemberdayaan warga negara.

Warna demokrasi menjadi dipandang penting dalam restrukturisasi isi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di era global, guna mewujudkan *civil society*. Untuk itu Patrick (1999:34), dalam rangka restrukturisasi isi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, menawarkan Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis yang di dalamnya meliputi empat komponen, yaitu:

- 1) Pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi;

- 2) Kecakapan kognitif dari kewarganegaraan demokrasi;
- 3) Kecakapan partisipasi dari kewarganegaraan demokratis, dan
- 4) Keutamaan karakter kewarganegaraan yang demokratis.

Uraian lengkap mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis dapat dilihat pada substansi kajian kewarganegaraan demokratis, seperti di bawah ini:

1.	<p><i>KNOWLEDGE OF CITIZENSHIP AND GOVERNMENT IN DEMOCRACY</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Concepts and principles on the substance of democracy</i> <i>b. Perennial issues about the meaning and uses of core ideas</i> <i>c. Continuing issues and landmark decisions about public policy and constitutional interpretation</i> <i>d. Constitutions and institutions of representative democratic government</i> <i>e. Practices of democratic citizenship and the roles of citizens</i> <i>f. History of democracy in particular states and the throughout the world</i>
2.	<p><i>COGNITIVE SKILLS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Identifying and describing information about political and civic life</i> <i>b. Analyzing and explaining information about political and civic life</i> <i>c. Synthesizing and explaining information about political and civic life</i> <i>d. Evaluating, taking, and defending positions on public events and issues</i> <i>e. Thinking critically about conditions of political and civic life</i>

	<i>f. Thinking constructively about how to improve political and civic life</i>
3.	<p><i>PARTICIPATORY SKILLS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP</i></p> <p><i>a. Interacting with other citizens to promote personal and common interests</i></p> <p><i>b. Monitoring public events and issues</i></p> <p><i>c. Deliberating and making decisions on public issues</i></p> <p><i>d. Implementing policy decision on public issues</i></p> <p><i>e. Taking action to improve political and civic life</i></p>
4.	<p><i>VIRTUES AND DISPOSITIONS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP</i></p> <p><i>a. Affirming the common and equal humanity and dignity of each person</i></p> <p><i>b. Respecting, protecting, and exercising rights possessed equally by each person</i></p> <p><i>c. Participating responsibility in the political and civic life of the community</i></p> <p><i>d. Practicing self-government and supporting government by consent of the governed</i></p> <p><i>e. Exemplifying the moral traits of democratic citizenship</i></p> <p><i>f. Promoting the common good</i></p>

Sumber: Patrick, 1999.

Berdasarkan pandangan di atas, banyak sudah beberapa negara dalam melakukan restrukturisasi isi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, menjabarkan komponen *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic values*, guna membentuk karakter warga negara ideal berwatak demokratis. Di Inggris misalnya, substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum

Pendidikan Kewarganegaraan dimasukkan unsur-unsur; pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap terhadap isu-isu global. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat mengembangkan pemikiran kritis tentang masalah-masalah global yang kompleks dalam pembelajaran di kelas.

Uraian lengkap mengenai substansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris, dapat disajikan seperti di bawah ini:

Key Concepts	Values and Dispositions	Skills and Aptitudes	Knowledge and Understanding
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Democracy and autocracy</i> • <i>Co-operation and conflict</i> • <i>Equality and diversity</i> • <i>Fairness, justice, the rule of law, rules, law and human rights</i> • <i>Freedom and community</i> • <i>Individual and community</i> • <i>Power and authority</i> • <i>Rights and responsibilities</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Concern for the common good</i> • <i>Belief inhuman dignity and equality</i> • <i>Concern to resolve conflicts</i> • <i>A disposition to work with and for others with sympathetic understanding</i> • <i>Proclivity to act responsibly; that is care for others and oneself; premediation and calculation about the effect actions are likely to have on</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ability to make a reasoned argument both verbally and writing</i> • <i>Ability to cooperate and work effectively with others.</i> • <i>Ability to consider and appreciate the experience of others</i> • <i>Ability to tolerance other view points</i> • <i>Ability to develop a problem-solving approach</i> • <i>Ability to use modern media and technology</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Topical and contemporary issues and events at local, national, EU, Commonwealth and international levels</i> • <i>The nature of democratic communities, including how they function and change</i> • <i>The interdependence of individuals and local and voluntary communities</i> • <i>The nature of diversity, dissent and social conflict</i> • <i>Legal and moral rights and responsibilities</i>

	<p><i>others; and acceptance of responsibility for unforeseen or unfortunate consequences</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Practice of tolerance</i> • <i>Judging and acting by a moral code</i> • <i>Courage to defend a point of view</i> • <i>Willingness to be open to changing one's opinions and attitudes in the light of discussion and evidence</i> • <i>Individual initiative and effort</i> • <i>Civility and respect for the rule of law</i> • <i>Determination to act justly</i> • <i>Commitment to equal opportunities and gender equality</i> • <i>Commitment to active citizenship</i> • <i>Commitment to voluntary service</i> 	<p><i>critically to gather information</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>A critical approach to evidence put before one and ability to look for fresh evidence</i> • <i>Ability to recognize forms of manipulation and persuasion</i> • <i>Ability to identify, respond to and influence social, moral and political challenge and situations</i> 	<p><i>of individuals and communities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The nature of social, moral and political challenges faced by individuals and communities</i> • <i>Britain's parliamentary political and legal systems at local, national, European, Commonwealth and international level, including how they function and change</i> • <i>The nature and responsibilities of citizens as consumers, employees, employers and family and community members</i> • <i>The economic system as it relates to individuals and communities</i> • <i>Human rights charters and issues</i> • <i>Sustainable development and</i>
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Concern for human rights</i> • <i>Concern for the environment</i> 		<i>environmental issues</i>
--	---	--	-----------------------------

Sumber: Qualifications and Curriculum Authority (1998: 44)

Sementara di Amerika Serikat, sebagai negara terdepan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

K-4	K5-K8	K9-K12
<i>What is government and what should it do?</i>	<i>What are civic life, politics, and government</i>	<i>What are civic life, politics, and government</i>
<i>What are the basic values and principles of American democracy?</i>	<i>What are the basic values and principles of American political system?</i>	<i>What are the basic values and principles of American political system?</i>
<i>How does the government established by the constitutional embody the purposes, values, and principles of American democracy?</i>	<i>How does the government established by the constitutional embody the purposes, values, and principles of American democracy?</i>	<i>How does the government established by the constitutional embody the purposes, values, and principles of American democracy?</i>
<i>What is the relationship of the United States to other nations</i>	<i>What is the relationship of the United States to other nations</i>	<i>What is the relationship of the United States to other nations</i>

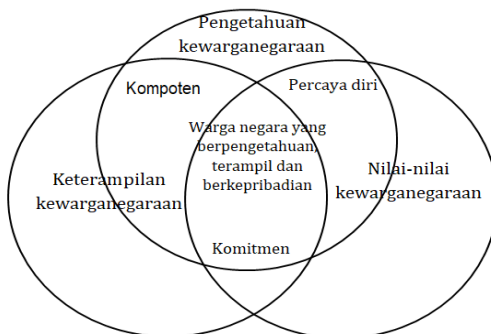
<i>and to world affairs?</i>	<i>and to world affairs?</i>	<i>and to world affairs?</i>
<i>What are the roles of the citizen in American democracy?</i>	<i>What are the roles of the citizen in American democracy?</i>	<i>What are the roles of the citizen in American democracy?</i>

Sumber: Center for Civic Education, 1994: 141-145

Dari uraian standar isi di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat memasukan unsur-unsur global dalam kajiannya ke dalam tiga dimensi, yaitu: *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic values/dispositions*.

Sekarang, bagaimana dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia? Hampir sama dengan di Inggris dan Amerika Serikat, Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis di Indonesia, juga mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Diagram Struktur Keilmuan Mata Pelajaran Kewarganegaraan



Sumber: Depdiknas, 2003

Secara garis besar mata pelajaran kewarganegaraan terdiri dari:

- a) Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik.
- b) Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.
- c) Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas (Depdiknas, 2003).

Mata pelajaran kewarganegaraan merupakan bidang kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu tata negara, hukum, sejarah, ekonomi, moral dan filsafat. Dengan

memperhatikan visi dan misi mata pelajaran kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi pengetahuan, karakteristik mata pelajaran kewarganegaraan ditandai dengan pemberian penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan *civics*. Jadi, pertama-tama seorang warga negara perlu memahami dan menguasai dan pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip politik, hukum, dan moral *civics*. Setelah menguasai pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap atau karakter sebagai warga negara yang baik, dan memiliki keterampilan kewarganegaraan dalam bentuk keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta keterampilan menentukan posisi diri, serta kecakapan hidup (*life skills*).

Dari tiga dimensi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam substansi kajian dan uraian materi kajian Pendidikan Kewarganegaraan, seperti di bawah ini:

Topik Substansi Kajian	Uraian Materi Kajian
Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Hidup rukun dalam perbedaan; Cinta lingkungan; Kebangsaan sebagai bangsa Indonesia; Sumpah Pemuda; Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Partisipasi dalam pembelaan negara; Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keterbukaan dan jaminan keadilan.
Norma, Hukum, dan Peraturan	Tertib dalam kehidupan keluarga; Tertib di sekolah; Norma yang

	berlaku di masyarakat; Peraturan-peraturan daerah; Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Sistem hukum dan peradilan nasional; Hukum dan peradilan internasional.
Hak Asasi Manusia	Hak dan kewajiban anak; Hak dan kewajiban anggota masyarakat; Instrumen nasional dan internasional HAM; Pemajuan, dan penghormatan HAM.
Kebutuhan Warga Negara	Hidup gotong royong; Harga diri sebagai warga masyarakat; Kebebasan berorganisasi; Kemerdekaan mengeluarkan pendapat; Menghargai keputusan bersama; Prestasi diri; Persamaan kedudukan warga negara.
Konstitusi Negara	Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi pertama; Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia; Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
Kekuasaan dan Politik	Pemerintahan desa dan kecamatan; Pemerintahan daerah dan otonomi; Pemerintahan pusat; Demokrasi dan sistem politik; Budaya politik; Budaya demokrasi menuju masyarakat madani; Sistem pemeritahan; Pers dalam masyarakat demokrasi.
Pancasila	Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; Proses

	perumusan Pancasila sebagai dasar negara; Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Globalisasi	Globalisasi di lingkungannya; Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi; Dampak globalisasi; Hubungan internasional dan internasional; dan Mengevaluasi globalisasi.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan uraian di atas diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasarnya adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman mengenai berubah-ubahnya isi materi pelajaran ini, seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari sekian banyak mata pelajaran, tidak ada mata pelajaran yang perubahan materinya “sedinamis” mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru dalam restrukturisasi isi kurikulum harus mendasarkan pada standar kelayakan materi yang bersifat universal,

yang *core* atau intinya relevan dan tidak bertentangan dengan sistem demokrasi.

Artinya bahwa restrukturisasi isi kurikulum PKn di Indonesia dalam dimensi global telah meliputi komponen: *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic values/dispositions*, bagaimanapun jangan terlepas dari “akar” nya; membentuk warga negara Indonesia yang demokratis, cerdas, dan “*religius*”. Hal ini sejalan dengan muatan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi yang seyogyanya menjadi isi dari PKn pada dasarnya diangkat dari pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia (Sanusi, 1998) yang antara lain meliputi: demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan kecerdasan warga negara, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan “*rule of law*”, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi dengan keadilan sosial.

BAB III

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PERSPEKTFI MORAL

A. Pendahuluan

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, manusia yang hadir menjadi warganegara merupakan ikatan komitmen atas kaidah aturan baku yang disepakati bersama. Aturan-aturan dengan prinsip mengikat dan memaksa semata-mata dijadikan alat untuk mengendalikan semua unsur yang terdapat didalam tatanan kehidupan manusia, agar dapat terwujud ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan emosional dan sosial dalam wujud relasi, interaksi dan komunikasi adalah keniscayaan. Oleh karenanya, mengedepankan kenyamanan, ketertiban dan stabilitas menjadi suatu keharusan dan harus bisa diselenggarakan selama kehidupan tersebut berlangsung.

Manusia sebagai warganegara menjadi bagian utama dengan segala potensi yang dimilikinya, disamping harus berhubungan dengan relasi antar sesama, ia juga dituntut untuk mampu menjaga dan melestarikan tempat yang menjadi media relasi sebagai wahana berinteraksi dan komunikasi, karena teritorial adalah salah satu unsur yang kuat sebagai pembuktian keberadaan manusia hadir di dalam alam semesta ini. Oleh karena itu, untuk terwujudnya kehidupan bersama yang nyaman dan tertib dalam suatu teritorial melalui relasi antar sesame, sikap, perilaku dan tindakan manusia harus memper-timbangkan dan mengedepankan prinsip-prinsip moral.

B. Kajian Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Kata moral secara etimologis, dimaknai dalam bahasa Latin *mos/mores* yang berarti tata-cara atau adat-istiadat. Penerjemahan kamus besar bahasa Indonesia moral disebut sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Oleh karenanya, moral menjadi kata yang sering disamakan dengan etika. Etika dalam bahasa Yunani disebut *ethos* artinya kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap atau cara berfikir. Dalam bahasa Arab, moral kerap disematkan pada telaah ahlak yang dalam bahasa arab sendiri ahlak adalah perangai, watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya.

Beberapa ahli dalam kajian moral dalam padangan etika menurut Bertens, (1993) mengartikan moral sebagai; 1) sistem nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu kelompok atau kumpulan manusia di dalam kehidupan; 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau kepribadian yang menjadikan identitas atau karakteristik; 3) Ilmu tentang pengetahuan atas apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

Moral dalam pendekatan telaah etika sebagai kajian ilmu, dijabarkan oleh Bertens (1993) dan Suseno (1987), yang membagi moral menjadi beberapa bagian yakni:

1. Etika deskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku moral dalam arti luas, sebatas menggambarkan atau memperkenalkan dan sama sekali tidak memberikan penilaian moral.

2. Etika normatif yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam perbuatan nyata dalam memberikan penilaian tingkah laku moral berdasarkan norma-norma tertentu kemudian menjadi sebuah nilai konsensus atau yang disepakati
3. Meta-etika yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa-bahasa moral baik secara nalar moral dalam bahasa-bahasa yang memuat moralitas
4. Moral dalam telaah perspektif objektivistik yaitu bagaimana baik dan buruk itu bersifat pasti atau tidak berubah. Suatu perilaku yang dianggap baik akan tetap baik, bukan kadang baik atau kadang tidak baik. Baik dan buruk bersifat mutlak, sepenuhnya, dan tanpa syarat; pandangan universal prinsip-prinsip moral.
5. Moral dalam perspektif relativistik yaitu bagaimana memandang baik dan buruk suatu perilaku bersifat relatif, “tergantung” kepada konteks, kultural, situasi, atau masing-masing individu terbatas kepada dimensi ruang dan waktu.

Dimensi moral selalu terkait dengan nilai (*value*) yang dimaknai sebagai sesuatu yang berharga atau penghargaan. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi yang menjwai tindakan manusia. Nilai merupakan preferensi yang tercermin dari perilaku seseorang, sehingga seseorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu akan tergantung pada sistem nilai yang dipegangnya (Hall, et.al., 1982). Dengan demikian, konsep nilai terkait erat dengan konsep moral. Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan dan kebajikan sebagai sesuatu yang berharga dan dijunjung

tinggi. Nilai memang merupakan konsep yang abstrak, namun menurut Raths, et.al. (1966) konsep nilai bisa dipelajari dengan memahami indikator-indikatornya, seperti antara lain:

1. Nilai memberi tujuan atau arah (*goals or purpose*) kepada seseorang dalam menentukan tujuan dan arah kehidupannya.
2. Nilai memberi aspirasi (*aspirations*) kepada seseorang untuk hal yang berguna dan positif bagi kehidupannya.
3. Nilai mengarahkan seseorang untuk bersikap (*attitudes*) sesuai dengan moralitas masyarakat atau menjadi pedoman bagi seseorang dalam bertingkah-laku.
4. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (*beliefs and convictions*) dari seseorang terhadap nilai-nilai tertentu yang diyakininya sebagai sesuatu yg paling berharga.
5. Nilai menuntut adanya aktivitas (*activities*) perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut.

Sedangkan kaitan moral dengan norma menjadi sebuah telaah yang lainnya, namun masih tetap saling terkait. Norma adalah aturan, ukuran, patokan, atau kaidah bagi pertimbangan dan penilaian atas perilaku manusia. Norma dijadikan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu yang disertai sanksi. Dengan demikian, norma menjadi petunjuk sikap dan perilaku moral manusia dalam kehidupan sehari-hari baik berdasarkan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Suseno (1987) membedakan norma menjadi dua, yakni:

norma umum yang terdiri dari norma moral dan norma hukum; serta norma khusus yakni norma sopan santun yang hanya berlaku pada wilayah dan waktu tertentu. Norma sopan santun terbentuk oleh kebiasaan masyarakat di daerah tertentu yang pada umumnya tidak tertulis atau menjadi kebiasaan lisan. Norma ini jika dilanggar akan mendapat celaan dari masyarakat, dan jika ditaati akan mendapat pujian dari masyarakat. Sama halnya dengan norma moral, norma sopan santun ini walaupun bersumber pada nilai-nilai universal tidak mempunyai sanksi yang pasti dan tegas. Berbeda dengan norma hukum sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah yang diundangkan secara resmi, norma ini mempunyai rumusan yang jelas dengan sanksi yang pasti dan tegas.

Kajian tentang moral memang banyak menyangkut berbagai aspek kehidupan. Moral berkaitan dengan nilai sebagai sesuatu yang berharga, ketika moral ditempatkan dalam menentukan mana nilai-nilai yang diyakini paling berharga bagi dirinya. Moral juga terkait dengan norma sebagai kaidah atau aturan, ketika moral ditempatkan sebagai prinsip perbuatan baik-buruk, benar-salah. Oleh karena itu, moral harus dibelajarkan sehingga seseorang dapat memiliki pemikiran moral, perasaan moral dan perilaku moral yang berguna bagi dirinya dalam menjalani kehidupannya. Menurut James Rest (2004) komponen moralitas meliputi: pemikiran moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Pemikiran moral atau penalaran moral adalah keidealan berfikir yang mengarah pada suatu proses pertimbangan moral sebelum suatu tindakan moral dilakukan oleh seseorang. Menurut Kohlberg (1995), dalam penalaran moral suatu prinsip moral tidak sekadar merupakan aturan bagi

suatu tindakan, melainkan sekaligus merupakan alasan orang bertindak. Penalaran moral tidak sekadar melibatkan aktivitas intelektualitas (rasionalitas), tetapi juga hati nurani sebagai upaya pertimbangan moral.

Perasaan moral dimaknai sebagai suatu perasaan yang berorientasi kepada sentimen harga diri yaitu dimana suatu sistem emosi dan kecenderungan perasaan dan impuls yang berpusat di sekitar objek, yaitu ide tentang diri sendirinya. Perasaan moral dianggap sebagai emotivisme, karena terkait dengan masalah penilaian moral yang tidak dapat disebut salah dan benar. Menurut David Hume (Suseno, 1987) penilaian moral tidak didasarkan kepada rasio atau pertimbangan objektif, melainkan berdasarkan perasaan. Etika adalah perasaan moral. Unsur bersama sifat dari perasaan atau penilaian adalah kegunaan (*utilitarisme*). Perasaan kita tertarik karena ada kegunaan yang diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

Perilaku moral diartikan sebagai suatu pola perilaku di dalam kerangka konteks tertentu, dengan memperhatikan proses-proses batin yang melahirkan perilaku moral tersebut. Pentingnya proses batin dilihat sebagai aspek penyebab manifestasi perilaku moral. Menurutnya, komponen proses pokok yang mempengaruhi lahirnya perilaku moral, antara lain: bagaimana fungsi utama untuk menafsirkan situasi, menarik inferensi tentang bagaimana orang akan terpengaruh, dan merasakan empatik; kemudian bagaimana fungsi utama untuk merumuskan kehendak atau tindakan moral; dan selanjutnya bagaimana perilaku moral sebagai fungsi utama untuk menyeleksi berbagai hasil penilaian tentang citra moral, mana yang patut

dilaksanakan dan mana yang tidak patut untuk dilaksanakan.

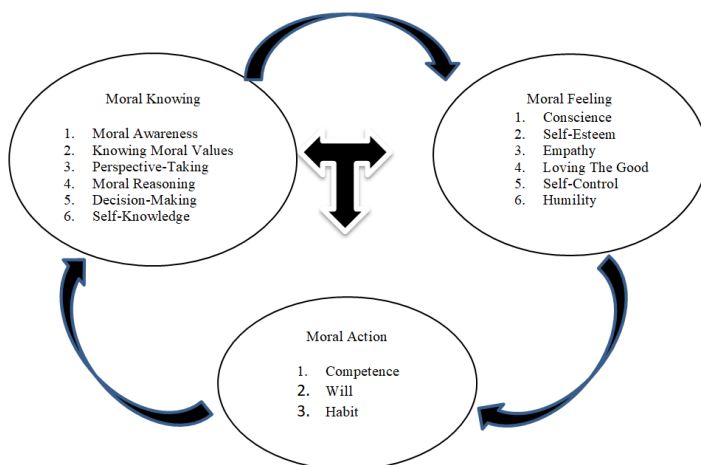
Berdasarkan paparan singkat di atas, menunjukkan konsep moral perlu dibelajarkan melalui program pendidikan secara sistemik. Dalam konteks pendidikan, dimensi moral dibelajarkan dalam rangka membangun prinsip-prinsip umum tentang kandungan moralitas dengan menggunakan metode pertimbangan moral yang mengedepankan penalaran moral, perasan moral, perilaku moral dan tindakan moral. Program sistemik pembelajaran moral dirancang untuk membelajarkan kepada peserta didik bagaimana cara-cara memberikan pertimbangan moral yang patut dan dapat diterima secara konsensus. Dengan demikian maksud dan tujuan pembelajaran moral dalam konteks pendidikan, menjadikan moral sebagai dasar berfikir dalam wujud tindakan yang nyata berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dalam masyarakat sebagai sesuatu yang berharga.

Pembelajaran moral menjejewantahkan rasa menghargai, kepatutan, standar kesepakatan hidup, pemandu perilaku, evaluasi diri dalam kesadaran berperilaku serta menjadikan personal yang intergritas. Konsep pokok nilai dalam telaah moral yakni bagaimana prinsip dan nilai-nilai utama sebagai standar dalam kehidupan bermasyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan dalam melakukan tindakan moral. Menurut (Halstead & Taylor, 2000: 169): *"...the principles and fundamental convictions which act as general guides to behaviour, the standards by which particular actions are judged as good or desirable."* Ditambahkan oleh Hill (1991), bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup, mempunyai tiga tahapan, yaitu:

1. *Values thinking*, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau *values cognitive*;
2. *Values affective*, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri orang untuk melakukan sesuatu, pada tahap ini dapat dirinci lagi menjadi, a) *disposition*; b) *commitments*
3. Tahap terakhir adalah *values actions*, yaitu tahap dimana nilai yang telah menjadi keyakinan dan menjadi niat (komitmen kuat) diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata atau perbuatan konkret.

Dalam pandangan Hill, dapat saja seseorang hanya berhenti pada tahap pertama, yaitu tahu atau paham tentang nilai-nilai kehidupan, tetapi tidak sampai pada perwujudan tingkah laku. Secara kognitif seseorang memang dapat tahu banyak tentang nilai, tetapi tidak sampai melangkah pada *values affective*, apalagi sampai *values action*. Oleh karena itu, nilai dan moral merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia, yang perlu dijaga dan dikembangkan bagi kelangsungan harmoninya kehidupan. Dalam konteks pendidikan, nilai dan moral menjadi kajian yang harus dipelajari secara akademis dan dibelajarkan kepada peserta didik serta dapat diimplementasikan secara praksis ke dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa mendeskreditkan fungsi pendidikan yang lain, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai program pembelajaran moral yang dilakukan secara sistemik untuk menghasilkan warga negara yang baik (*a good citizen*). Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran moral dapat dirancang agar peserta didik dapat menguasai kompetensi *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral acting* (Lickona, 1992).

Berdasarkan pandangannya, pendidikan moral dilakukan dengan menghubungkan pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber: Lickona (1992)

Lebih lanjut Lickona (1992), menyatakan bahwa pada pendidikan moral pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang menghasilkan karakter. Menurutnya, ada tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yaitu: *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral; *moral feeling* atau perasaan moral; dan *moral action* atau perbuatan moral. Ketiga komponen itu menunjuk pada tahapan pemahaman sampai pelaksanaan nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta terjadi dalam diri seseorang, tetapi bersifat prosedural, artinya tahapan ketiga hanya mungkin terjadi setelah tercapainya tahapan kedua, dan tahapan keduanya hanya tercapai setelah tahapan pertama. Artinya bisa saja dalam suatu kasus, tahapan moral untuk seseorang tidak terjadi secara utuh. Bisa saja ada orang yang hanya

sampai pada *moral knowing* dan berhenti sebatas memahami. Namun bisa jadi pada orang lain sampai kepada tahap *moral feeling*, dan yang lainnya mengalami perkembangan dari *moral knowing* sampai ke *moral action*. Pada dimensi pertama, yakni *moral knowing* merupakan tahap awal bagi seseorang untuk diajarkan dan belajar tentang moral. *Moral knowing* ini, meliputi: *moral awareness* (kesadaran moral), *knowing moral values* (mengetahui nilai-nilai moral), *perspective taking*, *moral reasoning*, *decision making* dan *self knowledge*.

Tetapi pembelajaran moral atau berkarakter hanya sampai pada *moral knowing* tidaklah cukup, karena jika hanya sebatas memahami nilai-nilai atau moral tanpa melaksanakannya, maka akan menghasilkan orang cerdas namun tidak bermoral. Oleh karenanya pembelajaran moral harus dilanjutkan sampai pada *moral feeling* sebagai sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dimensi *moral feeling* meliputi enam aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia bermoral atau berkarakter, yakni: *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri) dan *humility* (kerendahan hati). Namun begitu, pendidikan moral atau karakter yang hanya sampai pada tahap *moral feeling* saja juga tidak cukup. Oleh karena itu, perlu disertai dengan dengan perbuatan nyata (*moral action*) sebagai warga negara yang bermoral.

Dengan demikian, *moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dan perasaan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Dimensi *moral*

action ini meliputi: yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*) dan kebiasaan (*habit*).

C. Telaah Moral dalam konteks Norma, Hukum dan Peraturan

Berperilaku adalah kemampuan dasar manusia yang diilhami oleh kesadaran maupun respon ketaksadaran yang dibangun oleh kebiasaan-kebiasan yang terstimulus oleh aktifitas kehidupan manusia. Upaya membangun usaha sadar yang diselenggarakan secara perwujudan nyata dengan kaedah yang berlaku di dalam kehidupan manusia dalam rangka menengakkan upaya sikap, perilaku dan tindakan yang baik dan benar. Pada wilayah ini standar hidup ditentukan oleh norma dan moral. Di dunia pendidikan manusia sebagai mahluk pembelajar karenanya belajar tidak mengenal tempat, waktu maupun medianya. Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru, artinya aktifitas manusia dalam kehidupannya dalam interaksi maupun komunikasi dimanapun dan kapanpun mengandung pesan rutinitas belajar.

Informasi yang diserap merupakan sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya, dan interaksi yang terjadi atau yang dilakukan adalah tindakan belajar. Maka belajar berkaitan upaya menempa diri, sebagai manusia yang pembelajar maka dirinya siap dengan tempaan yang dicetak lewat pengetahuan dan pengalamannya. Norma adalah petunjuk hidup yang merupakan pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku yang pantas dalam pergaulan hidup bersama masyarakat (Syahrani, 2009).

Pada dasarnya norma merupakan perwujudan secara kongkrit dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada awalnya bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia. Disamping itu, nilai juga berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu melalui pertimbangan internal (batiniah) manusia. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikongkritkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih obyektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Wujud kongkrit dari nilai tersebut adalah norma.

Ada empat macam norma yang mengatur pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, yakni: norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Kaidah (norma) sifatnya abstrak, tidak dapat ditangkap dengan pancaindera. Peraturan hukum tertulis dalam perundang-undangan adalah pembedaan (manifestasi) dari kaidah (norma) itu. Kaidah juga dimanifestasikan dalam bentuk rambu-rambu, simbol-simbol dan lain sebagainya. Dari empat macam norma tersebut norma hukum merupakan yang paling kuat keberlakuannya, sebab dapat dipaksakan melalui suatu kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum.

Hukum yang berlaku di dalam masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten atau taat asas mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, hukum yang baik ataupun ideal merupakan aktualisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat guna mengatur kehidupan

dalam mengupayakan tujuan hidup bermasyarakat itu (Soejadi, 1998). Istilah “hukum” hingga kini masih merupakan bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum. Walaupun belum ditemukan definisi yang memuaskan semua pihak, namun sebagai bahan acuan perlu diberikan rumusan atau definisi tentang “hukum”. Mertokusumo (1985) memberikan definisi tentang hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”. Selanjutnya dikemukakan, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, kepada siapa saja tanpa kecuali. Hukum bersifat normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Paparan mengenai materi norma, hukum dan peraturan di atas, sebenarnya ingin menunjukkan bahwa materi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran moral di dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Materi norma, hukum, dan peraturan dalam Pendidikan Kewarganegaraan telah dijabarkan lebih luas yang meliputi kajian: tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

BAB IV

PENTINGNYA PENDIDIKAN MORAL BAGI WARGA NEGARA

A. Pendahuluan

Konsep “moral” sering disinonimkan dengan “etika”. Moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan relatif atau mutlak. Moral merupakan wacana normatif dan imperatif, yakni prinsip perbuatan baik-buruk, benar-salah. Jadi kata “moral” mengacu pada baik-buruknya manusia terkait dengan tindakannya, sikapnya dan cara mengungkapkannya. Moral menunjuk pada baik buruknya perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai manusia. Tolok ukur untuk menilai baik-buruknya tingkah laku manusia disebut norma. Prinsip moral yang amat penting adalah melakukan yang baik dan menolak yang buruk. Apabila prinsip ini tidak dimiliki maka tidak adimoralitas. Inilah kekhasan norma moral. Jika seseorang berkata: “pembantu rumah tangga itu amat jujur”, maka “jujur” merupakan kualitas moral, artinya kualitas manusia sebagai manusia. Bisa saja pembantu rumah tangga itu bodoh. “Jujur” merupakan penilaian moral, sedangkan bodoh merupakan penilaian kemampuan atau ketrampilan berpikir. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1): “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Sedangkan “nilai merupakan suatu ide sebuah konsep mengenai sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan. Ketika seseorang menilai sesuatu ia menganggap sesuatu tersebut berharga berharga untuk dimiliki, berharga untuk dikerjakan, atau berharga untuk dicoba maupun untuk diperoleh. Studi tentang nilai biasanya terbagi ke dalam area estetika dan etik.

Moral dan kepatuhan terhadap hukum bukan terutama untuk mendapatkan pahala, melainkan untuk membuat hidup manusia semakin manusiawi (memiliki kualitas moral). Kehidupan moral yang melulu berdasarkan ketaatan pada hukum akan membuat hidup seseorang menjadi minimalis (legalis) karena kehidupan moral menjadi terbatas pada melaksanakan hukum. Yang penting hukum dilakukan dan tidak dilanggar. Kaum legalis ini akan cenderung menjadi egoistis, karena hukum sering dimanfaatkan sebagai dukungan untuk pemikiran, gagasan dan perbuatan mereka sendiri, Mereka memandang hukum berdasarkan untung rugi, bukan berdasarkan nilai-nilai moral. Jadi supaya hidup manusia memiliki kualitas moral, dalam melaksanakan hukum juga dibutuhkan refleksi dan pertimbangan-pertimbangan yang mempertegas kekhususan moralitas. Kita perlu mencari dasar pemikiran yang ada di balik norma-norma hukum, yang tersembunyi di dalam hukum.

Menurut Soegarda, P dan Harahap, H.A.H. (Nawawi: 2010), ciri-ciri yang menunjukkan adanya pendidikan moral: (1) cukup memperhatikan instink dan dorongan-dorongan spontan dan konstruktif, (2) cukup

membuka kondisi untuk membentuk pendapat yang baik, (3) cukup memperhatikan perlunya ada kepekaan untuk menerima dan sikap responsive, (4) pendidikan moral memungkinkan memilih secara bijaksana mana yang benar mana yang tidak. Adapun ruang lingkup materi Pendidikan Nilai Moral antara lain meliputi: ketuhanan, kejujuran, budi pekerti, akhlaq mulia, kepedulian dan empati, kerjasama dan integritas, humor, mandiri dan percaya diri, loyalitas, sabar, rasa bangga, banyak akal, sikap respek, tanggungjawab, dan toleransi, serta ketaatan, penuh perhatian, dan tahu berterima kasih.

B. Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus Bangsa

Pendidikan nilai moral sangat penting untuk menegakkan suatu bangsa yang baik. Tanpa pendidikan moral (agama, budi pekerti, akhlaq) kemungkinan besar suatu bangsa bisa hancur, carut marut. Oleh karena itu, munculnya kembali pendidikan budi pekerti sebagai primadona dewasa ini mencerminkan kegusaran bangsa ini akan terjadinya krisis moral bangsa dan kehidupan sosial yang carut marut.” (Supriadi, 2001).

Pendidikan Moral ini didukung oleh beberapa teori perkembangan, antara lain teori Perkembangan Sosial dan Moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg dan Albert Bandura. Menurut Kohlberg (Nawawi, 2010) perkembangan sosial dan moral manusia terjadi dalam tiga tingkatan besar yaitu: (a) tingkatan moralitas *prakonvensional*, yaitu ketika manusia berada dalam fase perkembangan remaja awal, yang belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial; (b) tingkat moralitas *konvensional*, yaitu ketika manusia menjelang dan mulai memasuki fase perkembangan masa remaja, yang sudah menganggap

moral sebagai kesepakatan tradisi sosial; (c) tingkat moralitas *pascakonvensional*, yaitu ketikamania telah memasuki fase perkembangan masa remaja dan pasca remaja (usia 13 tahun ke atas), yang memandang moral lebih dari sekedar kesepakatan tradisi sosial.

Sering kita menemukan di banyak media massa elektronik dan cetak, fenomena tingkah laku amoral remaja yang semakin hari semakin meningkat, dari tindakan amoral yang paling ringan, seperti: membohong, menipu, perilaku menyontek di sekolah, tidak menaati peraturan, melanggar norma, mencaci maki, dll., sampai pada tingkat yang paling mengawatirkan, mencemaskan dan meresahkan orang tua dan masyarakat, bahkan mengganggu ketertiban umum, kenyamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan, serta merusak fasilitas umum, seperti: mencuri, menodong/merampok, menjambret, memukul, tawuran pelajar, tindak kekerasan, kriminal, demonstrasi yang anargis, mabuk, dan bahkan sampai membunuh, serta mutilasi. Pendek kata perilaku amoral ini mengancam keselamatan fisik dan jiwa diri mereka dan orang lain.

Menurut Susilawati, dkk. (2010), macam-macam keutamaan dari Pendidikan Moral yang perlu ditanamkan bagi warga negara antara lain;

1. Kejujuran adalah sesuatu yang penting. Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Tanpa kejujuran kita tidak pernah maju selangkahpun, karena belum berani menjadi diri sendiri. Tidak jujur berarti belum sanggup untuk mengambil sikap yang lurus. Tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya kehilangan nilainya. Sikap baik terhadap orang lain, tanpa kejujuran berarti kemunafikan dan sering menjadi racun. Bersikap jujur

berarti *terbuka, dan fair*. Terbuka tidak dimaksudkan bahwa orang lain berhak tahu semua pikiran dan perasaan kita, melainkan bahwa kita selalu tampil sebagai diri kita sendiri sesuai dengan keyakinan kita dan tidak menyembunyikan wajah kita yang sebenarnya (bertopeng). Terbuka berarti orang boleh tahu siapa kita ini. Sikap wajar atau fair, berarti memperlakukan orang lain menurut standar yang dipergunakan orang lain terhadap dirinya. Ia menghormati hak orang lain dan selalu memenuhi janji, tidak bertindak bertentangan dengan suara hati atau keyakinannya. Berkaitan dengan kejujuran sangat penting diperhatikan bahwa kita harus menjadi otentik. Otentik berarti asli, menjadi diri kita sendiri, bukan jiplakan, tiruan, membeo, atau hanya ikut mode. Manusia otentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keaslian dan kepribadian yang sebenarnya.

2. Kesiediaan Untuk Bertanggungjawab, kejujuran menjadi operasional kalau orang bersedia untuk bertanggungjawab. Artinya: *Pertama*, kesiediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan sebaik mungkin. Bertanggungjawab berarti mengambil suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita. Tugas itu dilaksanakan sebaik mungkin meskipun dituntut pengorbanan, ditentang maupun tidak menguntungkan. Bahkan andaikata tidak ada orang yang peduli atau melihatnya, kita tidak begitu saja puas karena pekerjaan sudah selesai. *Kedua*, sikap ini mengatasi segala etika peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan bertanggung jawab merasa terikat pada yang memang perlu. Ia terikat pada nilai yang

mau dihasilkan. *Ketiga*, wawasan orang yang bertanggungjawab secara prinsipial tidak terbatas. Ia tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya saja, melainkan merasa bertanggungjawab di mana saja ia diperlukan. Bersedia mengerahkan tenaga dan kemampuan di mana ia ditantang untuk menyelamatkan sesuatu. Ia bersikap positif, kreatif, kritis, dan obyektif. *Keempat*, bertanggungjawab berarti juga bersedia untuk diminta memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

3. Kemandirian Moral, yakni kekuatan batin untuk mengambil sikap moral sendiri dan bertindak sesuai dengan nya. Mandiri secara moral artinya tidak dapat dibeli oleh mayoritas, dan tidak pernah akan rukun hanya demi kebersamaan, kalau kerukunan itu melanggar keadilan.
4. Keberanian Moral, menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kebenaran dan sekaligus kewajibannya. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam kesediaan untuk membela kebenaran tanpa kompromi, dan berani mempertahankan sikap yang diyakininya.
5. Kerendahan Hati, bukan berarti merendahkan diri. Kerendahan hati yang dimaksud adalah kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan kenyataannya. Orang rendah hati tidak hanya melihat diri kelemahannya, tetapi juga kekuatannya. Maka, ia menerima diri dan tahu diri dalam arti yang sebenarnya. Dalam kaitannya dengan moral berarti

mampu memberikan penilaian moral terbatas, dan juga sadar akan keterbatasan kebaikan kita. Berani memperhitungkan pendapat orang lain. Ia tahu atau dengan kata lain *empan papan*. Kerendahan hati tidak bertentangan dengan keberanian moral, justru menjadi prasyarat bagi kemurniannya. Tanpa kerendahan hati, keberanian moral mudah menjadi kesombongan atau kedok untuk menyembunyikan diri. Kerendahan hati menjamin kebebasan dari pamrih dalam keberanian. Kita tidak merasa kalah kalau pendapat kita tidak menang. Justru orang yang rendah hati sering menunjukkan daya tahan yang paling besar kalau ada perlawanan. Orang rendah hati tidak merasa diri penting (bukan karena rendah diri), karena itu berani mempertaruhkan diri dalam sikap dan tanggungjawabnya.

6. Nilai-Nilai Otentik, artinya menjadi diri sendiri, bukan jiplakan, bukan tiruan, orang-orangan yang hanya membeo saja, yang tidak punya sikap dan pendirian sendiri karena ia dalam segala-segalanya mengikuti mode/ pendapat umum dan arah angin. Otentik berarti asli. Manusia otentik: manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sendiri dengan keasliannya, dengan pribadi yang sebenarnya. Sedangkan manusia yang tidak otentik adalah yang hanya tiruan/jiplakan. Ketidak otentikan seseorang biasanya diakibatkan oleh rasa takut tak diakui kelompok, hanya ikut mode tanpa kreativitas sendiri. Ini berlaku juga dibidang religius (masuk biara), bidang estetik, dan lain-lain. Menjadi otentik berarti berani muncul engan diri sendiri, bukan perkiraan kita terhadap harapan orang.

8. Realistik dan Kritis, berarti mempelajari/melihat keadaan dengan serealis-realisnya sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip dasar. Sikap ini tentunya dibarengi oleh sikap kritis. Kritis berarti tajam dalam menganalisa sesuatu, tidak mudah percaya dan selalu berusaha menemukan yang baik dan yang buruk. Sikap kritis perlu juga terhadap segala macam kekuatan, kekerasan dan wewenang dalam masyarakat, juga terhadap segala macam aturan moral dalam masyarakat. Tanggung jawab moral yang nyata, menuntut sikap realistik dan kritis dengan pedoman untuk menjamin keadilan dan menciptakan suatu keadaan masyarakat yang membuka kemungkinan lebih besar bagi warganya untuk membangun hidup yang lebih bebas dari penderitaan dan lebih bahagia. Segala peraturan dinilai secara kritis. Ada aturan yang mengatur dan perlu dinilai dari dalam.

Dalam hal ini, remaja dikatakan sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran dan posisi yang strategis. Mereka merupakan harapan masa depan bangsa. Maju atau mundurnya bangsa dan Negara ada di pundak mereka. Kalau mereka maju maka majulah Negara, tetapi kalau mereka bobrok, mundur, dan loyo, maka mundurlah Negara. Sudut pandang psikologi para remaja sebagai generasi penerus memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara maksimal. Potensi mereka yang prospektif, dinamis, energik, penuh vitalitas, patriotism dan idealism harus dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan terprogram.

Sebagai generasi penerus, remaja harus memiliki kemampuan potensial yang dapat diolah menjadi kemampuan actual. Selain itu juga memiliki potensi kecerdasan intelektual, emosi dan sosial, berbahasa, dan

keserdasan seni yang bisa diolah menjadi kecerdasan aktual yang dapat membawa mereka kepada prestasi yang tinggi dan kesuksesan. Mereka memiliki potensi moral yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi moral yang positif sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara yang penuh dengan kejujuran, tidak korup, semangat yang tinggi dan bertanggungjawab. Potensi mereka yang prospektif, dinamis, energik, penuh vitalitas, patriotisme dan idealisme telah dibuktikan ketika jaman Pergerakan Nasional, pemuda pelajar telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu bisa terwujud apabila semua potensi mereka dikembangkan dan salah satunya adalah potensi moral. Oleh karena itu remaja sebagai generasi penerus harus diselamatkan melalui Pendidikan Nilai Moral. Sehingga harkat dan martabat bangsa bisa terangkat. Kualitas hidup meningkat, dan kesejahteraan serta kenyamanan pun bisa didapat.

Melihat dan memperhatikan fenomena dan kondisi ideal remaja sebagai generasi penerus maka Pendidikan Nilai Moral perlu ditanamkan sejak usia dini dan harus dikelola secara serius. Dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan program yang berkualitas. Misalnya dengan jumlah jam pelajaran yang memadai, program yang jelas, teknik dan pendekatan proses pembelajaran yang handal serta fasilitas yang memadai. Jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, niscaya generasi penerus akan memiliki moral yang baik, akhlaq mulia, budi pekerti yang luhur, empati, dan tanggungjawab. Sehingga yang kita saksikan bukan lagi kekerasan dan tawuran, melainkan saling membantu, menolong sesama, saling menyayangi, rasa empati, jujur

dan tidak korup, serta tanggungjawab. Jangankan memukul atau membunuh, sedangkan mengejek, mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina teman pun tidak boleh karena dinilai sebagai melanggar nilai-nilai moral.

C. Pendidikan Moral Dalam Upaya Pengembangan Warga Negara

Searah dengan semakin pesatnya arus globalisasi yang dicirikan dengan derasnyanya arus informasi dan teknologi ternyata dari satu sisi memunculkan persoalan-persoalan baru yang kerap kita temukan pada diri individu dalam suatu masyarakat. Munculnya kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, narkoba, penyimpangan seksual, kekerasan serta berbagai bentuk penyimpangan penyakit kejiwaan, seperti stress, depresi, dan kecemasan, adalah bukti yang tak ternafikan dari adanya dampak negatif dari kemajuan peradaban kita. Hal ini kemudian secara tidak langsung berpengaruh tidak baik pula pada keamanan dan tatanan masyarakat damai seperti kita semua harapkan (Darajat, 1971:12). Fenomena ini dalam rumusan yang sederhana dapat dikatakan bahwa semakin moderen dan maju sebuah masyarakat akan semakin kompleks dan beragam problematika kehidupan yang akan dijumpai.

Menurut Susilawati, dkk (2010), dalam pendidikan moral, warga negara harus mengetahui dasar-dasar moral yang paling dalam, yakni;

1. Pandangan Psiko-Sosiologis. Pandangan moral yang terdalam terletak pada pandangan yang ada dalam masyarakat yang munculnya dapat disesuaikan kebutuhan psikologis manusia (kebutuhan sosial manusia). Dasar keberlakuan moral terletak dalam

kebutuhan individual dan sosial. Tidak ada nilai yang lebih tinggi dari apa yang akan dicapai oleh masyarakat. Contoh: Hobbes – negara dibentuk hanya untuk menjamin kebersamaan. Freud – agama ada hanya untuk memenuhi kebutuhan psikologis saja. Masyarakat merupakan sumber dan asal kewajiban moral/otonomi tertinggi dari moralitas adalah masyarakat.

2. Pandangan reduksionistis, pandangan ini mereduksikan keberlakuan moral sebagai realisasi kehidupan sosial yang ada. Hanya kebutuhan sosial saja dijadikan penentu keberlakuan moral, pada hal ada kebutuhan lain. Pandangan ini tidak cukup; sebab orang masih bisa bertanya terhadap apa yang dianggap baik oleh masyarakat, “mengapa ini baik?” – dengan kata lain orang masih bisa bersikap kritis (cat: kalau ini benar maka kita akan setuju dengan praktek A. partheid di Afrika Selatan).
3. Pandangan immanentist. Keberlakuan norma moral ditentukan oleh manusia sendiri, berdasarkan kesadaran moral imanent (yang ada dalam dirinya). Apabila manusia mengikuti penentuan akal budinya, maka manusia akan menyadari norma norma yang mengikat dirinya untuk bertindak. Sehingga keberlakuan moral terbatas dalam dirinya (akal budi) di dunia ini. Tak ada dasar yang lebih dalam dari kehendak rasio manusia. Manusia akhirnya menjadi otoritas terakhir (tolok ukur).
4. Pandangan transendentalist. Dasar moral yang paling dalam adalah Tuhan. KehendakNya menjadi norma yang secara kodrat mengikat manusia. Kehendak Tuhan menjadi sesuatu norma yang mutlak mengikat manusia. Di sini manusia sungguh dilihat sebagai

pribadi, karena menjadi citra Allah sendiri. Meskipun akal budi penting, namun ada sesuatu yang terbuka yaitu terhadap yang transenden. Kodrat manusia (terluka) membuka diri bagi kenyataan yang mengatasi dirinya.

Meskipun tingginya tingkat perkembangan dan perubahan yang berlaku disebahagian besar masyarakat modern, keluarga tetap memelihara fungsi pendidikannya dan menganggap bahwa hal itu merupakan sebagian tugasnya, khususnya dalam rangka menyiapkan sifat cinta mencintai dan keserasian di antara anggota-anggotanya. Begitu juga ia harus memberi pemeliharaan kesehatan, psikologikal, spiritual, akhlak, jasmani, intelektual, emosional, sosial di samping menolong mereka menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kebiasaan yang diinginkan yang berguna dalam segala lapangan hidup mereka serta sanggup mengambil manfaat dari pelajaran lembaga-lembaga lain.

Melihat dan memperhatikan fenomena dan kondisi ideal remaja sebagai generasi penerus, maka pendidikan nilai moral perlu ditanamkan sejak dini dan harus dikelola secara serius. Dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan program yang berkualitas. Misalnya dengan jumlah jam pelajaran yang memadai, program yang jelas, teknik dan pendekatan proses pembelajaran yang handal serta fasilitas yang memadai. Jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, niscaya generasi akan memiliki moral yang baik, akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, empati, dan tanggungjawab. Sehingga yang kita saksikan bukan lagi kekerasan dan tawuran, melainkan saling membantu, menolong sesama, saling menyayangi, rasa empati, jujur dan tidak korup,

serta tanggungjawab. Jangankan memukul atau membunuh, mengejek, mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina teman pun tidak boleh karena dinilai sebagai melanggar nilai-nilai moral.

Bagaimanapun krisis mentalitas, moral, dan karakter anak didik berkaitan dengan krisis-krisis multidimensional lain, yang dihadapi bangsa ini pada umumnya dan pendidikan nasional pada khususnya. Oleh karena itu, jika dicermati dan dinilai lebih adil dan objektif, makro krisis yang mentalitas dan moral peserta didik merupakan cermin dari krisis yang lebih luas, yang terdapat dan berakar kuat dalam masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, krisis mentalitas dan moralitas di antara peserta didik pada jenjang pendidikan persekolahan, baik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, merupakan cermin dari krisis mentalitas dan moralitas dalam masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa upaya mengatasi krisis seperti itu tidak memadai jika hanya dilakukan secara parsial di lingkungan persekolahan saja. Harus ada kesatupaduan atau sinergitas untuk mengatasi krisis moralitas dan mentalitas ini dalam masyarakat yang lebih luas, dalam rumah tangga, dan lingkungan lainnya. Pendidikan moral dan budi pekerti bukan hanya tanggungjawab sekolah, tetapi juga tanggungjawab keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi meskipun sekolah misalnya menyelenggarakan pendidikan moral dan budi pekerti, tetapi lingkungan masyarakatnya tidak atau kurang baik, maka pendidikan moral di sekolah tidak banyak artinya.

Kemajuan negara juga membawa dampak negatif bagi kehidupan: pola pikir cenderung praktis-ekonomis yang mengakibatkan banyak orang mengabaikan

pertimbangan moral. Banyak orang cenderung menekankan kebebasan pribadi, sehingga kepentingan sesama kurang diperhatikan; arogansi kekuasaan, penindasan, penggusuran, budaya “suap”, dan sebagainya. Penyalahgunaan teknologi untuk menghancurkan sesama yang mengakibatkan semakin merosotnya penghargaan terhadap matabat manusia (pengguguran, kejahatan yang semakin canggih, merosotnya penghargaan terhadap nilai perkawinan, menyingkirkan orang yang dianggap kurang produktif secara ekonomis (euthanasia, dan lain-lain.). Dalam situasi demikian, banyak kegelisahan diantara manusia dan mulai menyadari pentingnya norma moral yang bisa dipegang dan dipertanggungjawabkan. Norma moral itu dibutuhkan sebagai tolok ukur untuk menentukan benar tidaknya sikap dan tindakan manusia dilihat dari baik buruknya manusia sebagai pribadi. Penilaian moral adalah penilaian terhadap baik buruknya manusia yang menyangkut inti kepribadiannya (hati, watak, perangai, dan tindakannya).

Menurut Susilawati, dkk (2010), ada empat alasan mengenai pentingnya membahas pendidikan dalam membentuk moral hidup, yakni:

1. Amanat seluruh agama Semua agama mengajarkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan, karenanya Allah sungguh menyayangi kehidupan. Allah mengasihi manusia dengan kerahiman-Nya dan menghendaki agar manusia mengalami kehidupan yang sejati.
2. Nilai dan indahnya kehidupan Hidup adalah anugerah Allah yang amat berharga. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya dan memperjuangkannya untuk hidup bahagia. Kehidupan

sungguh amat bernilai, indah, dan mengagumkan. Kekayaan dan keindahan dunia tidak sebanding dengan hidup manusia. Orang akan memberikan segala kepunyaannya sebagai ganti nyawanya. Kehidupan yang amat bernilai dan indah ini terancam oleh ulah manusia sendiri (senjata, nuklir, berbagai racun kehidupan, serta keserakahan manusia sendiri).

3. Moralitas kehidupan kerap kali dikacaukan Moralitas kehidupan seringkali dikacaukan oleh sikap manusia yang sewenang-wenang terhadap sesamanya, oleh ketidakpastian hukum (salah-benar menjadi tidak jelas). Moralitas sering dikacaukan pula oleh situasi kehidupan yang teleologis (bahwa hidup selalu mempunyai tujuan tertentu, demi tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara). Semua orang ingin memperoleh kebahagiaan. Akan tetapi, pandangan dan pengertian mengenai kebahagiaan kadang keliru. Akibatnya, banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan “kebahagiaan” dan menjadikan orang lain sebagai tumbal.
4. Moralitas merupakan tuntutan hakiki hidup manusia Moralitas menyangkut hati, sifat, perangai, dan tingkah laku manusia. Moralitas berkaitan dengan baikburuknya manusia sebagai manusia (inti kepribadiannya). Moralitas merupakan tuntutan sikap hidup dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Norma moral penting bagi kehidupan manusia, agar kehidupan bersama dapat berlangsung dengan baik dan masing-masing individu tetap dihargai martabatnya (tanpa dirugikan).

Dengan memperkaya dimensi nilai, moral, dan norma pada aktivitas pendidikan di sekolah, akan memberi pegangan hidup yang kokoh bagi anak-anak

dalam menghadapi perubahan sosial. Kematangan secara moral (*morally mature*) akan menjadikan seorang anak mampu memperjelas dan menentukan sikap terhadap substansi nilai dan norma baru yang muncul dalam proses perubahan atau transformasi sosial yang sangat cepat ini. Demikian juga, dengan bekal pendidikan moral secara memadai, akan memperkuat konstruksi moralitas peserta didik sehingga mereka tidak gampang goyah dalam menghadapi aneka macam godaan dan pengaruh negatif di sekolah. Menurut Lubis (2015:232) nilai-nilai moralitas perlu ditanamkan sejak dini kepada anak didik untuk dapat membentuk warga negara yang bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yakni: pada sila pertama, menanamkan nilai-nilai religius; pada sila kedua, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan; pada sila ketiga, menanamkan nilai-nilai kebangsaan; pada sila keempat, menanamkan nilai-nilai kerakyatan; dan pada sila kelima, menanamkan nilai-nilai keadilan sosial.

BAB V

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER BERORIENTASI MORAL

A. Pendahuluan

Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tercermin dari semakin meningkatnya kriminalitas, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan hukum, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai pelosok negeri, pergaulan bebas, pornografi dan pornoaksi, tawuran yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, serta korupsi yang kian merambah pada semua sektor kehidupan. Masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan kesantunan dalam berperilaku, musyawarah-mufakat dalam menyelesaikan masalah, kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, sikap toleran dan gotong royong, mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku egois individual. Gambaran fenomena tersebut, menunjukkan bangsa ini tengah mengalami krisis moral yang menegaskan terjadinya ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa.

Memperhatikan situasi dan kondisi karakter bangsa paska-reformasi yang dinilai sudah memprihatinkan, seyogyanya seluruh komponen bangsa sepakat untuk menempatkan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) sebagai prioritas yang utama. Ini berarti setiap upaya pembangunan harus

selalu dipikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter bangsa. Pemerintah reformasi memang telah merumuskan misi pembangunan nasional yang memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yakni; terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks. Pembangunan karakter bangsa memiliki urgensi yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Sangat luas karena terkait dengan pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa, dan bersifat multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses “menjadi”. Urgensi pembangunan karakter dengan sifatnya yang demikian, mensyaratkan karakter sebagai: (1) perekat fondasi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) “kemudi” dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama; dan (3) kekuatan esensial dalam membangun karakter bangsa yang bermartabat.

Namun, pembangunan karakter bangsa bukanlah urusan sepihak yang datang dari atas. Gerakan pembangunan karakter bangsa harus mendapat dukungan seluruh komponen pada akar bawah. Krisis moral yang tengah melanda bangsa ini, mensyaratkan untuk segera dilakukannya *rediscovery* nilai-nilai luhur budaya bangsa atau revitalisasi atau semacam *invented*

tradition (Hobsbawm, 1983: 1) melalui gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen sebagai konsensus yang lahir dari kesadaran nasional.

Pembangunan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata dalam bentuk aksi nasional dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam naungan NKRI. Pembangunan karakter bangsa harus dilakukan melalui pendekatan sistematis, integratif dan berkelanjutan. Strategi pembangunan karakter dapat dilakukan melalui sosialisasi, enkulturasi dan internalisasi melalui berbagai institusi dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat serta pendekatan multidisiplin yang tidak menekankan pada indoktrinasi.

Tanpa bermaksud mengucilkan arti institusi yang lain, pendidikan sebagai institusi masih dinilai layak sebagai wahana sistemik dalam membangun karakter anak bangsa. Namun sayang, puluhan tahun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (baca: pendidikan formal) sebagai wahana sistemik pembangunan karakter belum memberikan luaran optimal terhadap pembentukan karakter peserta didik. Hal ini diduga pendidikan saat ini lebih cenderung mementingkan capaian kompetensi akademik ketimbang capaian kompetensi karakter. Untuk itu usulan adanya pendidikan karakter yang teraktualisasikan secara integralistik sebagai wahana sistemik pengembangan kecerdasan moral (*building moral intelligence*) perlu mendapat dukungan berbagai pihak dalam menghasilkan luaran peserta didik yang memiliki kompetensi kecerdasan plus moral. Tetapi fakta di lapangan

menunjukkan dominasi pembelajaran konvensional dalam proses pembelajaran di kelas, masih menjadi indikator kuat sebagai penghalang teraktualisasikannya pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Pembelajaran konvensional dengan ciri: (1) pendekatan *teacher centered*; (2) dominasi ekspositori; (3) pembelajaran berorientasi tekstual; (4) evaluasi berorientasi pada kognitif tingkat rendah; dan (5) posisi guru sebagai *transfer of knowledge* (Setiawan, 2012), dari berbagai hasil kajian dan penelitian belum secara optimal memberikan kontribusi terhadap pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Bahkan, pembelajaran dalam dunia pendidikan yang masih didominasi oleh *transfer of knowledge* sebagai akibat tumbuhnya budaya verbalistik (Sanusi, 1993), menjadi penyebab implementasi pembelajaran dalam dunia pendidikan cenderung lebih memprioritaskan kompetensi akademik. Menghadapi fakta di atas, pendidikan formal sebagai institusi pengemban pendidikan karakter secara mikro perlu melakukan pembenahan diri. Pertama, mendesain peran pendidikan karakter dengan pola integralistik dalam mengembangkan kecerdasan moral sebagai upaya pengkondisian moral (*moral conditioning*). Kedua, mengembangkan pembelajaran inovatif dalam pendidikan karakter sebagai upaya aplikatif dalam melatih moral (*moral training*). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh (Halstead dan Taylor, 2000: 169) bahwa: “*to build on and supplement the values children have already begun to develop by offering further exposure to a range of values that are current in society (such as equal opportunities and respect for diversity); and to help children to reflect on, make sense of and apply their own developing values*”.

B. Pembahasan

1. Membentuk Karakter dalam Pendidikan

Dewasa ini ada kehendak pengembangan karakter sebagai gerakan nasional, terutama melalui pendidikan. Baik di perguruan tinggi maupun persekolahan. Berikut ini digambarkan tentang grand design pendidikan karakter yang diajukan oleh Tim Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional (2010):



Proses Pembentukan Karakter

Kemudian karakter apa saja yang hendak dikembangkan pada warga negara dalam semua satuan pendidikan, dapat dilihat pada gambar berikut :

OLAH PIKIR Cerdas Kreatif	OLAH HATI Jujur Bertanggungjawab
OLAHRAGA (KINESTETIK) Bersih Sehat Menarik	OLAHRAGA DAN KARSA Peduli Kreatif

Konfigurasi Nilai/ Karakter Untuk Semua Satuan Pendidikan

Untuk pengembangan pendidikan karakter di persekolahan mata pelajaran PKn dan mata pelajaran agama merupakan ujung tombak. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) antara lain ada ketentuan bahwa “Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

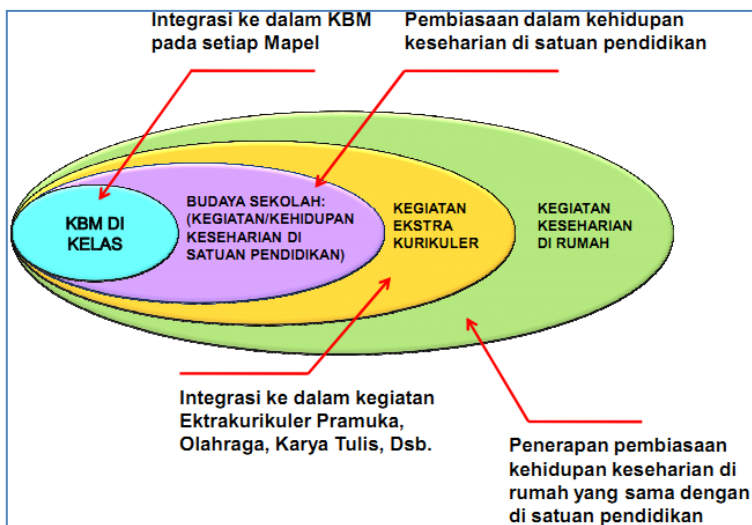
Dalam perkembangan terakhir sebagai upaya agar pendidikan karakter mudah dilaksanakan telah diidentifikasi nilai-nilai karakter untuk Mata Pelajaran PKn meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. Nilai karakter pokok Mata Pelajaran PKn yaitu: Kereligiusan, Kejujuran, Kecerdasan, Ketangguhan, Kedemokratisan dan Kepedulian. Sedangkan nilai karakter utama Mata Pelajaran PKn yaitu: Nasionalis, Kepatuhan pada aturan sosial, Menghargai keberagaman, Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, Bertanggung jawab, Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan Kemandirian. Nilai-nilai karakter utama ini dapat dikembangkan lebih luas,

untuk upaya memperkokoh fungsi PKn sebagai pendidikan karakter.

Nilai karakter di atas, sebenarnya telah cukup memadai. Bung Hatta salah seorang bapak pendiri Negara tercinta mengajukan nilai karakter dalam jumlah tidak begitu banyak tetapi sangat esensial. Menurut Bung Hatta, pendidikan karakter rakyat adalah: mandiri, tahu hak dan kewajiban, mau mengambil tanggung jawab.

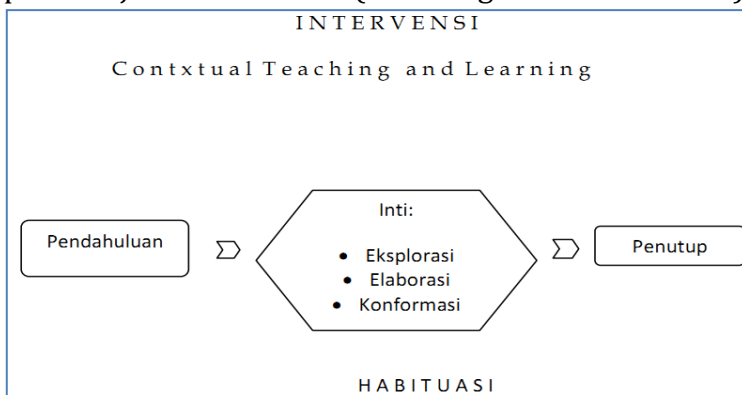
Apabila nilai-nilai karakter telah menjadi watak bangsa Indonesia, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, karena telah memenuhi karakteristik sebagai bangsa yang maju dan modern (Zamroni 2009), yaitu :

1. Dalam kehidupan sehari-hari warga memiliki etika yang dipegang teguh
2. Warga masyarakat memiliki tanggungjawab
3. Masyarakat memiliki trust, yang didasarkan pada kejujuran
4. Warga masyarakat saling menghormati hak orang lain
5. Warga masyarakat patuh kepada hukum dan aturan
6. Warga masyarakat memegang teguh tepat waktu
7. Masyarakat memiliki ethos kerja.



Strategi Mikro di Sekolah

Di bawah ini merupakan proses pembelajaran yang sangat menunjang penanaman karakter melalui pembelajaran aktif (lihat gambar berikut).



Penanaman Karakter Melalui Pelaksanaan Pembelajaran Intervensi.

2. Pendidikan Karakter Berorientasi Moral

Banyak pihak mensinyalir, anak bangsa kini tengah mengalami krisis moral. Fenomena

meningkatnya pergaulan seks bebas, pornografi dan pornoaksi, keterlibatan dalam narkoba, kebiasaan *bullying* di sekolah dan tawuran di kalangan remaja yang berulang kali terjadi, seakan menunjukkan bangsa ini tengah melahirkan generasi yang hedonis dan radikal. Gambaran fenomena demoralisasi ini menandakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran di tingkat persekolahan tidak berdampak positif terhadap perubahan perilaku berkarakter pada peserta didik. Banyak orang berpandangan, kondisi ini terjadi karena pembelajaran di sekolah cenderung *teks book*, terjebak dalam budaya verbalistik, dan terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif). Sedangkan pembentukan sikap (afektif) dan pembiasaan (psikomotorik) sangat minim bahkan kurang mendapatkan tempat. Institusi pendidikan lebih menitikberatkan pada pengembangan intelektual semata, namun aspek soft skills sebagai unsur utama pendidikan karakter cenderung terabaikan. Alhasil, dunia pendidikan banyak menghasilkan anak dengan kecerdasan intelektual namun tidak dilengkapi dengan kecerdasan moral.

Sekaitan dengan fenomena di atas, sudah seharusnya seluruh komponen bangsa sepakat untuk menempatkan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) sebagai prioritas yang utama. Hal ini berarti setiap upaya pembangunan pada segala aspek di negeri ini, harus selalu dipikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter bangsa. Begitupun halnya dengan pembangunan pendidikan, harus rancang suatu model pendidikan yang mampu menghasilkan luaran karakter berbasis

nilai moral dan nilai-nilai kebangsaan. Tanpa mengenyampingkan pentingnya bentuk pendidikan yang lain, pendidikan karakter sudah seharusnya dapat diimplementasikan melalui peran institusi pendidikan dalam menumbuhkan moralitas anak bangsa dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Penguatan pendidikan karakter di era global yang penuh dengan paradoks dan pergeseran nilai, sangat relevan dan urgen dalam mengatasi krisis moral yang tengah terjadi. Meski penyebab merosotnya moral bersifat kompleks, namun ada dua faktor yang tidak dapat dipungkiri, yakni faktor sosial internal dan faktor eksternal. Pada faktor sosial internal, muncul fenomena mulai runtuhnya secara perlahan fungsi sosial terhadap pembentukan moral anak, seperti: berkurangnya pengawasan orang-tua, ketidakpedulian masyarakat, hilangnya contoh ketauladanan, dan disharmonisasi. Sementara pada faktor eksternal, deraan masuknya nilai-nilai dari luar melalui berbagai kemajuan IT secara terus-menerus telah menyebabkan terjadinya pertentangan nilai dalam diri anak, bahkan bertentangan dengan norma-norma yang tengah ditumbuhkan pada keluarga, sekolah dan masyarakatnya. Kedua faktor inilah yang menjadi penyebab kemerosotan moral pada anak, hingga memunculkan demoralisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Faktualitas merosotnya moral di kalangan anak bangsa, menjadikan kehadiran pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya membangun moral bangsa. Untuk itu, rancangan pendidikan karakter berbasis nilai moral sebagai usulan perlu mendapat perhatian dan masukan secara berkelanjutan dalam menguatkan

aktualisasi dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang mirip dengan pendidikan moral. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak agar menjadi manusia, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik (insan kamil). Tumbuh dan berkembangnya moral yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup. Pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang secara holistik menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penekanan pendidikan karakter pada dimensi moral juga diulas secara komprehensif oleh Lickona (1991), yang menyatakan pendidikan karakter pada hakikatnya adalah pembentukan moral. Dalam pendidikan karakter diperlukan adanya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yakni: *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar peserta didik yang terlibat dalam sistem pendidikan dapat memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan (moral). Selanjutnya diuraikan, masing-masing komponen karakter yang baik ke dalam beberapa dimensi.

Dimensi pertama adalah *moral knowing*, dimensi ini yang akan mengisi ranah kognitif dengan kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*). Sedangkan dimensi kedua *moral feeling*, merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri (*conscience*), percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), kerendahan hati (*humility*). Berikutnya dimensi *moral action*, sebagai perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*).

Pandangan Thomas Lickona di atas, pada hakekatnya menunjukkan pendidikan karakter sebagai pendidikan moral yang dalam penerapannya harus menyentuh pada tiga dimensi secara utuh, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*) (Direktorat Pembinaan SMP, 2010). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu

bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dijelaskan oleh Buchori (2007), bahwa pengembangan karakter seharusnya membawa anak ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang amat penting yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat kuat (tekad) untuk mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut *conatio*, dan langkah untuk membimbing anak membulatkan tekad ini disebut langkah konatif. Pendidikan karakter mestinya mengikuti langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari pengenalan nilai secara kognitif, langkah memahami dan menghayati nilai secara afektif, dan langkah pembentukan tekad secara konatif.

Paparan di atas menunjukkan, pentingnya penekanan pendidikan karakter pada dimensi moral. Melalui penekanan dimensi moral, pendidikan karakter membelajarkan peserta didik untuk dapat belajar nilai dalam membedakan mana perbuatan baik-buruk, benar-salah. Nilai moral berperan penting dalam membantu pengembangan karakter peserta didik, karena didalamnya melibatkan proses pengenalan dan internalisasi nilai-nilai sosial, termasuk nilai-nilai luhur kebangsaan demikian, aktualisasi pendidikan karakter berbasis nilai moral dalam pembelajarannya juga melibatkan nilai-nilai sosial kebangsaan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas sebagai anak bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan tantangan besar bangsa yang dihadapi, perlu upaya menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui pendidikan karakter berbasis nilai. *Re-discovery*, revitalisasi, atau *invented tradition* nilai-nilai sosial-budaya kebangsaan perlu dilakukan melalui medium pendidikan karakter bagi generasi bangsa sebagai figur generasi bangsa bermoral. Atas dasar *core value* yang mengarah pada *nation and character building*, sudah saatnya bangsa ini merumuskan kembali nilai-nilai asli sosial-budaya bangsa. Terlebih di era global yang tengah mendera, konsep kebangsaan Indonesia perlu diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai. Atas dasar pemikiran tersebut, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan perlu berfokus pada karakter kebangsaan melalui latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya dan kondisi sosial, politik, ekonomi dari berbagai kelompok etnis. Informasi ini harus komprehensif, analitis, dan komparatif, dan harus memasukkan persamaan dan perbedaan di antara kelompok-kelompok yang ada. Pengetahuan tentang pluralisme budaya merupakan dasar yang diperlukan untuk menghormati, mengapresiasi, menilai dan menghargai keberagaman dalam keberbedaan (*politic of recognition*). Fokus selanjutnya adalah penanaman rasa kebangsaan melalui kepemilikan nilai moral dan nilai-nilai kebangsaan sekaligus dua basis nilai tersebut mempribadi dan kemampuan dalam mengaktualisasikannya dalam kehidupan kebangsaan.

Untuk itu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda perlu dirancang sebagai wahana sistemik dengan tujuan : (1) mengembangkan potensi afektif generasi bangsa

sebagai warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; (2) mengembangkan perilaku generasi bangsa melalui kepemilikan dan kepribadian nilai-nilai budaya bangsa; (3) mengembangkan kemampuan generasi bangsa menjadi nasionalis berwawasan kebangsaan.

Bila ditilik kandungan isi dari tujuan di atas, pendidikan karakter bukan semata berbobot pada *transfer of knowledge* tetapi juga bermuatan *transfer of values*. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dalam aktualisasinya harus bersumber pada nilai-nilai luhur, seperti nilai agama, nilai ideologi Pancasila, dan nilai budaya. Dalam hal ini PUSKUR (2010) menjelaskan nilai-nilai dalam pendidikan karakter dikembangkan dengan bersumber pada:

- a. *Agama*: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama. Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
- b. *Pancasila*: negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi

dan kemasyarakatan diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan dan kemauan, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupannya sebagai warga negara.

- c. *Budaya*, adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Melalui pendidikan Karakter berbasis nilai-nilai diharapkan pendidikan karakter bagi generasi bangsa dapat mengembalikan peran generasi bangsa dalam pembangunan karakter bangsa, yakni perannya sebagai patriotis, nasionalis yang inklusif, intelektualis yang moralis. Dengan bersumber pada nilai luhur bangsa dan tiga kompetensi di atas, pendidikan karakter sebagai wahana program sistemik pembelajaran moral dan kebangsaan, dapat turut membentuk karakter generasi bangsa yang mampu: (1) mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dan menghargai keberagaman agama, suku, ras, dan golongan sosial-ekonomi lainnya; (2) mematuhi aturan-aturan, norma dan peraturan hukum yang berlaku; (3) kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah sosial-budaya bangsa (4)

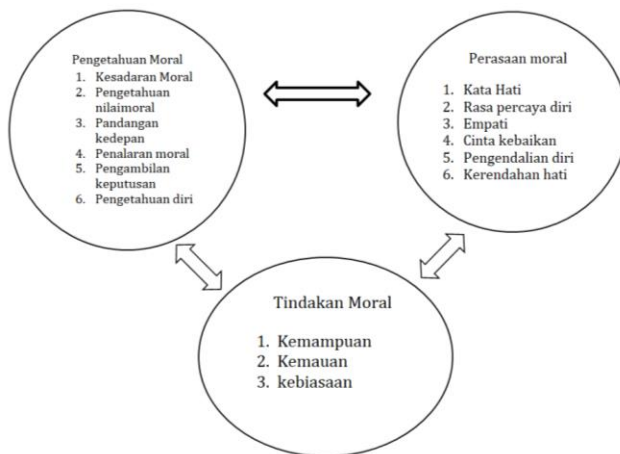
demokratis dengan menghargai keberbedaan dan mau menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan bangsa; (5) mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; (6) memiliki nasionalisme yang tinggi dan kesetiaan terhadap NKRI; (7) memiliki nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai jatidiri kebangsaannya.

Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter bagi generasi bangsa memerlukan strategi pembelajaran yang berprinsip pada: bermakna (*meaningful*) bagi perannya sebagai figur generasi bangsa, integratif (*integrative*) bagi perannya dalam membangun persatuan dan kesatuan, berbasis nilai (*value based*) bagi perannya sebagai gerakan moral, menantang (*challenging*) bagi perannya dalam menyongsong masa depan, dan aktif (*active*) bagi perannya sebagai dinamisator pembangunan bangsa. Pendidikan Karakter diharapkan dapat membekali generasi bangsa dengan seperangkat pengetahuan (*knowledge*), sikap (*disposition*) yang berpangkal pada kebajikan (*virtues*) dengan sejumlah nilai-moral didalamnya serta keterampilan (*skill*), sebagai kompetensi yang dapat berkontribusi bagi eksistensi dan kemajuan hidup bangsa dan negara.

3. Desain Pendidikan Karakter Berbasis Kecerdasan Moral

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat

dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang dibuatnya (Suyatno, 2009). Pendidikan karakter pada hakekatnya adalah pendidikan nilai (Kirschenbaum, 2000; Goleman, 2001) yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut pandangan Lickona (1992), pendidikan nilai/moral yang menghasilkan karakter, didalamnya terkandung tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yakni: pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*) dan perbuatan moral (*moral action*) sebagaimana tergambar berikut ini:



Sumber: Lickona (1992)

Ketiga komponen ini di atas, dalam aplikasi pendidikan karakter harus terbangun secara terkait. *Moral knowing* yang meliputi: kesadaran moral, pengetahuan nilai-moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan dan

pengetahuan diri, adalah hal esensial yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Namun, pendidikan karakter sebatas *moral knowing* tidaklah cukup. Untuk itu perlu berlanjut sampai pada *moral feeling* yang meliputi: kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri dan kerendahan hati. Bahkan terus berlanjut pada tahap yang paling penting yakni *moral action*. Disebut penting karena pada tahap ini motif dorongan seseorang untuk berbuat baik, nampak pada aspek kompetensi, keinginan dan kebiasaan yang ditampilkannya. Ketersusunan tiga komponen moral yang saling berhubungan secara sinergis, menjadi syarat aktualisasi pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik. Kecerdasan moral (*moral intelligence*) adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah dengan keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinannya tersebut dengan sikap yang benar serta perilaku yang terhormat (Borba, 2008: 4). Pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral menjadi sesuatu yang urgen, karena kecerdasan moral terbangun dari beberapa kebajikan utama yang kelak akan membantu peserta didik dalam menyikapi dan menghadapi tantangan hidup yang penuh dengan kontradiktif. Lebih lanjut, Borba (2008: 7) menguraikan tujuh kebajikan utama yang perlu dimiliki peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan moral, yakni: empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan.

Dengan desain pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral yang diaktualisasikan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan

memiliki sejumlah kebajikan utama yang berguna bagi dirinya dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral merupakan upaya pengembangan kemampuan peserta didik yang berorientasi pada pemilikan kompetensi kecerdasan plus karakter.

Agar pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral dapat terlaksana secara efektif, maka perlu didesain pengkondisian moral (*moral conditioning*) sebagai tahap awal implementasi. Menurut Lickona (1991: 187-189; 220-221), ada sebelas prinsip agar pendidikan karakter dapat terlaksana secara efektif: (1) mengembangkan nilai-nilai universal sebagai fondasi; (2) mendefinisikan karakter secara komprehensif yang mencakup aspek pikiran, perasaan dan perilaku; (3) menggunakan pendekatan yang komprehensif dan proaktif; (4) menciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian; (5) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tindakan moral; (6) membuat kurikulum akademik yang bermakna; (7) mendorong motivasi peserta didik; (8) melibatkan seluruh komponen sekolah sebagai komunitas pembelajaran moral; (9) menumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral; (10) melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra; dan (11) mengevaluasi karakter sekolah baik terhadap staf sekolah sebagai pendidik karakter maupun peserta didik dalam memanifestasikan karakter yang baik.

Desain pengkondisian moral di atas, pada konteks mikro mensyaratkan pendidikan karakter di

sekolah dapat diaktualisasikan melalui empat pilar, yakni: (1) kegiatan belajar mengajar di kelas, dengan mengimplementasikan pendidikan karakter yang menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran (*embeded approach*); (2) kegiatan keseharian dalam bentuk penciptaan budaya sekolah (*school culture*); (3) kegiatan ko kurikuler dan atau ekstrakurikuler; dan (4) kegiatan keseharian di rumah dan dalam masyarakat (Katresna72, 2010: 9). Dari desain ini, menunjukkan bahwa dalam pendidikan karakter mengharuskan adanya tiga basis desain dalam pemrogramannya yang terbagi menjadi: (1) desain pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan peserta didik sebagai pembelajar di dalam kelas. Konteks pendidikan karakter adalah proses relasional komunitas kelas dalam konteks pembelajaran; (2) desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter peserta didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri peserta didik; dan (3) desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Dalam mendidik, komunitas sekolah tidak berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan peserta didik.

Pendidikan karakter hanya akan bisa efektif jika tiga desain pendidikan karakter ini dilaksanakan secara simultan dan sinergis. Melalui desain seperti ini, diharapkan pendidikan karakter dapat berperan

dalam mengembangkan kecerdasan moral secara komprehensif dan berkelanjutan.

4. *Moral Training* sebagai Strategi Pengembangan Kecerdasan Moral

Pengkondisian moral sebagai tahap awal implementasi pendidikan karakter pada konteks mikro, perlu dilanjutkan ke tahap latihan moral (*moral training*). Namun pengkondisian moral dalam pendidikan karakter belum sempurna, manakala desain pendidikan karakter berbasis kelas masih didominasi pembelajaran konvensional. Artinya, sebaik apapun pengkondisian moral dirancang dalam rangka mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral, tidak akan efektif jika kegiatan belajar-mengajar di kelas guru masih menampilkan ciri: *teacher centered*, dominasi ekspositori, berorientasi tekstual, berorientasi pada kognitif tingkat rendah dan *transfer of knowledge*. Desain *moral training* dalam mengembangkan kecerdasan moral, menuntut bergesernya pembelajaran konvensional ke arah pembelajaran inovatif. Mengapa demikian? Karena pendidikan karakter dengan pola pembelajaran konvensional, hanya akan mengajarkan pendidikan moral sebatas tekstual semata dan kurang mempersiapkan peserta didik untuk menyikapi kehidupan yang kontradiktif (Zubaedi, 2011: 2). Untuk itu, sekolah sebagai salah satu pengemban pendidikan karakter sudah saatnya berbenah secara kreatif mengembangkan pembelajaran inovatif. Pergeseran pembelajaran konvensional ke arah pola pembelajaran inovatif menjadi syarat dalam pendidikan karakter untuk dapat mengembangkan kecerdasan moral secara efektif. Pergeseran yang

dimaksud, dapat ditampilkan seperti pada tabel berikut:

Pembelajaran Konvensional	Pembelajaran Inovatif
Pendekatan <i>Teacher Centered</i>	Pendekatan <i>Student Centered</i>
Dominasi Ekspositori	Multi model dan metode
Minim media	Multimedia
<i>Textbook Center</i>	Multi sumber belajar
Pembelajaran Verbalistik	Pembelajaran Konstektual
Evaluasi dominasi kognitif tingkat rendah (C1, C2)	Evaluasi: Kognitif, Afektif dan Psikomotor
Posisi guru sebagai <i>transfer of knowledge</i>	Posisi guru sebagai <i>director of learning</i>

Sumber: Setiawan (2012)

Pembelajaran inovatif dalam pendidikan karakter, dirancang untuk menghasilkan kegiatan belajar-mengajar yang lebih efektif dan bermakna. Pembelajaran inovatif menjadi kondisi kondusif dalam melatih moral untuk mengembangkan kecerdasan moral peserta didik. *Moral training* merupakan bagian strategi pengembangan kecerdasan moral yang penting. Melalui *moral training*, pendidikan karakter tidak terhenti sebatas *moral knowing* tetapi berlanjut pada tahap *moral feeling* dan *moral action* yang secara sinergis berkontribusi terhadap pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Penerapan *moral training* dalam pembelajaran inovatif pada pendidikan berbasis karakter diharapkan dapat: (1) mengembangkan kecerdasan moral secara komprehensif; (2) memberi

pengalaman belajar bervariasi dengan suasana belajar yang menyenangkan; (3) peserta didik lebih kritis dan kreatif; (4) meningkatkan kematangan emosional; dan (5) mau berpartisipasi dalam proses perubahan. *Moral training* menjadi lebih penting, ketika dikaitkan dengan tujuan pendidikan moral yang hendak dicapai. Menurut Frankena (Adisusilo, 2012: 128), tujuan pendidikan moral mencakup: (1) membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan tingkah-laku yang secara moral baik dan benar; (2) membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan refleksi secara otonom,...; (3) membantu peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral, norma-norma dalam menghadapi kehidupan konkretnya; (4) membantu peserta didik untuk mengadopsi prinsip-prinsip universal, nilai-nilai kehidupan sebagai pijakan untuk pertimbangan moral dalam menentukan suatu keputusan; dan (5) membantu peserta didik untuk mampu membuat keputusan yang benar, bermoral, dan bijaksana.

Paparan di atas, sekaligus menunjukkan bahwa pergeseran pola pembelajaran dari konvensional ke inovatif dalam melatih moral peserta didik, menuntut guru secara profesional untuk dapat menguasai berbagai pendekatan, model, strategi, metode, teknik, berikut komponen lainnya, dalam kegiatan belajar-mengajar yang kemudian diskenariokan dalam rencana program pembelajaran.

Sekaitan dengan keterhubungan antara pembelajaran inovatif dengan pendidikan karakter, sudah selayaknya seorang guru profesional mampu merancang RPP berkarakter sebagai skenario *moral training* dalam mengembangkan kecerdasan moral

peserta didik. Dalam menyusun RPP berkarakter, guru sebagai aktor pendidik karakter dapat berpedoman pada deskripsi nilai-nilai karakter utama sebagai berikut:

No	Nilai Karakter	Indikator	
1	Taqwa	1	mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan.
		2	bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah
		3	mengerjakan setiap perintah agama dan menjauhi larangannya.
		4	menyesal setiap membuat kesalahan dan segera mohon ampun kepada Tuhan.
		5	menolak setiap ajakan untuk melakukan perbuatan tercela.
2	Jujur	1	berkata benar (tidak bohong).
		2	berbuat sesuai aturan (tidak curang).
		3	menepati janji yang diucapkan.
		4	bersedia menerima sesuatu atas dasar hak
		5	menolak sesuatu pemberian yang bukan haknya.
		6	berpihak pada kebenaran.
		7	menyampaikan pesan orang lain.
		8	satunya kata dengan perbuatan.

No	Nilai Karakter	Indikator	
3	Disiplin	1	patuh pada setiap peraturan yang berlaku.
		2	patuh pada etika sosial/ masyarakat setempat
		3	menolak setiap ajakan untuk melanggar hukum.
		4	dapat mengendalikan diri terhadap perbuatan tercela.
		5	hemat dalam menggunakan uang dan barang.
		6	menyelesaikan tugas tepat waktu.
		7	meletakkan sesuatu pada tempatnya.
	8	dapat menyimpan rahasia.	
4	Demokratis	1	bersedia mendengarkan pendapat orang lain.
		2	menghargai perbedaan pendapat
		3	tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
		4	toleran dalam bermusyawarah diskusi.
		5	bersedia melaksanakan setiap hasil keputusan secara bersama.
		6	menghargai kritikan yang dilontarkan orang lain.
		7	membuat keputusan yang adil.
5	Adil	1	memperlakukan orang lain atas dasar kebenaran.

No	Nilai Karakter	Indikator	
		2	mampu meletakkan sesuatu menurut tempatnya.
		3	tidak ingin lebih atas sesuatu yang bukan haknya.
		4	membela orang lain yang diperlakukan tidak adil.
		5	memperlakukan orang lain sesuai haknya.
		6	tidak membedakan orang dalam pergaulan.
		7	menghargai kerja orang lain sesuai hasil kerjanya.
6	Bertanggung Jawab	1	menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan sampai tuntas. .
		2	tidak mencari-cari kesalahan orang lain.
		3	berani menanggung resiko terhadap perbuatan yang dilakukan.
		4	bersedia menerima pujian atau celaan terhadap tindakan yang dilakukan.
		5	berbicara dan berbuat secara berterus-terang (tidak seperti ungkapan, lempar batu sembunyi tangan).
		6	melaksanakan setiap keputusan yang sudah diambil dengan tepat dan bertanggung

No	Nilai Karakter	Indikator	
			jawab.
7	Cinta tanah air	1	merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia.
		2	bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa.
		3	peduli terhadap rusaknya hutan/lingkungan di tanah air.
		4	bersedia memelihara lingkungan dan melindungi flora dan fauna Indonesia.
		5	dapat menyimpan rahasia negara.
		6	mau hidup dimanapun di wilayah negara kesatuan Indonesia.
8	Orientasi pada keunggulann	1	gemar membaca.
		2	belajar dengan bersungguhsungguh. .
		3	mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sebaik mungkin.
		4	berupaya mendapat hasil yang terbaik.
		5	senang dalam kegiatan yang bersifat kompetitif.
		6	tidak cepat menyerah mengerjakan sesuatu yang mengandung tantangan.
		7	memiliki komitmen kuat dalam berkarya.

No	Nilai Karakter	Indikator	
		8	menjaga din hidup sehat.
9	Gotong Royong	1	memahami bahwa kerjasama merupakan kekuatan.
		2	memahami hasil kerjasama adalah untuk kebaikan bersama.
		3	dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan bersama.
		4	dapat melaksanakan pekerjaan bersama dengan cara yang menyenangkan.
		5	bantu-membantu demi kepentingan umum.
		6	bersedia secara bersama-sama membantu orang lain.
		7	bersedia secara bersama-sama membela kebenaran.
		8	dapat bekerja dengan giat dalam setiap kelompok kerja.
10	Menghargai	1	mengucapkan terima kasih atas pemberian atau bantuan orang lain.
		2	santun dalam setiap kontak sosial.
		3	menghormati pemimpin dan orang tua.
		4	menghormati simbol-simbol negara.
		5	tidak mencela hasil karya

No	Nilai Karakter	Indikator	
			orang lain.
		6	memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin.
		7	tidak mengganggu orang yang sedang beribadah menurut agamanya.
11	Rela Berkorban	1	mau mendengarkan teman berbicara sampai selesai walaupun ada keperluan lain yang mendesak.
		2	bersedia membantu teman orang lain yang mengalami musibah.
		3	ikhlas bekerja membantu orang lain dan harus meninggalkan pekerjaan sendiri untuk sementara.
		4	bersedia menyumbang untuk kepentingan dana kemanusiaan dalam keuangan pribadi sangat terbatas.
		5	rela memberi fasilitas (kemudahan) kepada orang lain sungguh pun secara diri sendiri sangat membutuhkan fasilitas tersebut.
		6	mau memperjuangkan kepentingan orang lain walaupun mengandung resiko untuk diri sendiri.

Beberapa nilai karakter pada tabel, dapat dikemas melalui penerapan model-model pembelajaran inovatif dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik. Ada begitu banyak model-model pembelajaran dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tanpa mengecilkan arti model-model pembelajaran yang begitu banyak, guru dapat menggunakan model analisis nilai sebagai salah satu modifikasi yang termasuk ke dalam Values Clarification Technique (VCT). Hall (1973:11) menjelaskan bahwa VCT sebagai *"by values clarification we mean a methodology or process by which we help a person to discover values through important choices he has made and is continually, in fact, acting upon in and through his life"*. Melalui VCT, peserta didik dilatih untuk menentukan nilai-nilai hidup yang tepat sesuai dengan tujuan hidupnya dan menginternalisasikannya ke dalam pribadi sebagai pedoman dalam bernalar, bersikap dan berperilaku moral. *Moral training* dengan VCT dinilai pas dalam menerapkan pembelajaran nilai, dan dapat dimodifikasi secara kreatif oleh guru dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik, seperti pada contoh di bawah ini:

1. Menginformasikan topik;
2. Menginformasikan langkah kegiatan, dengan langkah-langkah, seperti:
memberi contoh masalah/kasus yang bertentangan dengan topik → mengkaji nilai yang terkait dengan esensi contoh kasus → Menguji komitmen peserta didik terhadap suatu nilai tertentu → memberikan penguatan terhadap komitmen peserta didik;

3. Meminta peserta didik mengemukakan contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan sikap sesuai topik dari media massa, ilustrasi, dan pengalaman;
4. Menugaskan peserta didik menganalisis kasus dengan menunjukkan berbagai nilai yang terkait;
5. Menugaskan peserta didik mendiskusikan nilai yang terkait dengan suatu kasus;
6. Merumuskan dan melaporkan hasil diskusi dengan menggunakan format model analisis nilai, seperti contoh berikut:

Kelompok	Media-Stimulus	Kategori Nilai Karakter	Kecerdasan Moral
Nama Kelompok	Gambar, foto, lagu, film, puisi, cerita, kasus yang mengandung dilema moral	Esensi nilai-nilai karakter (Pilih salah satu nilai karakter yang ada pada tabel)	Penalaran terhadap indikator-indikator karakter (<i>moral knowing, moral feeling, dan moral action</i>)

7. Silang pendapat secara klasikal;
8. Ajukan pertanyaan secara klasikal;
9. Menugaskan peserta didik mengemukakan contoh-contoh akibat tindakan seseorang yang bertentangan dengan nilai esensial.

Langkah-langkah *moral training* dalam pembelajaran VCT di atas, dapat dirancang dengan memberikan media-stimulus, seperti: (1) gambar-gambar yang sarat dengan pesan moral dan berkaitan dengan materi pembelajaran; (2) pemanfaatan musik/lagu yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam berlatih moral; (3) penayangan

film yang mengisahkan nilai-nilai kehidupan; (4) memanfaatkan cerita, puisi dan karya sastra lainnya yang mengandung nilai-nilai moral; dan (5) kasus-kasus yang berisi masalah-masalah kehidupan yang sarat dengan dilema moral.

C. Penutup

Pendidikan formal sebagai wahana sistemik pembangunan karakter bangsa belum memberikan luaran optimal terhadap pembentukan karakter peserta didik. Hal ini diduga karena dunia pendidikan hingga saat ini lebih cenderung mementingkan capaian kompetensi akademik ketimbang capaian kompetensi karakter. Untuk itu, usulan adanya pendidikan karakter yang teraktualisasikan secara integralistik sebagai wahana sistemik pengembangan kecerdasan moral (*building moral intelligence*), perlu mendapat dukungan berbagai pihak dalam menghasilkan luaran peserta didik yang memiliki kompetensi kecerdasan plus moral. Usulan ini menuntut pendidikan formal sebagai pengembangan pendidikan karakter, melakukan upaya keratif dengan menggeser pembelajaran konvensional ke arah pembelajaran inovatif. Pendidikan karakter dengan pola pembelajaran konvensional, hanya akan mengajarkan pendidikan moral sebatas tekstual semata dan kurang mempersiapkan peserta didik untuk menyikapi kehidupan yang kontradiktif. Dengan demikian dalam konteks mikro, pola pembelajaran inovatif menjadi syarat dalam mengaplikasikan pendidikan karakter untuk dapat mengembangkan kecerdasan moral secara efektif.

Menghadapi tuntutan di atas, pendidikan formal sebagai institusi pengembangan pendidikan karakter perlu melakukan pembenahan diri. Desain peran pendidikan

karakter dengan pola integralistik dalam mengembangkan kecerdasan moral akan berjalan efektif dan bermakna, melalui upaya kreatif pihak sekolah dalam merancang pengkondisian moral (*moral conditioning*) dan aplikasi melatih moral (*moral training*) secara komprehensif, sistemik dan berkelanjutan.

BAB VI

ETIKA KEWARGANEGARAAN

PERSPEKTIF GLOBAL

A. Pendahuluan

Konsep moral yang telah dipaparkan sebelumnya merujuk nilai yang tertuang dari perbuatan manusia yang sesuai dengan kaidah atau norma. Hal ini tampak pada pengertian nilai manusia yang dikategorisasikan baik atau buruk dari apa yang telah dilakukan. Artinya moral identik dengan wujud perbuatan atas apa yang telah dipahami atau bentuk refleksi. Berkaitan dengan kategori perilaku manusia itu maka ada kaidah yang menjadi perenungan atas refleksi tersebut yang masih dalam kaitan erat dengan moral yaitu etika.

Etika acap kali disamaartikan dengan moral, kendatipun memiliki kesamaan maksud yang berorientasi dengan sikap atau perilaku manusia, namun etika bermuara pada telaah berfikir atas apa yang akan dikehendaki. Artinya sebelum manusia berkehendak, kehendak tersebut dimanajemen oleh perenungan atau refleksi yang dalam atas daya berfikir tentang pertanyaan baik/buruk, benar/salah yang dimaksud kategori manusia berkehendak.

Kepatutan akan manusia berkehendak dalam kategorisasi kolektif (moralitas) maka manusia akan dikepong oleh segala pertimbangan-pertimbangan yang argumentatif dan kritis. Pertimbangan inilah akhirnya dinamakan ruang dialogis etika dalam telaah ilmu atau teorinya orang berperilaku dalam segala perbuatannya.

Bertens (2004), mengatakan etika sebuah cara untuk menyelidiki perilaku manusia, yang akhirnya jatuh pada pilihan sesuatu yang dianut dan diwariskan terus menerus dan menjadi standar perilaku yang dilebelkan menjadi kepatutan, yang ideal dan yang diterima. Oleh karena itu, etika akan membangun kebiasaan, prinsip dan tradisi manusia dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupannya. Sedangkan Suseno (2016), mendefenisikan etika yang berasal dari kata *ethos* yang berarti watak, yaitu sebuah '*ilm* (bukan ajaran), cabang filsafat atau pemikiran yang kritis dan mendasar tentang ajaran moral, nilai baik/buruk, mengajari tentang orientasi hidup. Etika merupakan kelompok filsafat praktis tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Lebih lanjut, Suseno (1987) mengutarakan bahwa etika sebagai ilmu yang mencari orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang amat fundamental, "bagaimana saya harus hidup dan bertindak".

Mencoba menelusuri akan apa yang dilakukan manusia dalam segala tindakan dan upaya hidup atau mempertahankan hidupnya, maka manusia tidak melepaskan diri terhadap pertimbangan-pertimbangan standar kepatutan manusia. Berkaitan dengan itu, etika menjadi sesuatu hal yang suci dalam membedah segala hal-ikhwal tentang baik dan benar. Pada prakteknya dalam sebuah kehidupan manusia memiliki keragaman perilaku. Ini memungkinkan konsep keidealan dibangun atas tafsir manusia itu sendiri tetapi tidak melepaskan akan pertimbangan yang lain, untuk itu pertimbangan tersebut harus beroreintasi terhadap kepatutan yang kolektif atau motaliras.

Pada masyarakat global yang menitik beratkan pada persoalan dunia, akhirnya manusia jatuh pada

pilihan standar etis dunia yang menjadi pijakan manusia melangkah pada pergaulan global. Mencatatkan namanya pada interaksi dan komunikasi umat tanpa batas (agama, ideologi dan warga global) maka dirinya akan mengupgrade kesadaran prinsip yang telah diyakini sebagai bentuk nilai warisan atau kemampuan untuk mendaur nilai yang di pedomani sebagai standar moralitas manusia modern yang bergaul secara global. Namun disisi lain cakap menjadi warga global menjadi tuntutan atas konsekuensi kemajuan teknologi di era sekarang ini.

Dalam pembahasan ini etika kewargaan mengarah pada etika global yang menjadi isu masyarakat tanpa batas, khususnya di era digital dampak dari pada teknologi yang diciptakan manusia menjadi alat atau media dalam bergaul, beradaptasi dan mempertahankan dirinya sebagai manusia dunia.

B. Pembahasan

Perkembangan kehidupan manusia beriringan dengan masalah dan keanekaragaman yang ditemuinya, terkait perilaku manusia tetap menjadi daya pertimbangan sendiri dalam keberlangsungan kehidupan yang terus berkelanjutan dan mewariskan. Maka etika memungkinkan akan bergeser pada pola pemahaman itu sendiri, karena etika akan berhadapan pada persoalan baru dan kemungkinan tidak dapat dijawab oleh konsep lama (standar moralitas baku) artinya etika tidak lagi dirujuk dari yang telah dibakukan melainkan akan di-*upgrade* dengan segala pertimbangan dengan ruang dialogis fenomena. Misalnya di era digital atau manusia elektronik yang kian masif mengurung pada persoalan yang kompleks dalam segala pertimbangan moral dalam

dialog antar-agama, antar-ideologi, antar-warga global (kosmopolitan). Maka standar moral baku akan di daur menjadi sebuah konsep etika global yang berusaha menggapai titik temu antara berbagai ruang dialogis manusia yang bervariasi dalam segala masalah dan dapat merujuk pertimbangan ideal bersama sebagai warga global.

Kung (1991), salah seorang tokoh yang mencoba menelusuri titik temu warga global dengan segala kompleksitas kehidupannya dimulai dari suatu realitas yang konkrit dan fleksibel. Misalnya mengintai persoalan terorisme, konflik, agama dan ideologi yang tidak dijumpai akar masalahnya, dan salah satu hal mendasar adalah adanya standar yang berseberangan diantaranya. Maka perlu ada sebuah konsensus global yang membangun konsep lintas atau antar yang berpotensi membangun persoalan dunia. Untuk menangkis musibah global akibat perilaku manusia maka harus mengacu kepada konsep manusia etis yang bertanggung jawab dari manusia yang bebas etik/nilai (tidak bermoral), kemudian menuju manusia global yang melepaskan budaya teknokrasi, berorientasi kepada industri yang ramah lingkungan dari pada merusak lingkungan, menuju tatanan demokrasi berkeadilan dan kebebasan lalu beranjak dari demokrasi legal.

Patut disadari etika global pada masyarakat moderen tidak mengesampingkan urusan ekonomi dunia dalam keadilan kesejahteraan umat manusia. Karena pergerakan ekonomi akan mempengaruhi hubungan sosial masyarakat, hal ini tercatat pada perjalanan manusia di dalam buku-buku transformasi manusia dari zaman klasik hingga sekarang. Karenanya cabang maupun sentral produksi yang mengglobal mampu

membangun pandangan dan pola hubungan antar manusia yang memanusiakan.

Orientasi manusia berfikir acap kali dipengaruhi oleh nilai transaksi ekonomi yang berkuat pada persoalan hidup manusia, ini yang akhirnya mempengaruhi hubungan antar-manusia. Ketimbangan pada persoalan alamiah manusia dalam hubungan sebab-sebab yang lain. Karena cara pandang ini lebih realitas dan konkrit. Maka etika pada posisi ini memandang harus menunjukkan diri sebagai reaksi kepedulian antar sesama manusia (global) yang mendasar pada pengetahuan objektif tentang ketimpangan/kontradiksi yang ada (ekonomisasi).

Soyomukti (2011), mengatakan dalam konsep warga global memandang bagaimana orang tidak mungkin akan memiliki patokan etis kalau tidak didahului dengan penilaian tentang mana yang baik-dan buruk. Kualitas dapat dilihat dari bentuk-bentuk hubungan material yang ada dalam kenyataan sehari-hari. Kesadaran tentang permasalahan akan membuat orang menilai apakah masyarakat sekarang ini akan berjalan menuju humanitas atau dehumanitas. Struktur objektif adalah tempat individu-individu dalam masyarakat saling berhubungan dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kebutuhan hidupnya. Apabila hubungan itu saling mendukung dan memenuhi (kerja sama), masyarakat berjalan secara harmonis. Apabila dalam hubungan ekonomis itu terjadi konflik, dapat dipastikan secara sosial-politik dan budaya (bahkan agama) akan terjadi konflik secara terus-menerus. Lebih lanjut dijelaskan dalam perilaku yang dibangun dalam konsep etika global adalah semacam patokan budi yang lahir dari cara memandang realitas kemiskinan, sebab-

sebab objektifnya, dan imbasnya bagi disharmoni sosial, budaya, agama, dan etnisitas yang sangat rawan terjadi di era ini. Etika global tidak hanya mencari titik temu antara berbagai macam kekayaan lokalitas yang terbangun dan mendukung keragaman budaya manusia, tetapi juga mencari titik temu untuk mengatasi kontradiksi (ketidakadilan) global yang manifes dalam hubungan ekonomi-politik.

Kaidah toleransi yang didefenisikan dalam etika global yang menjebatani hubungan antar-sesama manusia adalah watak yang dicita-citakan oleh pendukung etika global atau komunitas moderen. Toleransi menjadi sebuah dimensi psikologis berupa harapan perasaan dan berfikir terhadap realitas dan hubungan antar-sesama manusia. Maka makna toleransi menjadi kepekaan rasa dan memandang manusia lain sebagai bagian dari dirinya atau memanusiation manusia yang saling berkaitan dalam usaha mempertahankan hidupnya dan fakta nyata manusia saling ketergantungan satu dengan yang lain sekalipun memiliki sikap mandiri namun kolaborasi menjadi sesuatu yang niscaya dalam keberlangsungan hidup didunia nyata ini.

Bahá'u'lláh dalam karyanya Soyomukti (2011), menjelaskan sebuah peringatan, *"The well-being of mankind, its peace and security, are unattainable unless and until its unity is firmly established* (umat manusia, kedamaian dan keamanannya, hanya atas suatu pondasi kesatuan sejati, harmoni dan pemahaman antara manusia dari bermacam-macam bangsa di dunia, masyarakat global yang berkelanjutan bisa dicanangkan)." Dapat kita fahami manusia yang mencatatkan namanya sebagai umat global harus mampu memetik etika global sebagai konsekuensi dari

globalisasi yang berpotensi memiskinkan manusia dan juga dapat menimbulkan rasa solidaritas untuk memecahkan persoalan-persoalan lain akibat ketidakadilan global. Globalisasi akan mengarah pada adanya kewarganegaraan global (*world citizenship*) melampaui identitas bangsa, suku, dan agama untuk menyikapi isu-isu global dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Aristoteles seorang filsuf yang berkuat objek manusia memaparkan etika menjadi hal yang suci karena bersifat teologis yang memiliki arah dan tujuan. Lebih tegas lagi ia mengatakan bahwa segala sesuatu tentang manusia pasti memiliki cita-cita dan maksud yang dituju. Sehingga apa yang diraih manusia dalam segala hal memiliki tujuan oleh karenanya kecakapan sikap, perilaku dan pengatuhuaanya memiliki arti penting sebagai orientasi dari tujuan tersebut. Imbuhnya lagi etika yang baik adalah berpusat pada karakter atau watak/kepribadian.

Dalam bahasa ilmu sosial modern, menurut M. Newcomb dalam bukunya Soerjono (1985), kepribadian merupakan organisasi dari sikap-sikap (*predispositions*) yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perikelakuan. Kepribadian menunjuk pada organisasi dari sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan secara khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Oleh karena kepribadian tersebut merupakan abstraksi dari individu dan kelakuannya sebagaimana halnya dengan masyarakat dan kebudayaan, ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan yang saling memengaruhi satu dengan lainnya baik dalam ranah pengetahuan, sikap dan perilakunya.

Majuanya kehidupan manusia dalam teknologi akan mempengaruhi realitas kehidupannya dalam ketiga ranah tersebut, dalam persepektif manusia yang berdialog tanpa batas (warga global) akan berkontribusi pada karakter dan kepribadian. Menurut Borba (2008), karakter yang dibangun lewat kecerdasan moral (*moral intelligence*) adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah dengan keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinannya tersebut dengan sikap yang benar serta perilaku yang terhormat.

Menurut Soyomukti (2011), istilah karakter juga menunjukkan bahwa tiap- tiap sesuatu memiliki perbedaan. Dalam istilah modernnya, tekanan pada istilah perbedaan (*distinctiveness*) atau individualitas (*individuality*) cenderung membuat kita menyamakan antara istilah “karakter” dengan “personalitas” (kepribadian). Memiliki karakter berarti memiliki kepribadian. Karakter diartikan sebagai totalitas nilai yang mengarahkan manusia dalam menjalani hidupnya. Jadi, ia berkaitan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang matang dan dewasa biasanya menunjukkan konsistensi dalam karakternya. Ini merupakan akibat dari keterlibatannya secara aktif dalam proses pembangunan karakter. Jadi, karakter dibentuk oleh pengalaman dan pergumulan hidup. Orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan baik dan konsisten adalah orang yang baik. Setiap tindakan tidak dianggap sebagai suatu tindakan yang terisolasi (seperti yang sering dilakukan dalam sistem etika lainnya), tetapi dalam hubungan dengan gagasan yang baik. Sikap terhadap etika ini disebut “Etika Kebajikan” atau etika yang berpusat pada watak: tindakan-tindakan setiap orang harus membuat orang itu lebih baik dan

membangun watak yang lebih baik pula. Dengan demikian, etika dapat membantu masyarakat mengatasi persoalan-persoalan moral yang dihadapinya dalam kehidupan kongkritnya. Etika menjadi batu pijakan dalam menentukan sikap terhadap dilema moral yang dihadapinya. Secara sederhana etika dalam konteks kewarganegaraan dapat diartikan sebagai landasan atau patokan bagaimana warga negara Indonesia dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat (Pasandaran:2016).

Berkaitan dengan etika, pemerintah melalui TAP MPR No. VI/MPR/2001 telah mengeluarkan kebijakan untuk internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa sesuai dengan kaidah-kaidah berikut.

1. Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya.
2. Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi.
3. Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.
4. Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.
5. Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

C. Penutup

Meminjam pemikiran Plato yang mengidealkan sebuah konsep masyarakat dengan membangun sistem pemerintahan bergaya Aristokrasi di jajaran ketatanegaraan. “Republic” adalah karyanya yang termashur, republik yang diidam-idamkan dengan sistem aristokrasi yang dimaksud adalah aristokrasi kepiawaian atau kecakapan seorang ahli atau pakar yang mumpuni dibidangnya. Tidak menitik beratkan pada warisan atau kerabat dekat. Kepiawaian yang dimaksud Plato adalah mereka yang siap secara bekal dengan potensi yang dimilikinya menjadi kaum bijak di negerinya. Bukan berangkat dari pemungutan suara kolektif melainkan proses seleksi kemuliaan bidang dan kesadaran kemampuan.

Berkaitan dengan ide Plato yang diagungkan tersebut serasi dengan bagaimana menjadi manusia global, pemaknaan aristokrasi disini adalah membangun konsep ideal yang bermuara pada manusia yang layak hadir dipergaulan global dengan membangun kesadaran yang menyandra keegoan yang berpihak pada individu atau kelompok tertentu berdasarkan suara yang menggelembung, melainkan menyerahkan kepada konsensus global yang disepakati dan mampu diterima oleh mereka para tamu yang mencatatkan namanya sebagai warga global.

Menyiapkan standar kepatutan dan keidealan sebagai warga global menjadi barometer yang menjadi pertimbangan bernilai etis yang memanusiaikan manusia. Kepiawaian manusia global menjadi ukuran kemuliaan yang patut di jadikan norma “etika global”. Karena aktivitas manusia bertindak secara terus menerus tanpa henti sehingga melahirkan nilai yang dapat diterima bagi

para pengguna *global community*. Artinya setiap tindakan tersebut harus memenuhi standar atau kriteria normatif tertentu (warga global). Bahwa manusia bertindak itu normal yang menggambarkan eksistensi manusia secara mendalam, karena tindakan manusia tidak hanya berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk hidup, melainkan juga mencetuskan nilai-nilai manusiawi yang akhirnya membentuk karakter atau kepribadian.

Karakter atau kepribadian harus memenuhi syarat moral atau dialogis etika yang disuguhkan. Maurice Blondel (Dewantara, 2017), mengatakan bahwa tindakan manusia adalah representasi dirinya yang paling umum. Selain yang paling umum, tindakan manusia juga merupakan representasi dirinya yang paling lengkap. Dengan tindakannya, manusia menghadirkan dirinya secara mempesonakan. Lebih lanjut Blondel menulis, "Tindakan adalah fakta yang paling menyeluruh sekaligus konstan dalam hidupku." Blondel hendak menegaskan bahwa tindakan adalah realitas yang paling meyakinkan perihal siapa dirinya. Jika manusia hendak mengomunikasikan diri kepada sesamanya, Tuhannya, atau siapa pun, dia pasti merealisasikannya dalam tindakan. Hampir tidak ditemukan sarana lain untuk itu selain melalui tindakan. Sudah barang tentu tindakan di sini tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang sembarangan, melainkan tindakan yang sungguh keluar dari dirinya sebagai manusia. Tindakan itu membangun pengalaman. Apa yang disebut dengan pengalaman langsung menunjuk pada rangkaian peristiwa dari suatu perbuatan.

Di era globalisasi berbasis teknologi digital menuntut manusia memiliki kesiapan tindakan yang matang dalam mental percaya diri untuk berinteraksi

maupun berkomunikasi untuk meraih daya hasil dan daya guna secara mandiri dan kolaborasi. Jamaludin mengatakan bahwa kepercayaan diri yang dibangun untuk meraih sesuatu di masa yang akan datang dengan bekal sikap, pengetahuan serta keterampilan. Keyakinan ini dikelola lewat manajemen menakar diri seseorang kemudian mendorong untuk mampu berbuat nilai kebajikan. Nilai moral menjadi perhatian khusus ketika manusia hidup di dalam sebuah tatananan konsensus maka keterampilan sosial menjadi orientasi penting yang harus dimiliki. Kecakapan olah pikir, rasa, karsa dan raga adalah pengejewantahan semangat gotong royong yang dibekali kamandirian yang matang (Jamaludin, dkk., 2020).

Pada dasarnya tindakan manusia dalam karakter global mendayagunakan rasa kemanusiaan yang mengenal batas-batas manusia. Karena di dalam kelompok manusia yang global memiliki variasi gaya interaksi dan komunikasi oleh karenanya media kontrol dan alat kendali yang disiapkan adalah kesadaran sebagai upaya menakar diri sebagai tamu warga global. Menurut Jamaludin sebagai manusia yang berkelompok dari kerumunan sosial dengan media global *internet* akan mempola keadaan manusia hadir menjadi tamu digital untuk bersama dalam kelompok modern yang secara aktif maupun pasif dalam membangun persepsi untuk kediriannya “to know and to be or to have” menjelma dalam situasi dan keadaan baru, kelompok baru, pemikiran baru dan pengalaman baru (Mastuti, dkk., 2020).

Lebih lanjut Jamaludin, dkk. (2020), menegaskan tentang *To know and to be or to have* dapat mencetak karakter manusia bahkan kepada penguatan karakter,

karena hal tersebut sebagai barometer nilai yang terkandung di dalam tamu digital. Dalam teori pemikiran konstruktivisme, manusia dalam konteks sosial yaitu membangun pengetahuan disusun lewat pengalaman dari apa yang diketahui kemudian ditata menjadi pengetahuan yang terhimpun dan tersusun dengan alatnya kendali berfikir. Menyarikan kesadaran akal dalam berpikir *knowledge* akan menuju kepada manusia tentang suatu pesan/makna dari apa yang dipelajari, suatu pengalaman/salinan diri tentang apa yang dilalui dalam kehidupan. Hal ini merupakan rekrutmen dan inventaris secara terstruktur yang bersifat dinamis dan mandiri. Pengetahuan yang terhimpun mampu mempola karakter manusia menjadi sesuatu hal yang dikehendaki, oleh karenanya pengetahuan memiliki peran penting dalam membangun karakter manusia.

BAB VII

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS MULTIKULTURALISME BERORIENTASI NILAI MORAL DALAM KONTEKS MULTIKULTURALISME

A. Pendahuluan

Secara bahasa, istilah “*Civic Education*” oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah “Pendidikan Kewargaan” diwakili oleh Azra dan Tim ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, sebagai pengembang *Civic Education* pertama di perguruan tinggi. Penggunaan istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” diwakili oleh Winataputra dkk dari Tim CISED (*Center Indonesian for Civic Education*), Tim ICCE (2008). Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007:4), mengemukakan bahwa *Citizenship education or civics education didefinisikan sebagai berikut: Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.*

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di

dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai "*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*", maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

PKN sebagai program pendidikan diharapkan dapat menjadikan warga negara yang selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, yaitu menjaga keutuhan bangsa dan mampu hidup rukun dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu diperlukan konsepsi generik pendidikan bagi warga negara agar mampu hidup rukun dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Secara keilmuan pembahasan tersebut perlu diletakkan dalam konteks pendidikan kewarganegaran secara sistemik dalam rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dalam pasal 3 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, secara imperatif digariskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab". Idealisme pembentukan watak dan

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, idealisme tersebut merupakan misi suci (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan.

B. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Wacana Multikulturalisme

Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai motto Negara, yang diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Keprabonan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau *Although in pieces yet One*. (Wikipedia). Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun di atas keanekaragaman. (etnis, bahasa, budaya dll). Jika dikaji secara akademis, bhinneka tunggal ika tersebut dapat dipahami dalam konteks konsep generik *multiculturalism* atau multikulturalisme. Secara historis kontemporer masyarakat Barat, multikulturalisme setidaknya menunjuk pada tiga hal. Pertama, sebagai bagian dari pragmatism movement pada akhir abad ke 19 di Eropa dan Amerika Serikat. Kedua, sebagai *political and cultural pluralism* pada abad ke 20 yang merupakan bentuk respon terhadap imperialisme Eropa di Afrika dan imigrasi besar-besaran orang Eropa ke Amerika Serikat dan Amerika Latin. Ketiga, sebagai *official national policy* yang dilakukan di Canada pada 1971 dan Australia tahun 1973 dan berikutnya di beberapa Negara Eropa. Secara konseptual tampaknya dinamika pemikiran tentang multikulturalisme tersebut merupakan pergumulan

antara pilihan menjadi *monocultural nation-state* yang didasarkan pada prinsip *each nation is entitled to its own sovereign state and to engender, protect and preserve its own unique culture and history*, atau menjadi multilingual and multi-ethnic empires yang dianggap sangat opresif, seperti Austro-Hungarian Empire dan Ottoman Empires. Namun demikian dalam praksis kehidupan kenegaraan yang berbasis pemikiran *monoculturalism* ternyata *ideology nation-state dengan prinsip unity of disscent, unity of culture, unity of language and often unity of religion* tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu dalam kondisi tidak dicapainya *cultural unity*, karena dalam kenyataannya justru memiliki *cultural diversity*, Negara melakukan berbagai kebijakan, yang salah satunya yang paling umum adalah melakukan *compulsory primary education* dalam satu bahasa. Walaupun demikian hal tersebut potensial menimbulkan konflik budaya sebagai akibat dari pengabaian terhadap bahasa lokal/daerah.

Menarik untuk dicermati bagaimana modus kebijakan multikulturalisme yang ada selama ini. Pertama, model Amerika Serikat yang memiliki kebijakan multikulturalime yang *dikenal the Melting Pot' ideal*, yang pada dasarnya bahwa *immigrant cultures are mixed and amalgamated without state intervention*. Setiap individu immigrant diharapkan mampu berasimilasi ke dalam kondisi masyarakat Amerikan menurut kecepatannya dalam beradaptasi. Pemikiran tentang *melting pot* ini dirancang untuk bergandengan secara harmonis dengan konsep Amerika sebagai suatu *national unity*. Kedua, model Australia, dengan multikulturalisme yang dikonsepsikan dalam *format ethnic selection*, dimana masyarakat Australia yang sebelum datangnya immigrant Eropa secara besar-besaran, sesungguhnya

memiliki banyak *indigenous cultures* (aborigin) atau kebudayaan asli untuk diarahkan menjadi masyarakat Australia yang mencerminkan *the British ethno-cultural identity*. Ketiga, di lain pihak Canada menggunakan kebijakan multikulturalisme dalam bentuk pembangunan national unity melalui konsepsi *pluralistic and particularist multiculturalism* yang kemudian dikenal sebagai *Canada's cultural mosaic* yang pada dasarnya memandang bahwa setiap budaya atau sub-budaya di dalam masyarakat Canada memberikan kontribusi keunikan dan nilai luhur terhadap keseluruhan kebudayaan dengan prinsip *preserving the distinctions between cultures*. Keempat, model Argentina yang menerapkan kebijakan multikulturalisme untuk mengakomodasikan budaya immigrant dengan prinsip multikulturalisme sebagai cerminan dari *social assortment of Argentine culture* dengan menerapkan *individual's multiple citizenship*. Kelima, model Malaysia, yang menerapkan kebijakan multikulturalisme dengan prinsip *coexistence between the three ethnicities* (Malays, Chinese, and Indian) dengan jaminan konstitusional *that immigrant groups are granted citizenship, and Malays' special rights are guaranteed*, yang kemudian dikenal dengan *Bumiputera policy*.

Bagaimana halnya dengan konsep dan kebijakan multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika Indonesia? Indonesia dikonsepsikan dan dibangun *sebagai multicultural nation-state* dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai monocultural nation-state. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang

pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya itu.

C. Pendidikan Multikultural Berorientasi Nilai-Moral Pancasila

Apakah makna pendidikan Pancasila dalam pembangunan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam konteks multikulturalisme Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, pendidikan Pancasila perlu dilihat dalam tiga tataran, yakni: pendidikan Pancasila sebagai kemasam kurikulum (mata pelajaran atau mata kuliah), sebagai proses pendidikan (praksis pembelajaran), dan sebagai upaya sistemik membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan (*proses nation's character building*). Kemasam kurikulum pendidikan Pancasila secara historis-kurikuler telah mengalami pasang surut (Winataputra:2001). Dalam kurikulum sekolah sudah dikenal, mulai dari Civics tahun 1962, Pendidikan Kewargaan Negara dan Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003. Sementara itu di perguruan tinggi sudah dikenal Pancasila dan Kewiraan Nasional tahun 1960-an, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan tahun 1985, dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003. Untuk Indonesia pada saat ini, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pada pasal 37

menggariskan program kurikuler pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.

Semua proses pendidikan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural. Karena itu inti dari pendidikan, termasuk pendidikan Pancasila adalah belajar atau learning. Dalam konteks pendidikan formal dan nonformal, proses belajar merupakan misi utama dari proses pembelajaran atau instruction. Secara normatif, dalam Pasal 1 butir 20 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa "Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar". Satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, sekolah tinggi, institut, dan universitas) merupakan suatu lingkungan belajar pendidikan formal yang terorganisasikan mengikuti legal framework yang ada. Oleh karena itu proses belajar dan pembelajaran harus diartikan sebagai proses interaksi sosiokultural-edukatif dalam konteks satuan pendidikan, bukan hanya dibatasi pada konteks klasikal mata pelajaran atau mata kuliah. Dalam konteks itu, maka pendidikan Pancasila dalam pengertian generik, harus diwujudkan dalam keseluruhan proses pembelajaran, bukan hanya dalam pembelajaran mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Kajian Pancasila. Karena itu konsep kebudayaan Pancasila yang menjadi tema sandingan pendidikan Pancasila, menjadi sangat relevan dalam upaya menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai peradaban Indonesia yang bermartabat dalam konteks multikulturalisme Indonesia.

Dalam konteks itu maka satuan pendidikan seyogyanya dikembangkan sebagai satuan sosiokultural-edukatif yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan satuan pendidikan yang membudayakan dan mencerdaskan.

Untuk itu perlu dikembangkan budaya kewarganegaraan Indonesia yang multikultural, yang berintikan "*civic virtue*" atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan. Kebajikan itu sepenuhnya harus terpancar dari nilai-nilai Pancasila yang secara substantif mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan multikultural. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan "*civic community*" atau "*civil society*" atau masyarakat madani untuk Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani-Pancasila bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan yang ber-Pancasila (*civic culture*). Oleh karena itu diperlukan adanya dan berperannya pendidikan Pancasila yang menghasilkan demokrasi konstitusional yang mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan-Pancasila. Dalam waktu bersamaan proses pendidikan tersebut harus mampu memberi kontribusi terhadap berkembangnya multikulturalisme Pancasila yang menjadi inti dari masyarakat madani-Pancasila yang demokratis. Inilah tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan Pancasila untuk membangun demokrasi konstitusional di Indonesia.

Masyarakat madani-Pancasila yang multikultural merupakan “*civic community*” atau “*civil society*” yang ditandai dengan berkembangnya peran organisasi kewarganegaraan di luar organisasi kenegaraan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai Pancasila. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan masyarakat madani tersebut harus terwujud kualitas pribadi yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak azasi manusia, perwujudan negara hukum, partisipasi warganegara yang luas dalam pengambilan kebijakan publik dalam berbagai tingkatan, dan pelaksanaan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara (Indonesia) yang cerdas dan baik. Dari situ dapat ditangkap tantangan bagi pendidikan demokrasi konstitusional di Indonesia adalah bersistemnya pendidikan Pancasila dengan keseluruhan upaya pengembangan kualitas warganegara dan kualitas kehidupan multikultural yang ber-Pancasila dan berkonstitusi UUD 1945, dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Identitas pribadi warganegara yang bersumber dari civic culture Indonesia yang multikulturalistik perlu dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar. Elemen *civic culture* yang paling sentral dan sangat perlu dikembangkan adalah civic virtue. Yang dimaksud dengan *civic virtue* adalah *the willingness of the citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good* (Quigley, dkk,1991:11)- atau kemauan dari warganegara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Civic virtue merupakan domain

psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu *civic dispositions* dan *civic committments*. Sebagaimana dirumuskan oleh Quigley,dkk (1991:11) yang dimaksud dengan *civic dispositions* adalah *those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system* atau sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Sedangkan *civic committments* adalah *the freely-given, reasoned committments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy* atau komitmen warganegara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Kedua unsur dari *civic virtue* tersebut diyakini akan mampu menjadikan proses politik berjalan secara efektif untuk memajukan the *common good* atau kemaslahatan umum dan memberi kontribusi terhadap perwujudan ide fundamental dari system politik termasuk "*protection of the rights of the individual*" atau perlindungan hak-hak azasi manusia (Quigley, dkk,1991:11) Proses politik yang berjalan dengan efektif untuk memajukan kepentingan umum dan memberi kontribusi berarti terhadap perwujudan ide fundamental dari sistem politik termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak individu itu adalah ciri kehidupan politik yang ditopang kuat oleh *civic culture*.

Secara konseptual *civic dispositions* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni *civility* atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat), *individual responsibility* atau tanggung jawab individual, *self-discipline* atau disiplin

diri, *civic-mindedness* atau kepekaan terhadap masalah kewargaan, *open-mindedness* (terbuka, skeptis, mengenal ambiguitas), *compromise* (prinsip konflik dan batas-batas kompromi), *toleration of diversity* atau toleransi atas keberagaman, *patience and persistence* atau kesabaran dan ketaatan, *compassion* atau keterharuan, *generosity* atau kemurahan hati, and *loyalty to the nation and its principles* atau kesetiaan pada bangsa dan segala aturannya. (Quigley, dkk, 1991:13-14).

Kesemua itu, yakni keadaban yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggungjawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keberagaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya merupakan karakter intrinsik dari sikap warganegara. Sedangkan *civic commitments* adalah kesediaan warga negara untuk mengikatkan diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta nilai fundamental demokrasi konstitusional, dalam hal ini di Amerika, yang meliputi *popular sovereignty, constitutional government, the rule of law, separation of powers, checks and balances, minority rights, civilian control of the military, separation of church and state, power of the purse, federalism, common good, individual rights (life, liberty: personal, political, economic, and the pursuit of happiness), justice, equality (political, legal, social, economic), diversity, truth, and patriotism*. (Quigley, dkk, 1991:14-16).

Kesemua itu adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan konstitusional, prinsip negara hukum,

pemisahan kekuasaan, kontrol dan penyeimbangan, hak-hak minoritas, kontrol masyarakat terhadap meliter, pemisahan negara dan agama, kekuasaan anggaran belanja, federalisme, kepentingan umum, hak-hak individual yang mencakup hak hidup, hak kebebasan (pribadi, politik, ekonomi, dan kebahagiaan), keadilan, persamaan (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi), kebhinekaan, kebenaran, dan cinta tanah air, tentu saja tidak semua hal tersebut berlaku untuk Indonesia.

Pengembangan dimensi *civic virtue* merupakan landasan bagi pengembangan *civic participation* yang memang merupakan tujuan akhir dari *civic education*, atau pendidikan Pancasila untuk Indonesia. Dimensi *civic participation* dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan *the knowledge and skills required to participate effectively, practical experience in participation designed to foster among students a sense of competence and efficacy* dan mengembangkan ... *an understanding of the importance of citizen participation* (Quigley, dkk, 1991:39), yakni pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berperanserta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperanserta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peranserta aktif warganegara.

Untuk dapat berperan secara aktif tersebut diperlukan *A knowledge of the fundamental concepts, history, contemporary events, issues, and facts related to the matter and the capacity to apply this knowledge to the situation; a disposition to act in accord with the traits of civic characters; and a commitment to the realization of*

the fundamental values and principles. (Quigley, dkk, 1991:39). Semua hal tersebut, menunjuk pada pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa aktual, dan fakta yang berkaitan dengan subsantsi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warganegara. Dalam konteks Indonesia secara keseluruhan harus ditempatkan dalam konteks nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menghargai komitmen kolektif dan semangat ke-Indonesia-an yang multikultural.

D. Penutup

Bertolak dari pembahasan dimuka, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma karya besar Mpu Tantular dan secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau *Although in pieces yet One*, merupakan ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman. (etnis, bahasa, budaya dll). Secara akademis, konsep bhinneka tunggal ika tersebut dapat dipahami dalam konteks konsep generik multiculturalism atau multikulturalisme.
2. Multikulturalisme setidaknya menunjuk pada tiga hal, yakni: (1) sebagai bagian dari *pragmatism movement* pada akhir abad ke 19 di Eropa dan Amerika Serikat; (2) sebagai *political and cultural pluralism* pada abad ke 20 sebagai respon terhadap imperialisme Eropa di Afrika dan imigrasi besar-besaran orang Eropa ke Amerika Serikat dan Amerika Latin; dan (3) sebagai *official national policy* yang dilakukan di Canada pada

1971 dan Australia tahun 1973 dan di beberapa Negara Eropa.

3. Dalam konteks multikulturalisme, komitmen final tentang NKRI, Pembukaan UUD 1945 yang diterima secara konsisten dengan Pancasila di dalamnya, wawasan Nusantara yang mempersatukan wilayah Indonesia dari Merauke sampai Sabang, serta pengakuan kebudayaan Indonesia yang merajut puncak-puncak budaya dari semua etnis yang ada di Indonesia, merupakan indikasi yang kuat bahwa Indonesia tidak menganut konsep *American's melting pot*, atau *Australia's ethnic selection*, atau *Malaysia's three ethnicity coexistence*, atau *Argentina's social-cultural assortment* tetapi lebih mendekati pada konsep *eclectic model* dari *Canada's cultural mosaic* dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika Mpu Tantular.
4. Pendidikan Pancasila yang berisikan interaksi antara peserta didik dalam latar pendidikan formal dan nonformal, dan antara anggota masyarakat dalam latar pendidikan informal, dengan seluruh sumber inspirasi dan informasi yang memungkinkan setiap orang baik secara individual maupun kolektif mampu mewujudkan esensi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan sebagai proses idealisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang multikultural-bhinneka tunggal ika. Yang menjadi *integrating forces* adalah sistem nilai Pancasila yang baik secara substantif masing-masing silanya maupun secara sistemik keseluruhan lima silanya sangat menghargai dan mewadahi keberagaman dalam keyakinan, dalam dimensi kemanusiaan, dalam semangat mempersatukan Indonesia, dalam mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia, secara filosofik dan substantif-pedagogis/andragogis, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalime-bhinneka tunggal ika.
6. Perlu dikembangkan budaya kewarganegaraan Indonesia yang multikultural, yang berintikan "*civic virtue*" atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan. Kabajikan itu sepenuhnya harus terpancar dari nilai-nilai Pancasila yang secara substantif mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan multikultural. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan "*civic community*" atau "*civil society*" atau masyarakat madani yang multikultural berdasarkan Pancasila.

BAB VIII

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEBANGSAAN

A. Pendahuluan

Istilah multikultur berakar dari kata kultur. Pada umumnya, kultur diartikan sebatas pada budaya dan kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu (Yaqin, 2005:6). Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham) (Tilaar, 2003). Multikultur sebenarnya merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur yang berarti kebudayaan atau pemeliharaan, sedang awalnya adalah multi yang berarti banyak, ragam, atau aneka. Dengan demikian, multikultur berarti keragaman kebudayaan atau banyak pemeliharaan.

Multikulturalisme dapat dikatakan berkembang dari negara besar demokrasi yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai pentolan demokrasi, masyarakatnya dapat hidup dengan subur dalam segregasi dan diskriminasi ras. Sejarah mencatat terjadinya perang saudara pada per-tengahan abad ke-19 sebenarnya merupakan cikal-bakal lahirnya multikulturalisme di dunia. Abraham Lincoln sebagai pejuang demokrasi dengan politik abolisinya dapat menghapus perbudakan. Hasil perjuangannya menempatkan ras negro pada tempat yang layak di Amerika Serikat. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa ras dengan kultur minoritas dapat berbaur dengan ras dan kultur yang lebih kompleks, yang berarti menjadikan

multikultur dapat bersinergi dalam ras dan kultur yang bervariasi.

Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia, tanah air kita memiliki karakteristik yang amat mengagumkan apabila dilihat dari aspek fisik, sosial, dan budaya. Dengan lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil tersebar pada wilayah seluas lebih dari 5.000.000 kilometer persegi, dari kota Sabang di penghujung sebelah barat sampai kota Merauke di penghujung sebelah timur dan dari pulau Miangas di ujung utara sampai pulau Rote di ujung sebelah selatan. Luas geografis kepulauan Indonesia lebih luas dari Eropa Barat, dan hampir sebanding dengan Amerika Serikat dan Australia. Dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa, Indonesia kini menduduki peringkat keempat negara paling padat di dunia. Di samping itu, dengan jumlah sekitar 500 kelompok etnis dan 700 bahasa, Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya paling beranekaragam di planet ini (Kalidjernih, 2008:130). Indonesia memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (*cultural pluralism*) secara lebih mencolok, sehingga dipandang sebagai “lokus klasik” bagi bentukan baru “masyarakat majemuk” (*plural society*). Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, *pertama* secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan *kedua* secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2007:33). Fenomena masyarakat dan kompleks kebudayaannya yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen

(aneka ragam) itu tergambar dalam prinsip *bhinneka tunggal ika*, yang berarti bercorak-ragam kehidupan dan penghidupan, tetapi terintegrasi dalam kesatuan.

Fakta realitas, jelas menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Sesuai dengan prinsip *bhinneka tunggal ika*, maka sebenarnya pendidikan multikultural sebagai pendidikan alternatif patut dikembangkan dan dijadikan sebagai model pendidikan di Indonesia. Ada beberapa alasan mengenai hal tersebut. Pertama, realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama, dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. Kedua, pluralitas tersebut secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Ketiga, masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. Keempat, masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan hak setiap orang. Kelima, pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan, dan kesewenang-wenangan. Keenam, pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Ketujuh, pendidikan multikultur sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kealaman, dan ke-Tuhan-an.

Dari beberapa alasan di atas, nampaknya perlu dibangun paradigma pendidikan multikultural di Indonesia. Menurut Dawam (2003: 153-15), paradigma pendidikan multikultural dapat dikatakan bahwa sebenarnya paradigma yang telah muncul sampai saat ini adalah paradigma teosentrisme, kosmosentrisme, dan

antroposenirisme. Suatu paradigma yang memandang segala sesuatu ada yang memiliki kekuatan yang paling menentukan segala sesuatunya, yaitu Tuhan. Tuhan diposisikan sedemikian sentralnya menjadi acuan seluruh perilaku manusia. Sebagai bukti ke maha kuasaannya Tuhan memberikan alam dan segala isinya untuk menjadikan manusia hidup dengan bergantung pada kemampuan kosmos. Atas ketergantungan tersebut manusia hendaknya memiliki kesadaran kosmosentrisme untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan seluruh tatanan bumi dengan arif dan bijaksana. Paham antroposenirisme yang mengakui ukuran kebaikan dan kebenaran itu terletak pada akal budi manusia. Untuk meraih kebaikan hidup, baik individu maupun sosial, manusia harus mengembangkan akal budinya. Menurut Khoironi (2004:10) di samping itu, manusia harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap ruas kehidupannya, termasuk kebudayaan yang progresif.

Dengan totalitas ketiga paradigma tersebut, diharapkan dapat menerbitkan manusia yang mampu menjalankan tugas hidup manusia yang saling bekerjasama sehingga mampu hidup (*to make a living*), mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*), dan untuk turut memuliakan kehidupan (*to ennoble life*).

B. Pendidikan Multikultural untuk Multikulturalisme

Pendidikan multikultural merupakan sebuah paradigma baru yang lahir pada akhir abad XX, yang memiliki visi, program, strategi dan metodologi pendidikan yang perlu untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masyarakat dunia global dan

multikultural. Banks (1994) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai berikut: "*Multicultural education is a progressive approach for transforming education that hostically critique and address currents shortcomings, failings, discriminatory practices in education. It is grounded in deals of social justice, education equity, and a dedication to facilitating seducation experiences in which all students reach their full potensial as learners and as socially aware and active beings, locally, and globally*".

Bagaimana mengimplementasikan konsep pendidikan multikultural ini dalam pendidikan praktis di sekolah? Terdapat 3 (tiga) komponen implementasi yang dapat dipergunakan sebagai strategi program pembelajaran, yaitu sebagai berikut: (1) *Content oriented program*, yang terdiri dari: a. mengembangkan materi pendidikan multikultural dalam semua disiplin ilmu, b. memadukan keberagaman pandangan dan cara pandang dalam kurikulum, c. mentransfer tujuan dalam konsep kurikulum baru; (2) *Student oriented program*, yang terdiri dari: a. melakukan penelitian terhadap model belajar berbagai kelompok murid, b. program menggunakan sekaligus dua atau lebih bahasa pengantar dalam sekolah, c. spesial program untuk murid-murid yang terkebelakang atau terpinggirkan secara sosio-ekonomi dalam masyarakat; (3) *Socially oriented program*, yang terdiri dari: a. kontak antara kelompok-kelompok yang berbeda (ras, agama, dan sosio-ekonomi), b. program belajar bersama.

Dalam pendidikan multikultur selalu muncul kata kunci kultural, pluralitas dan pendidikan. Pemahaman terhadap pluralitas mencakup segala perbedaan dan keragaman, sedangkan kultur itu sendiri tidak dapat lepas dari empat terma penting yaitu aliran (agama), ras

(golongan), suku (etnis), dan budaya. Dalam pendidikan multikultur berarti pengakuan atas empat terma penting tersebut untuk memprogramkan berlangsungnya pendidikan multikultur.

Pengakuan keempat terma penting tersebut menjadikan ciri khas pendidikan multikultur. Pendidikan yang berorientasi multikultur harus dapat memahami keberadaan masyarakat plural yang memiliki *groupthink* yang membutuhkan ikatan-ikatan keadaban (*the bound of civility*). *The bound of civility* berupa pergaulan antar kultur yang diikat dengan suatu *civility* (keadaban). Ikatan ini dibangun dari nilai-nilai universal manusia. Nilai-nilai universal manusia tersebut, perlu ditransfer kepada masyarakat agar menemukan tujuan kepemilikan dan kelanggengan. Kepemilikan nilai-nilai universal yang dapat melembaga pada masyarakat untuk mewujudkan budaya luhur yang sesuai dengan nilai keuniversalan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai luhur dapat diwujudkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, berwibawa, dan bermartabat. Untuk mentransfer nilai-nilai keuniversalan, maka masyarakat harus tetap meyakini dan mengakui bahwa transmitter nilai-nilai universal tersebut adalah melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, segala perangkat yang mengacu pada pencapaian hasil tersebut diorientasikan pada tujuan utama pendidikan dengan kesiapan menghadapi masyarakat multikultur.

Berdasarkan paparan di atas, maka pendidikan multikultural pada era ini sudah selayaknya mengangkat multikulturalisme sebagai paham yang humanis, dan bila dikaji dari perjalanan pluralisme di Indonesia dapat diprioritaskan pada pembangunan: multikulturalisme sebagai *politic of recognition*. Multikulturalisme sebagai

sebuah paham (*politic of recognition*) menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan demikian, multikulturalisme bukan sekedar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini, tetapi juga telah merupakan tuntutan dari berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut (Tilaar, 2004: 73-74).

Pengakuan berarti penghargaan akan keberbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Memaknai menghargai perbedaan berarti siap untuk menerima kehadiran orang lain di tengah kehidupan manusia secara kolektif, *learning to live together* (Assegaf, 2004: 107). Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Secara idealis, penghargaan dan pengakuan masing-masing individu tersebut akan terbangun komunitas yang harmonis. Pengakuan dan penerimaan atas keanekaan tersebut merupakan *politic of recognition* yang harus dijunjung tinggi. Secara politis, pengakuan tersebut bermuatan cukup strategis. Nilai strategis tersebut terdapat pada unsur penerimaan secara timbal balik. Berlangsungnya timbal balik tersebut menjadi jaminan berkembangnya antar kultur. Pengingkaran terhadap berkembangnya kultur masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari ketimpangan-ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Masyarakat multikultur berasal dari dua kata yaitu masyarakat dan multikultur. Masyarakat merupakan satu kata yang mengandung banyak arti. Masyarakat ada dari proses berhimpun, saling mengasihi, serta kebersamaan dalam tujuan, kemaslahatan, dan

keikhlasan untuk mencapai tujuan umum (Dewey: 1953). Masyarakat multikultur atau multibudaya berarti mereka yang telah mempelajari dan menggunakan kebudayaan secara cepat, efektif, jelas, serta ideal dalam interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Definisi ini jelas merujuk kepada masyarakat yang memiliki budaya sekaligus melaksanakan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan. Melaksanakan ritual budaya yang dijunjung tinggi tersebut digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan budaya lain. Interaksi dan komunikasi tersebut dalam rangka saling menghargai/menghormati sekaligus memperkaya budaya masing-masing.

Masyarakat multikultur merupakan masyarakat yang mampu memerankan dirinya sebagai arbiter, penengah bagi proses rekonsiliasi ketika proses dialektika tersebut menemui kejumudan/titik jenuh. Untuk keperluan ini masyarakat dituntut untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar dapat memiliki sensitifitas, sensibilitas, apresiasi, simpati dan empati terhadap outsider. Sebagaimana disampaikan oleh Tilaar (2004:37) masyarakat multikultur menyimpan banyak kekuatan dari masing-masing kelompok, sekaligus menjadi benih perpecahan. Apabila pertimbangan-pertimbangan emosional yang dipentingkan, maka akan lahir pendapat-pendapat fundamentalis atau yang mementingkan kepentingan kelompok sendiri dan menganggap kelompok-kelompok lain sebagai musuh. Tetapi apabila analisis rasio yang jernih digunakan dalam memilah-milah kekuatan yang dimiliki oleh suatu kelompok budaya atau kapital budaya, kekuatan sosial (*social capital*), dan kekuatan intelektual dari suatu komunitas,

maka diyakini multikultur menyimpan cukup energi untuk menggerakkan masyarakat dalam skala yang berdampak luas dalam sendi-sendi kehidupan manusia itu sendiri.

Multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku (*etnis*), dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Pluralitas ini juga dapat ditangkap oleh agama, selanjutnya agama mengatur untuk menjaga keseimbangan masyarakat plural tersebut. Hal ini dapat dimengerti, mengingat dalam agama (sebagaimana diabadikan dalam kitab suci) lebih dahulu disampaikan adanya multikultur sebagai dasar kebangunan manusia untuk lebih dewasa (Wahid, Kompas, 23 Juni 2004).

Secara umum, multikulturalisme dalam karakteristik sosial digunakan dalam rangka berjalannya interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial selalu didahului oleh suatu kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya interaksi sosial dapat dipengaruhi oleh adanya jarak sosial dari pelaku interaksi itu sendiri. Proses interaksi sosial dimulai dengan kontak atau komunikasi sosial. Kontak ini

dilanjutkan dengan proses-proses yang asosiatif (*associative processes*) ataupun disosiatif atau oposisional (*dissociative processes*). Proses-proses asosiatif dimulai dengan kerjasama (*cooperation*) dan dilanjutkan dengan akomodasi (*accomodation*), asimilasi (*assimilation*), dan akulturasi (*acculturation*). Adapun disosiasi dimulai dari persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*), antara kompetisi dan konflik, dan konflik. Interaksi sosial dalam multikultur memerlukan pengenalan dan pemahaman atas karakteristik sosial yang menjadi ciri khas komunitasnya.

C. Membangun Pendidikan Multikultural

Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, maka untuk membentuk negara Indonesia yang kokoh perlu mengembangkan jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultural. Jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultur ini adalah Pendidikan Multikultural.

Pendidikan Multikultural paling tidak menyangkut tiga hal yaitu (1) ide dan kesadaran akan nilai pentingnya keragaman budaya, (2) gerakan pembaharuan pendidikan dan (3) proses.

Pendidikan Multikultural berkaitan dengan ide, dirancang agar semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan yang ada itu merupakan keniscayaan atau kepastian adanya, namun perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Artinya perbedaan itu perlu kita terima sebagai suatu kewajiban dan perlu sikap toleransi agar kita bisa hidup berdampingan secara damai tanpa melihat unsur yang

berbeda itu untuk membeda-bedakan.

Pendidikan Multikultural ini memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis kegiatan pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan universal. Di dalamnya akan dibahas kebudayaan yang teraktualisasi secara internasional, regional, dan lokal sepanjang sejarah kemanusiaan. Kegiatan pendidikan sebagai interaksi sosio-kultural paedagogis di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh suku bangsa Indonesia, tapi berbagai bangsa. Di dalam Pendidikan Multikultural ini akan diungkap pula aktivitas paedagogis masa lalu, masa kini dan masa depan di berbagai belahan dunia dengan fokus kebudayaan Indonesia.

Ide penting yang lain dalam Pendidikan Multikultural adalah bahwa sebagian siswa karena karakteristik tersebut di atas, ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah favorit tertentu sedangkan siswa dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu. Beberapa karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis menolak kelompok siswa untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, walaupun itu dilakukan secara halus. Dalam arti, dibungkus dalam bentuk aturan yang hanya bisa dipenuhi oleh segolongan tertentu dan tidak bisa dipenuhi oleh golongan yang lain. Kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Ada kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah favorit yang didominasi oleh golongan orang kaya karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk bisa masuk dalam kelompok sekolah favorit itu. Ada kebijakan yang dipandang tidak adil bagi golongan Tionghoa karena ada diskriminasi terhadap kelompok mereka sehingga

mereka hanya berkecimpung di bidang yang sangat terbatas, misalnya dagang, pengacara, dokter dan mengalami kesulitan berkarier di bidang ketentaraan dan pemerintahan. Mereka dan sebagian warga negara asing lainnya sulit mendapatkan status kewarganegaraan bagi anak-anak mereka sebelum tahun 2006.

Pendidikan Multikultural bisa muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok. Sebagaimana ditunjukkan Banks (1994), pendidikan multikultur bukan sekedar merupakan praktek aktual satu bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek pendidikan.

Pendidikan Multikultural juga merupakan proses (pendidikan) yang tujuannya tidak akan pernah terrealisasikan secara penuh. Pendidikan multikultural adalah proses “menjadi”. Pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh bukan sekedar meningkatkan skor.

Persamaan pendidikan, seperti juga kebebasan dan keadilan, merupakan ide umat manusia yang harus dicapai dengan perjuangan keras namun tidak pernah dapat mencapainya secara penuh. Ras, gender, dan diskriminasi terhadap orang yang berkebutuhan akan tetap ada sekalipun kita telah berusaha sekeras mungkin menghilangkan masalah ini. Jika prasangka dan diskriminasi dikurangi pada suatu kelompok, biasanya keduanya terarah pada kelompok lain atau mengambil bentuk yang lain. Karena tujuan Pendidikan Multikultur

tidak akan pernah tercapai secara penuh, kita seharusnya bekerja secara kontinyu meningkatkan persamaan pendidikan untuk semua siswa (*educational equality for all students*).

Gorski (2001) menjelaskan bahwa sejak konsep paling awal muncul pada tahun 1960-an, pendidikan multikultural telah berubah, difokuskan kembali dan dikonseptualisasikan kembali. Pendidikan multikultural berada di dalam kondisi perubahan baik teoritis maupun praktek sehingga jarang ada dua pengajar atau ahli pendidikan yang memiliki definisi yang sama tentang pendidikan multikultural. Seperti halnya dalam suatu dialog pendidikan, individu cenderung mengubah konsep untuk disesuaikan dengan fokus tertentu. Beberapa di antaranya membahas pendidikan multikultural sebagai suatu perubahan kurikulum, mungkin dengan menambah materi dan perspektif baru. Yang lain berbicara tentang isu iklim kelas dan gaya mengajar yang dipergunakan kelompok tertentu. Yang lain berfokus pada isu sistem dan kelembagaan seperti jurusan, tes baku, atau ketidakcocokan pendanaan antara golongan tertentu yang mendapat jatah lebih sementara yang lain kurang mendapat perhatian. Yang lain lagi melihat perubahan pendidikan sebagai bagian dari perubahan masyarakat yang lebih besar di mana kita mengeksplorasi dan mengkritik dasar-dasar kemasyarakatan yang menindas dan bagaimana pendidikan berfungsi untuk memelihara status quo seperti di Amerika Serikat yang terlalu berpihak pada supremasi kulit putih, kapitalisme, situasi sosio-ekonomi global dan eksploitasi. Sekalipun banyak perbedaan konsep pendidikan multikultural, ada sejumlah ide yang dimiliki bersama dari semua pemikiran dan merupakan dasar bagi pemahaman

pendidikan multikultural: (1) kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya; (2) penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya; (3) penyiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi setiap siswa secara efektif, tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan dirinya; (4) partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuknya; (5) pendidikan yang berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa, pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktek pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi sekolah dan bimbingan, materi pendidikan dan buku teks, dan lain-lain.

Menurut Gorski (2001), pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif di dalam pendidikan. Keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi menjadi landasan pendidikan multikultural dalam memfasilitasi pengalaman pendidikan agar semua siswa dapat mewujudkan semua potensinya secara penuh dan menjadikannya sebagai manusia yang sadar dan aktif secara lokal, nasional, dan global.

Paparan di atas sekaligus mengisyaratkan, perlunya upaya membangun pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan ketrampilan hidup (*life skills*). Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat multikultur yang mencakup berbagai macam perspektif

budaya yang berbeda. Jadi sangat relevan bagi sekolah di Indonesia untuk menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan Multikultural dapat melatih siswa untuk menghormati dan toleransi terhadap semua kebudayaan. Pendidikan multikultural sebagai kesadaran merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa budaya merupakan salah satu kekuatan yang dapat menjelaskan perilaku manusia. Budaya memiliki peranan yang sangat besar di dalam menentukan arah kerjasama maupun konflik antar sesama manusia.

Atas dasar pemikiran ini, maka sudah saatnya pendidikan multikultural di Indonesia dirumuskan melalui pencarian nilai-nilai inti untuk pendidikan multikultural. Menurut Bennett dalam Tilaar (2003: 171) orientasi nilai-nilai inti (*core value*) pada pendidikan multikultur antara lain: (1) Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat; (2) Pengakuan terhadap harkat dan martabat dan hak asasi manusia; (3) Pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia; dan (4) Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.

Core value pendidikan multikultur mengingatkan pada sirkulerisme pendidikan multikultur. Sirkulerisme pendidikan multikultur, dapat mencakup empat hubungan dimensi; dimensi manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, *core value* pada pendidikan multikultur mencapai totalitas hubungan yang menjadi titik pusat perhatian. Totalitas hubungan sesuai dengan derajat nilai-nilai diri, kemanusiaan, dan kealaman.

Perumusan *core value* ini sangat penting untuk membangun tujuan pendidikan multikultur. Menurut

Bennett dalam Tilaar (2003: 171-172) nilai-nilai inti (*core value*) yang rnengarah pada tujuan pendidikan multikultur antara lain:

- 1) Mengembangkan perspektif sejarah (*ethnohistorisitas*) yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat,
- 2) Memperkuat kesadaran budaya hidup di masyarakat,
- 3) Menerima dan menghargai perbedaan dalam keberagaman,
- 4) Memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat,
- 5) Membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka (*prejudice*),
- 6) Mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi dan mengembangkan keterampilan aksi sosial (*social action*).

D. Merumuskan Tujuan Pendidikan Multikultural Berbasis Kebangsaan

Berdasarkan *core value* yang mengarah pada tujuan pendidikan multikultural, sudah saatnya bangsa ini merumuskan tujuan pendidikan multikultural berbasis kebangsaan. Terlebih di era globalisasi yang tengah mendera, konsep kebangsaan Indonesia perlu diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai tersebut di atas. Tujuan pendidikan multikultural berbasis kebangsaan yang pertama adalah : pengembangan literasi etnis dan budaya. Tujuan utama pendidikan multikultural ini adalah mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas. Informasi ini harus komprehensif, analistis, dan komparatif, dan harus

memasukkan persamaan dan perbedaan di antara kelompok-kelompok yang ada. Pengetahuan tentang pluralisme budaya merupakan dasar yang diperlukan untuk menghormati, mengapresiasi, menilai dan memperingati keragaman, baik lokal, nasional dan internasional.

Tujuan yang kedua adalah menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Penekanan bidang ini merupakan bagian dari tujuan pendidikan multikultural yang berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa, yang berisi pemahaman yang lebih baik tentang diri yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa. Siswa merasa baik tentang dirinya sendiri karena lebih terbuka dan reseptif (menerima) dalam berinteraksi dengan orang lain dan menghormati budaya dan identitasnya.

Pendidikan multikultural mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia (*human dignity*), keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi, merupakan tujuan yang ketiga dengan penekanan pada klarifikasi nilai dan sikap. Mengajari generasi muda untuk menghargai dan menerima pluralisme etnis, menyadari bahwa perbedaan budaya tidak sama dengan kekurangan atau rendah diri, dan untuk mengakui bahwa keragaman merupakan bagian integral dari kondisi manusia. Pengklarifikasian sikap dan nilai etnis didesain untuk membantu siswa memahami bahwa berbagai konflik nilai itu tidak dapat dielakkan dalam masyarakat pluralistik; dan bahwa konflik tidak harus menghancurkan dan memecah belah. Jika kita mengelola dengan baik hal itu akan dapat menjadi katalis kemajuan

sosial dan ada kekuatan dalam pluralisme etnis dan budaya; bahwa kesetiaan etnis (*ethnic allegiance*) dan loyalitas nasional (*national loyalty*) bukan tidak dapat didamaikan; dan bahwa kerjasama dan koalisi di antara kelompok etnis tidak tergantung pada pemilikan keyakinan, nilai, dan perilaku yang sama. Menganalisa dan mengklarifikasi sikap dan nilai etnis merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh-kembang lebih lanjut.

Tujuan berikutnya adalah mengembangkan kompetensi multikultural. Penting sekali bagi siswa untuk mempelajari bagaimana berinteraksi dengan dan memahami orang yang secara etnis, ras, dan kultural berbeda dari dirinya. Dunia kita menjadi semakin lebih beragam, kompak, dan saling tergantung. Pendidikan multikultural dapat meredakan ketegangan ini dengan mengajarkan ketrampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisa bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Pendidikan multikultural dapat membantu siswa mempelajari bagaimana memahami perbedaan budaya tanpa membuat pertimbangan nilai yang semena-mena tentang nilai intrinsiknya. Untuk mencapai tujuan ini anak dapat diberi pengalaman belajar dengan memberi berbagai kesempatan pada siswa untuk mempraktekkan kompetensi budaya dan berinteraksi dengan orang, pengalaman, dan situasi yang berbeda.

Tujuan yang kelima adalah mengembangkan rasa kesadaran sosial (*a sense of social consciousness*), keberanian moral, dan komitmen terhadap persamaan;

dan memperoleh ketrampilan dalam aktivitas politik untuk mereformasi masyarakat untuk membuatnya lebih manusiawi, simpatik terhadap pluralisme kultural, keadilan moral, dan persamaan.

Terakhir, tujuan yang dinilai paling penting adalah memperkokoh rasa kebangsaan. Dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa itu akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan itu akan tumbuh dan berkembang dalam wadah negara Indonesia yang kokoh. Untuk itu, pendidikan multikultural perlu menambahkan materi, program dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi dan stereotipe. Kontribusi dari pengayaan materi ini, sekaligus akan memperkaya siswa dalam hal pemilikan wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Hal ini berarti individu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia (*world citizen*). Namun siswa juga harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya, diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya (*act locally and globally*).

Atas dasar rumusan tujuan pendidikan multikultural berbasis kebangsaan di atas, diharapkan pendidikan multikultural dapat berfungsi dalam: (1) memberi konsep diri yang jelas; (2) membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya; (3) membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat; (4) membantu mengembangkan pembuatan keputusan (*decision making*), partisipasi sosial dan ketrampilan kewarganegaraan (*citizenship*

skills); dan (5) mengenal dan menghargai perbedaan dalam keberagaman. (Gorski, 2001).

BAB IX

PENGATAN JATI DIRI PKN MELALUI PENUMBUHAN BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

A. Pendahuluan

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan dalam suatu kelompok ataupun kegiatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokratis dimana seseorang dilibatkan dan diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai tingkat kematangan dan tingkat kewajiban. Dengan demikian, makna partisipasi menjadi lebih baik jika bidang fisik maupun bidang mental bersinergis dalam penentuan kebijakan (Sastropetro, 1986).

Menurut Gordon Allport, partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas yang lebih dari sekedar keterlibatan jasmaniah saja. Oleh karena itu, partisipasi membutuhkan kesungguhan partisipan dalam segala hal bukan hanya keterlibatan tapi juga pengorbanan. Seseorang yang berpartisipasi berarti turut memikul beban pembangunan dan menerima kembali hasilnya dan juga harus ikut bertanggungjawab (Sastropetro, 1986).

Seseorang dikatakan telah berpartisipasi bukan hanya dengan ia terlibat dalam kegiatan praktis lapangan saja, namun juga keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana disampaikan juga oleh A. White, bahwa partisipasi adalah keterlibatan

komunitas internal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. Hal ini didukung juga oleh pendapat Daryono, bahwa partisipasi berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, dan menentukan tujuan dari prioritas. (Sastropoetro, 1986).

Selanjutnya, Sastropoetro menambahkan (1986) ada tiga unsur penting partisipasi yang dimaksud Keith Davis yang memerlukan perhatian khusus, yakni:

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan perasaan, bukan semata-mata keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesiediaan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok yang berarti ada rasa senang dan kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Ada rasa tanggung jawab yang menonjol dari rasa menjadi seorang anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa *sense of belongingness*.

Dalam konteks kehidupan bernegara, makna partisipasi mensyaratkan seorang warga negara turut terlibat baik secara mental maupun fisik untuk memberikan sumbangan atas dasar kesukarelaan dalam pencapaian tujuan yang disertai dengan tanggung jawab sebagai seorang anggota dari negara. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kepercayaan dan rasa kepemilikan (*having*) setiap warga negara yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program atau kebijakan negara. Namun yang terpenting dalam kehidupan bernegara, bukanlah sekedar *having*, wujud nyata dari partisipasi seyogyanya menjadi *being*

(mendarahdaging) sebagai budaya perilaku warga negara yang berkarakter kebangsaan demokratis.

B. Penumbuhan Partisipasi Warga Negara Melalui Budaya Politik Partisipan

Fakta pada sebuah negara demokratis yang masih berkembang, perilaku partisipatif ternyata tak semudah yang diucapkan. Penumbuhan partisipasi warga negara, ternyata membutuhkan kecakapan warga negara (*civic skills*) terutama dalam hal mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan tanggung-jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat (Branson, 1999: 17). Untuk itu, upaya penumbuhan partisipasi warga negara perlu didukung oleh pelembagaan budaya politik (*civic culture*) yang kondusif bagi pembangunan bangsa, khususnya untuk *nation and character building*.

Merujuk pandangan Almond (1963), klasifikasi budaya politik terbagi ke dalam tiga katagori, yakni:

- a. Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
- b. Budaya politik kaula (*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
- c. Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Untuk lebih memahami bagaimana karakter dari tiga

tipe budaya politik, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Klasifikasi Budaya Politik

No.	Budaya Politik	Uraian / Keterangan
1.	Parokial	<ul style="list-style-type: none"> a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol. b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat. c. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim. f. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
2.	Subyek/ Kaula	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati

		<p>nol.</p> <p>b. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah</p> <p>c. Hubungannya terhadap sistem politik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.</p> <p>d. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan.</p> <p>e. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.</p>
3.	Partisipan	<p>a. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif</p> <p>b. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik)</p> <p>c. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik</p> <p>d. Masyarakat berperan sebagai aktivis.</p>

Sumber: Almond dan Verba (1963)

Berpegang pada klasifikasi budaya politik di atas, maka budaya politik yang kondusif dalam membangun partisipasi warga negara adalah klasifikasi budaya politik partisipan. Hal dikarenakan pada budaya politik

partisipasi, seorang warga negara tampil sebagai warga negara yang aktif, memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai warga negara, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik, dan berperan sebagai aktivis dalam kehidupan masyarakat. Perilaku nyata yang dicontohkan para warga negara partisipan, merupakan wujud partisipasi dirinya sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik, sekaligus upaya nyata mereka dalam menumbuhkan budaya kewarganegaraan demokratis berkarakter kebangsaan. Winataputra dan Budimansyah (2007) menjelaskan, "*civic culture* ...menekankan pentingnya hak partisipasi warga negara untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan publik". Diperjelas oleh Putnam (1993), bahwa partisipasi tersebut harus dibangun atas hal-hal yang mendasar, yakni: (1) egalitarianisme atau hubungan timbal-balik secara horizontal sesama warga; (2) pluralisme, di mana perbedaan paham, kepercayaan dan kepentingan sesama warga diterima sebagai kenyataan hidup yang harus dihargai, karena toleransi sosial-politik memberi ciri krusial terhadap *civic community*; dan (3) rasa saling percaya (*trust*) dan solidaritas sesama warga.

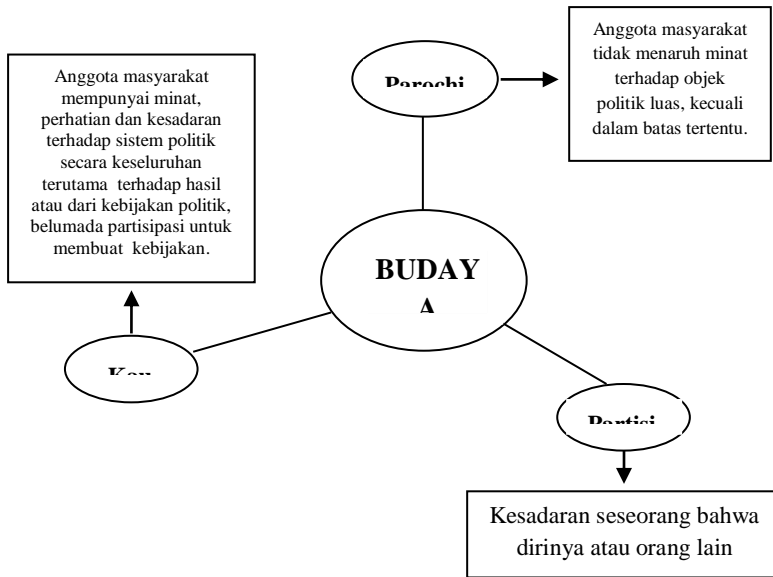
Budaya kewarganegaraan merupakan perilaku masyarakat demokratis yang menyadari pentingnya partisipasi sebagai penggerak demokrasi dalam masyarakat, yang kemudian warga negara tersebut menyadari konsekuensi dari perilakunya tersebut. Perilaku ini merupakan pengakuan atas potensi manusia yang memiliki rasa, karsa dan karsa yang atas kesadarannya mengusung sikap saling menghormati di antara pribadi masyarakat dan antar masyarakat. Dengan demikian budaya kewarganegaraan menuntut pada pribadi individu dan masyarakat untuk tidak hanya

berbicara, melainkan secara sadar siap terlibat dengan keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat. Keterlibatan dalam kehidupan politik berwujud perilaku politik yang diperlihatkan dengan sikap dan tindakan individu atau kelompok yang diwarnai orientasinya terhadap kehidupan politik.

Berkenaan dengan orientasi politik, Almond dan Verba (1963) mengklasifikasi tipe-tipe orientasi politik yang meliputi: (1) orientasi kognitif, berkenaan dengan pengetahuan dan kepercayaan pada politik; (2) orientasi afektif, berkenaan dengan perasaan terhadap sistem politik dan perannya sebagai aktor serta penampilannya; dan (3) orientasi evaluatif, berkenaan dengan keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Kepemilikan tiga orientasi politik secara bersamaan yang disertai partisipasi konkrit, menjadi pola tingkah-laku individu atau kelompok yang memberi kontribusi kondusif bagi tumbuhnya budaya politik partisipan.

Paparan di atas menunjukkan budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan antar warga dan warga negara dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan tingkat kompetensi politik, yakni menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat *efficacy* atau keberdayaan karena mereka merasa memiliki kekuatan politik yang dapat ditunjukkannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, warga negara yang partisipan merasa perlu untuk terlibat dalam proses pembangunan politik dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik untuk *nation and character building*.



Kontribusi dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*), terutama budaya politik partisipan adalah tumbuhnya budaya demokrasi dan tumbuhnya masyarakat multikultural demokratis yang berkarakter kebangsaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bahmuller (Winataputra dan Budimansyah, 2007) bahwa *civic culture* merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi tumbuhnya perkembangan demokrasi. Di dalam *civic culture* itu sendiri terdapat sejumlah nilai-nilai karakter kebangsaan yang positif yang mencakup: keterlibatan aktif warga negara; hubungan kesejajaran (*egaliter*), saling percaya (*trust*), toleransi kehidupan yang kooperatif, solidaritas, *sense of belonging*, dan semangat kebangsaan yang dapat dijadikan sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antaretnis dalam derajat yang cukup mantap.

C. Pendidikan Karakter sebagai Wahana Sistemik Pembangunan Karakter Kebangsaan

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang dibuatnya (Suyatno, 2009). Beberapa ciri orang yang memiliki karakter menurut Kirschenbaum (1995) antara lain: hormat, tanggungjawab, peduli, disiplin, loyal, berani, dan toleran. Seseorang yang berkarakter mulia memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, dan tabah. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan bertindak sesuai potensi dan kesadarannya. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter

yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis (Suyatno, 2009). Ditambahkan oleh Elkind dan Sweet (2004), bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya untuk membantu peserta didik memahami, peduli, dan berperilaku sesuai nilai-nilai etika yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriterianya adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Dengan demikian, tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik (insan kamil). Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan

membentuk karakter anak melalui orang tua dan lingkungannya.

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*) (Direktorat Pembinaan SMP, 2010). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar peserta didik dan atau warga sekolah lain yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan (moral).

Dimensi-dimensi yang termasuk dalam *moral knowing* yang akan mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*). *Moral feeling* merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri (*conscience*), percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*), cinta kebenaran

(*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), kerendahan hati (*humility*). *Moral action* merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) (Lickona, 1991).

Pandangan Thomas Lickona di atas, pada hakekatnya sama, bahwa pendidikan karakter sebagai pendidikan moral dalam penerapannya harus menyentuh pada tiga dimensi secara utuh, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Dijelaskan oleh Buchori (2007), bahwa pengembangan karakter seharusnya membawa anak ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang amat penting yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat kuat (tekad) untuk mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut *conatio*, dan langkah untuk membimbing anak membulatkan tekad ini disebut langkah konatif. Pendidikan karakter mestinya mengikuti langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari pengenalan nilai secara kognitif, langkah memahami dan menghayati nilai secara afektif, dan langkah pembentukan tekad secara konatif. Ki Hajar Dewantoro menterjemahkannya dengan kata-kata *cipta, rasa, karsa*.

Untuk memenuhi keberhasilan akademis yang dimaksud, Pusat Pengembangan Kurikulum (PUSKUR, 2010)) telah mengembangkan konsep pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menuangkannya dalam suatu dokumen resmi yang berjudul “Pedoman Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah”.

Dalam dokumen tersebut “budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya”. Sedangkan karakter dimaknai sebagai “watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat kepada orang lain, dan sebagainya. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dan pengertian pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka “pendidikan budaya dan karakter bangsa” diartikan sebagai proses internalisasi serta penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dilakukan peserta didik secara aktif di bawah bimbingan guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan serta diwujudkan dalam kehidupannya di kelas, sekolah, dan masyarakat.

Rumusan di atas, tetap menampilkan konsep pendidikan ideal yang secara umum menanamkan pengetahuan (kognitif), menanamkan nilai-nilai atau sikap (afektif), dan melatih keterampilan (psikomotorik) kepada para peserta didik untuk mempersiapkan masa depannya yang lebih baik. Karakter adalah ‘*distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group*’. Kamus Besar

Bahasa Indonesia memang belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata 'watak' yang diartikan sebagai: sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Jadi, dapat diartikan secara umum bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif'. Orang berkarakter adalah orang punya kualitas moral tertentu yang positif.

Dengan demikian pendidikan membangun karakter secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Karakter atau watak adalah ekspresi dari keseluruhan nilai-nilai yang kita taati. Karakter seseorang merupakan ekspresi dari suatu moralitas. Kini, krisis moral tengah melanda para generasi bangsa, sebagai akibat pergeseran (*shift*) nilai-nilai yang berdampak terhadap warna moralita bangsa.

Pembentukan karakter bukanlah hal yang mudah. Karakter dibangun dari berbagai aspek yang mendukungnya dan melalui proses yang berkelanjutan serta komitmen yang kuat. Dengan demikian, pembentukan karakter perlu waktu panjang, dari masa kanak-kanak sampai usia dewasa ketika seseorang mampu mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri.

Di era globalisasi, karakter yang kuat memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki integritas yang tinggi sebagai bangsa Indonesia. Berkaitan dengan tantangan besar bangsa yang dihadapi, kita perlu menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui pendidikan karakter berbasis nilai. *Re-discovery*, revitalisasi, atau *invented tradition*

nilai-nilai sosial-budaya kebangsaan perlu dilakukan melalui medium pendidikan karakter bagi generasi bangsa sebagai figur generasi bangsa.

Untuk itu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda perlu dirancang sebagai wahana sistemik dengan tujuan:

- a. Mengembangkan potensi afektif generasi bangsa sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
- b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku generasi bangsa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius
- c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab generasi bangsa sebagai penerus bangsa
- d. Mengembangkan kemampuan generasi bangsa menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan
- e. Mengembangkan kreativitas dan persahabatan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*).

Bila ditilik kandungan isi dari tujuan di atas, pendidikan karakter bukan berbobot pada *transfer of knowledge* tetapi lebih memiliki kedudukan sebagai *transfer of values*. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter (PUSKUR, 2010) dikembangkan dengan bersumber pada:

1. *Agama*: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama. Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan

budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

2. *Pancasila*: negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi dan kemasyarakatan diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan dan kemauan, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupannya sebagai warga negara.
3. *Budaya*, adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.
4. *Tujuan Pendidikan Nasional*; tujuan pendidikan nasional adalah kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Di dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga

negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.

Pendidikan karakter berbasis kebangsaan, sejak awal kemerdekaan sebenarnya telah terpikirkan oleh Bung Karno sebagai salah satu pendiri bangsa yang dengan tegas menyatakan pentingnya *nation and character building*. Pengisian kemerdekaan, bukan hanya menekankan pembangunan *welfare-state*, tetapi juga pembangunan karakter bangsa yang kuat untuk membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya.

Dalam penanaman karakter, pendidikan memiliki fungsi yang paling utama. Pendidikan, baik dalam keluarga (in-formal), masyarakat (non-formal) maupun di sekolah (formal) memiliki peran yang sangat penting. Melalui sinergi tiga lingkungan pendidikan ini, proses pembelajaran karakter terjadi sepanjang hayat, untuk membentuk watak dan mengembangkan potensi diri, sehingga terbentuk kepribadian unggul, cerdas, kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik secara lokal, nasional maupun global.

Sekaitan dengan paparan Pendidikan Karakter di atas, diharapkan pendidikan karakter bagi generasi bangsa dapat mengembalikan peran generasi bangsa dalam pembangunan karakter bangsa, yakni perannya sebagai patriotis, nasionalis yang inklusif, intelektualis yang moralis. Untuk menginternalisasi ketiga karakter tersebut bagi generasi bangsa, maka pendidikan karakter harus dirancang dengan membekali beberapa kompetensi, yakni:

1. Kompetensi personal, kemampuan dasar yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kepribadian diri peserta didik sebagai makhluk individu yang merupakan hak dan tanggung jawab personalnya. Kompetensi yang dikembangkan adalah pembentukan konsep dan pengertian diri, sikap objektif terhadap diri sendiri, aktualisasi diri, kreativitas diri, kemandirian itu sendiri, termasuk bagaimana menumbuhkembangkan budi pekerti luhur, disiplin dan kerja keras serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga perlu menumbuhkembangkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaannya.
2. Kompetensi sosial, kemampuan dasar yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Kompetensi yang dikembangkan adalah kesadaran dirinya sebagai anggota masyarakat sehingga perlu saling menghormati dan menghargai; pemahaman dan kesadaran atas kesantunan hidup bermasyarakat dan berbangsa; kemampuan berkomunikasi dan kerja sama antara sesama; sikap pro-sosial atau altruisme; kemampuan dan kepedulian sosial termasuk lingkungan; memperkokoh semangat kebangsaan, pemahaman tentang perbedaan.
3. Kompetensi intelektual, merupakan kemampuan berpikir yang didasarkan pada adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu yang baik yang bersifat fisik, sosial, psikologis, yang memiliki makna bagi dirinya maupun orang lain. Kompetensi yang dikembangkan adalah daya pikir untuk menerima dan memproses serta membangun pengetahuan, nilai dan sikap, serta tindakannya baik dalam kehidupan personal maupun

sosial, kemampuan mengidentifikasi masalah sosial, merumuskan masalah sosial dan memecahkan masalah.

Dengan tiga kompetensi di atas, Pendidikan Karakter sebagai wahana program sistemik pendidikan karakter bangsa, dapat turut membentuk karakter generasi bangsa yang mampu:

- a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut dan menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional;
- b. Memahami sikap percaya diri terhadap kekurangan dan kelebihan diri sendiri;
- c. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas;
- d. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif serta menerapkan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain;
- e. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
- f. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah gejala alam dan sosial dalam kehidupan sehari-hari;
- g. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, menghargai karya seni dan budaya nasional;
- h. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun dengan menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan;
- i. Memiliki jiwa kewirausahaan dan menghargai tugas pekerjaan serta memiliki kemampuan untuk berkarya;
- j. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat serta menghargai adanya perbedaan pendapat;

- k. Memiliki nasionalisme yang tinggi dan kesetiaan terhadap NKRI;
- l. Pemilikan nilai-nilai budaya bangsa (*having*) sekaligus menjadikannya (*being*) sebagai jatidiri bangsa sekaligus mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Penutup

Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter bagi generasi bangsa memerlukan strategi pembelajaran yang berprinsip pada: bermakna (*meaningful*) bagi perannya sebagai figur generasi bangsa, integratif (*integrative*) bagi perannya dalam membangun persatuan dan kesatuan, berbasis nilai (*value based*) bagi perannya sebagai gerakan moral, menantang (*challenging*) bagi perannya dalam menyongsong masa depan, dan aktif (*active*) bagi perannya sebagai dinamisator pembangunan bangsa. Pendidikan Karakter diharapkan dapat membekali generasi bangsa dengan seperangkat pengetahuan (*knowledge*), sikap (*disposition*) yang berpangkal pada kebajikan (*virtues*) dengan sejumlah nilai-moral didalamnya serta keterampilan (*skill*), sebagai kompetensi yang dapat berkontribusi bagi eksistensi dan kemajuan hidup bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, J.R.S. (2012). *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Almond, G. and Verba, S. (1963). *The civic Culture*. Boston and Toronto: Little Brown and Company.
- Assegaf, R.A. (2004). *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*, Jogjakarta: Tiara Wacana, Cetakan Pertama.
- Bandura, A., & Walter, R.H. (1973). *Social Learning Theory and Personality Development*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Banks, J.A. (1994). *An Introduction to Multicultural Education*, Boston: Allyn and Bacon.
- Bertens ,(1993). *Etika..* Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Branson, Margaret S., dkk. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*.Yogyakarta: LKIS.
- Buchori, M. 2007. *Character Building Dan Pendidikan Kita* (<http://www.kompas.co.id/kompascetak/0607/26/opini/2836169.htm>).(Diunduh 20 September 2014).
- Borba, M, (2008). *Building Moral Inteligens, The Seven Essential Virtues that Teach Kids to do The Right Thing, Tert."*Membangun Kecerdasan Moral, Tujuh Kebajikan Utama Untuk Membentuk Anak Bermoral Tinggi,". Oleh Lina Yusuf, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Center for Civic Education. (1994). *National Standards for Civics and Government*. Calabasas, CA: CCE.

- Cholisin, (2000). *Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan-Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Cholisin, (2000). *Ikn-PKn*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Cholisin, 2004. Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan., *Journal Civic*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 14-28.
- Cogan, J.J. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page Perspective on Education. London: Cogan Page.
- Daradjat, Z. (1971). *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Dawam, A.. (2003). *Emoh Sekolah: Menolak "Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual"*, Jogjakarta: Jnspeal Ahimsakarya Press, Cetakan Pertama.
- Depdiknas. (2003). *Mata Pelajaran Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Depdiknas. (2006). *Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP
- Dewantara, A. (2017). *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Jogjakarta : Kanisius.
- Dewey, J., (1953). *How We Think*, Boston: D.C.Heath.
- Direktorat Pembinaan SMP. (2010). *Panduan Pendidikan Karakter*. (Depdiknas: Jakarta).
- Elkind, D. & Sweet, F. 2004. *How to do character educatio* (http://www.goodcharacter.com/Article_4.html) (Diunduh 20 September 2014).

- _____, 2016, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: kanisius
- Gorski. (2001). *Educating Citizens for Democracy*, London: Oxford University Press.
- Goleman, D. (2001). *Kecerdasan Emosional*, Terj. Hermaya, T. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hall, B. (1973). *Value Clarification as Learning Process*. New York: Paulist Press.
- Hall., B. at all. (1982). *Reading in Value Development*. New Jersey: Paulist Press.
- Halstead, J. Mark dan Taylor, Monica J. (2000). "Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research." *Cambridge Journal of Education*. Vol. 30 No.2, pp. 169-202.
- Hill, B.V. (1991). *Values Education in Australian Schools*. Victoria The Australian Council for Education Research Ltd. Radhford House.
- Hobsbawm, E.J. and Ranger, T.O. (eds). (1983). *The Invention of Tradition*. New York: Cambridge university Press.
- Jamaludin, dkk. (2020). *Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan*. Medan: Kita menulis.
- Bertens. (1993). *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- _____, (2004). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kalidjernih, F.K. (2008). *Cakrawala Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grasindo.

- _____, (2009). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Katresna, "Grand Design Pendidikan Karakter" dalam Katresna72. wordpress.com, Dipublikasikan 23 Oktober 2010, <http://katresna72.wordpress.com/2010/10/23rand-design-pendidikan-karakter/>.
- Kemko Kesejahteraan Rakyat. (2010). *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemko Kesejahteraan Rakyat.
- Khoironi. (2004). *Pendidikan Profetik*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama.
- Kirschenbaum, H. (1995). *100 Ways To Enhance Values And Morality In Schools And Youth Settings*. Massachusetts: Allys & Bacon.
- Kirschenbaum, Howard. (2000). "From Values Clarification to Character Education: A Personal Journey." *The Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*. Vol. 39, No. 1, September, pp. 4-20.
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-tahap Perkembangan Moral* (alih Bahasa: John de Santo dan Agus Cremmers). Yogyakarta: Kanisius
- Kung, H. (1991). *Global Responsibility In Search of a New World Ethic*. New York : Crossroad Pub. Co.
- Lickona, Thomas. (1991) . *Educating for Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantan Books.
- Lubis, M.A. (2015). *Pengembangan Nilai Karakter Pada Anak Sekolah Dasar Sesuai Pancasila Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Prosiding Seminar Nasional AP3Knl Sumut dan IMAPENDAS UNIMED. Medan: Larispa Indonesia.

- Mastuti, R, dkk (2020). *Teaching From Home: dari Belajar Merdeka menuju Merdeka Belajar*, Medan: Kita menulis
- Mertokusumo, S. (1985). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty1988.
- NCSS. (1994). *Curriculum Standard for Social Studies*. Washington: Expectation of Excellence Washington.
- Nasikun. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Nawawi, 2010. *Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus Bangsa*, Bandung. Vol.16 No. 2
- Patrick, John J. (1999). "Concepts, at the Core Education for Democratic Citizenship," dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick (eds.), *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship*. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 1-40.
- _____, (1999). "Defining, Delivering, and Defending a Common Education for Citizenship in a Democracy," dalam John J. Patrick, Gregory E. Hamot, dan Robert S. Leming (eds.), *Civic Learning in Teacher Education*. Vol 2, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 5-23.
- Pasandaran, S. (2016). *Etika Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak
- Print, Murray, et.al. (1999). *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.
- PUSKUR. (2010). *Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: PUSKUR.

- Putnam, R.D. (1993) *.Making Democracy Work: Civic Tradition In Modern Italy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Rachels, J. (2004). *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Quiqley, Charles, N. (2000). *Global Trends in Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Sanusi, H.A. (1998). *Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*. Bandung: Panitia Semlok PPKn IKIP Bandung.
- _____, (1993). "Quo Vadis Pendidikan IPS?" dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Edisi Kedua Volume 1 No. 2 Juli-Desember, hlm 9.
- Suyatno. (2009). *Urgensi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Depdiknas.
- Sapriya. (2012). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Sastroepoetro, AS. 1986. *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Semarang: Alumni.
- Setiawan, D. (2012). "Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktf, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan". *Makalah disampaikan pada Seminar internasional dan Konferensi Internasional Pendidikan Dasar dengan tema "Early-Childhood Education: Active, Creative, Joyful*. Medan: Universitas Negeri Medan 6-7 Juli 2012.
- Soerjono.S. (1985). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- _____, (1993). *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Masalah "Sara" dalam Bahan dan Metode Pendidikan Kewarganegaraan pada 3 Lingkaran Pendidikan di Indonesia. (Makalah)*. Bandung: Jurusan PMPPKN FPIPS IKIP Bandung.
- Soyomukti, N. (2011). *Pengantar filsafat umum: Dari Pendekatan Historis, Pemetaan Cabang-Cabang Filsafat, Pertarungan Pemikiran, Memahami Filsafat Cinta, hingga Panduan Berpikir Kritis-Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Supriadi, D. (2001). *Budi Pekerti dalam Kurikulum 1947-1994*. Harian Umum Pikiran Rakyat, Bandung, 12 Juni 2001
- Suryadi, A dan Somardi. (2000). *Pemikiran Ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. (Makalah)*. Bandung: CICED.
- Suseno, F.M. (1987), *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- Susilawati, Suryanti dkk. (2010). *Urgensi Pendidikan Moral Sebagai Upaya Membangun Komitmen Diri*. Yogyakarta: Surya Perkasa
- Suyatno. (2009). *Urgensi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Depdiknas.
- Soejadi. (1998). *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Tilaar, H.A.R. (2000). *Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan Kedua.

- _____, 2003 *Multikulturalisme: Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.
- Tim ICCE, UIN (2008). *Demokrasi. Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenata Media Group.
- Wahab, A.A. (1999). *Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia Bagi Terbinanya Warga Negara Multidimensional*. (Makalah). Bandung: CISED.
- Wahid, A. (2004) *Keragaman Budaya Bangsa*, Kompas, 23 Juni 2004. Wahab. A dan Winataputra. (1998). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), UUD 1945 GBHN*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winataputra U.S. (2006). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Bandung: Progam Pascasarjana UPI.
- Winataputra (2002), U.S.(2002), *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam*. (Laporan). Jakarta:STAIN.
- Winataputra dan Budimansyah. (2007). *Civic Education. Konteks, Landasan Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.
- Winataputra, dkk. (2008). *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yaqin, A. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Culttiral Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogjakarta: Pilar Media, Cetakan Pertama.

- Zamroni, (2009). *Pembelajaran IPS dan Kultur Baru Sekolah*. Yogyakarta: FISE UNY.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana

TENTANG PENULIS



Arief Wahyudi, S.H., M.H., lahir di Solok Selatan, 6 Juni 1982. Setelah menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di FH. USU tahun 2004, dia menyelesaikan Studi S2 di Program Magister Hukum FH USU dan selesai pada tahun 2016. Sejak 2006, ia aktif sebagai dosen di Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unimed. Penulis pernah menjabat Sekretaris Pusat Studi HAM Unimed sejak 2008-2014, ia kemudian menjadi Sekretaris Jurusan di Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Unimed sejak tahun 2014 Sampai dengan tahun 2018. Sekarang ia menjabat sebagai Ketua Jurusan pada Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Unimed untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Dr. Deny Setiawan, M.Si., lahir di Bandung tanggal 8 Maret 1968 dari pasangan Bapak S. Gunawan dan Ibu Budiningrum Saptarini (Alm). Menikah dengan E. Hartini dikarunia tiga putera, yakni: Ega Maulana Kumbara (1996), Giovanni Ashar merupakan anak pertama dari empat bersaudara. My (2002) dan Argie Jullyan (2008). **Riwayat Pendidikan.** SDN Kartika Putera Jakarta Selatan (1981); SMPN Cimalaka Sumedang (1984); SMAN 1 Bogor (1987); Lulusan S1 FPIPS IKIP Bandung pada Jurusan PMP-Kn (1992); Lulus S2 pada Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada (1998); dan lulus S3 pada Program Studi Pendidikan IPS dengan Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. **Riwayat Pekerjaan.** Dosen Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (1994-sekarang); Tutor Universitas Terbuka (UT) Medan (2002-sekarang); Ketua Penyunting Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (2009-sekarang); dan asesor BAN-PT (2014-sekarang).



Jamaludin, dilahirkan di Bengkalis pada tanggal 19 februari 1988, menyelesaikan Studi S1 di FKIP Universitas Riau dan studi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada saat ini menjadi dosen tetap di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dan pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Terlibat aktif dalam penulisan buku tentang pendidikan dan pembelajaran, serta berpartisipasi sebagai narasumber dan moderator di beberapa diskusi publik.
